



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2021

Sarilamak, Juli 2020

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami persembahkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat rahmat dan karuniaNya Alhamdulillah kami telah dapat menyusun Rancangan awal Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021 Rencana Kerja ini disusun guna memenuhi kewajiban pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Permendagri Nomor 86 tahun 2017 serta penjabaran dari Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 –2021. Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan dokumen rencana kerja yang berfungsi sebagai pedoman kerja bagi aparatur Sekretariat Daerah dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan Sekretariat Daerah pada Tahun 2021. Rancangan Rencana Kerja ini dijadikan sebagai pedoman rencana operasional oleh bagian-bagian di Sekretariat Daerah dalam pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan.

Kami menyadari rancangan Rencana Kerja ini mungkin masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati demi kesempurnaan penyajian rancangan Renja yang akan datang kami mengharap adanya masukan dari semua pihak. Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi – tingginya kepada semua pihak yang telah turut serta membantu dalam menyusun rancangan Rencana Kerja ini sehingga dapat selesai sebagaimana mestinya.

Sarilamak, Juli 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

WIDYA PUTRA, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640404 198603 1 017



DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu.....	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....	48
2.3 Isu- isu penting penyelenggaraan Tugas dan fungsi SKPD	63
2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD	77
2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	91
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	93
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi.....	93
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	97
3.3 Program dan Kegiatan	103
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	113
4.1 Rencana Kerja.....	113
4.2 Pendanaan Perangkat Daerah	113
BAB V PENUTUP	147
LAMPIRAN Keputusan Bupati Nomor 285 Tentang Struktur Organisasi Penyusun Renja PD Tahun 2021.....	148

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Capaian Indikator kinerja Utama (IKU) Setda tahun 2019.....	9
Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Sekretariat Daerah s/d tahun 2019.....	11
Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah	51
Tabel T-C.31 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	77
Tabel T-C.32 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	91
Tabel 3.3 Rekapitulasi Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah	104
Tabel 3.4 Rekapitulasi Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah menurut Permendagri Nomor 90 tahun 2019.....	109
Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021 serta Perkiraan Maju Tahun 2022	114
Tabel 4.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021 serta Perkiraan Maju Tahun 2022 menurut Permendagri No. 90 Tahun 2019	139

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1	Dokumentasi Rapat Koordinasi bidang pemerintahan 27
Gambar 2	Dokumentasi Penyerahan Bantuan hibah untuk masjid 51

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021 merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 serta Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Tahun Nomor 140 Tahun 2011.

Dalam rangka melaksanakan pembangunan, perencanaan adalah tahapan awal yang akan menentukan hasil akan diperoleh dari pelaksanaan pembangunan. Program/kegiatan yang direncanakan secara cermat dengan memperhitungkan berbagai aspek diharapkan dapat meminimalisir permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan program/kegiatan nantinya, sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai dengan optimal dan tidak jauh meleset dari yang diharapkan oleh pelaksana.

Terkait dengan perencanaan program/kegiatan pembangunan di Indonesia, hal ini diatur dalam UU No 25 tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional, pada pasal 7 ayat 2 (dua) di katakan bahwa “ Renja PD disusun dengan berpedoman kepada Renstra PD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat “.

Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Dalam melakukan penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) Renja PD Tahun 2021, Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan. Dengan berpedoman pada pasal 16 ayat 2 Permendagri 86 Tahun 2017, tahapan penyusunan Renja Sekretariat Daerah sebagai berikut:

I. Persiapan penyusunan;

Mengadakan orientasi penyusunan Renja Sekretariat Daerah yang melibatkan seluruh Kepala Bagian dan Kasubag yang terkait dengan perencanaan pada bagian masing- masing. Orientasi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi antar sesama anggota tim dalam hal tatacara, kaidah serta jadwal penyusunan penyusunan renja.

II. Penyusunan rancangan awal;

Pada awal bulan Oktober 2019 sudah dilaksanakan berbagai sosialisasi mengenai persiapan penyusunan rancangan awal Renja Sekretariat Daerah oleh tim penyusun pada sub bagian Penyusunan Program Bagian Keuangan. Pada Akhir bulan Oktober 2019 sudah dilaksanakan rapat Sinkronisasi Penyusunan rancangan Awal Renja Perangkat Daerah tahun 2021, yang antara lain dengan agenda sejauh mana perkembangan Perangkat Daerah dalam penyusunan Rancangan Awal Renja dimaksud. Penyusunan rancangan awal Renja mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Renja tahun lalu yang disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Pendahuluan;
- b. Hasil evaluasi Renja tahun lalu;
- c. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- d. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
- e. Penutup.

III. Penyusunan rancangan;

Penyusunan Rancangan Renja merupakan Rancangan Awal Renja yang disempurnakan mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD. Penyajian Rancangan Renja Sekretariat Daerah disajikan dengan sistematika yang sama dengan Rancangan Awal Renja.

IV. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;

Berdasarkan hasil koordinasi Bapelitbang dan OPD, maka demi efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Forum OPD dilaksanakan secara gabungan yang nanti akan diatur oleh Bapelitbang, yang akan dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Pembahasan dengan pemangku kepentingan bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah. Hasil pembahasan rancangan Renja Perangkat Daerah dalam forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang hadir pada forum Gabungan Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah.

V. perumusan rancangan akhir;

Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Hal ini untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.

VI. penetapan.

Dalam hal penetapan Renja, Bapelitbang mengumpulkan Rancangan Akhir Renja semua Perangkat Daerah untuk diverifikasi dan selanjutnya dijadikan sebagai bahan penetapan Peraturan Bupati

Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan

Rencana Kerja OPD adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi serta perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tahapan penyusunan RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yakni sebagai pedoman dalam Penyusunan

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS (Prioritas dan Pelaporan Anggaran Sementara).

Seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan RPJMD adalah Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD). Selanjutnya setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disahkan maka menjadi acuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan dalam Renja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen Perencanaan tahunan. Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Renstra, dan dalam penyusunannya mengacu pada Rancangan Awal Renja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Anggaran dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah. Rencana Kerja juga harus mengakomodir hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Forum Satuan Kerja Pemerintah Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kebijakan pemerintah pusat/Provinsi Jawa Timur.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja tahun 2021 pada unit kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, berdasarkan kepada :

1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25)
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara ;
5. Undang–Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang–Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005 – 2025.

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005 – 2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
19. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Rancangan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota ini adalah:

a. Maksud

Maksud dari penyusunan rancangan Rencana kerja 2020 ini adalah untuk menetapkan arah kerja serta menjadi pedoman dalam pelaksanaan maupun mengevaluasi program dan kegiatan di Sekretariat Daerah. Sedangkan tujuan dari penyusunan rencana kerja ini adalah untuk menetapkan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun periode dimaksud.

b. Tujuan

Tujuan dari penyusunan rancangan Renja ini adalah:

- Untuk menetapkan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam renstra .
- Menjadi Pedoman dalam Penyusunan KUA-PPAS Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021.
- Menjadi Pedoman untuk dapat mencapai hasil yang berdaya guna dan berhasil guna (efektif dan efisien) sehingga mengurangi potensi kerugian dan kegagalan dalam menjalankan kegiatan dana/anggaran, terutama dalam hal penggunaan dan pengelolaan dana/anggaran.

1.4. Sistematika Penyusunan Rencana Kerja

Sistematika penulisan yang dipakai dalam penyusunan rancangan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020 ini meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum dan hubungan dengan dokumen perencanaan lain serta sistematika laporan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu berisikan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah, analisis kinerja pelayanan, isu- isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi, dan review terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan.

BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah menguraikan tentang Tujuan yang hendak dicapai, dan sasaran serta target pencapaian pembangunan satu tahun kedepan, yang dijabarkan melalui program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang rencana kerja dan sasaran yang dicapai pada tahun 2021 serta pendanaan kegiatan pada masing- masing Bagian di Sekretariat Daerah

BAB V PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan, kaidah- kaidah pelaksanaan serta tindak lanjut penyusunan renja.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun 2019) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2020), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi-evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Sekretariat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016 Nomor 15) pada tahun anggaran 2019, memiliki 31 (Tiga puluh satu) Program yang diwujudkan dengan 90 (Sembilan puluh) kegiatan. Dimana pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan pada 10 (sepuluh) bagian di lingkup Sekretariat Daerah.

Secara umum pelaksanaan Program/ kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (RENJA) yang dilaksanakan oleh sampai pada Tahun 2018 sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut terlihat pada capaian Realisasi yang memuat capaian kinerja pelayanan berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) terlihat pada tabel, sebagai berikut :

Tabel 2.1
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian %
1.	Meningkatnya fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Hukum	Nilai EKPPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tingkat Nasional.	-	3,1500	*	*
		Persentase Kegiatan Pemerintahan yang terfasilitasi	100%	100%	100%	100%
		Persentase rancangan produk Hukum yang yang ditindak lanjuti sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	100%	100%	100%	100%
		Nilai Komponen Pelaporan Akuntabilitas Kinerja	-	67	66,57	99,35%
		Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	75	82,76	110,34%
		Persentase Koordinasi Sektor Perekonomian	90%	90%	100%	100%
		Persentase lancarnya pengadaan barang dan jasa di Kab. Lima Puluh Kota yang sesuai aturan perundang undangan.	-	90%	94,81%	118%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian %
		Persentase Masjid/ Mushalla/Surau/ MDA/ TPQ yang dibantu Pemda melalui hibah	-	7,70 %	6,59 %	85,54%
		Persentase Kegiatan Keagamaan yang terkoordinasi	100%	100%	100%	100%
		Persentase kerjasama yang terfasilitasi	-	100%	100%	100%
		Persentase terpenuhinya pelayanan kegiatan KDH/WKDH	100%	100%	100%	100%
		Nilai Akuntabilitas Sekretariat Daerah	-	67	66,57	99,35%
		Persentase kegiatan Pemerintah Daerah yang terpublikasikan	100%	100%	100%	100%

*) = belum ada data penilaian

Untuk lebih rinci yang menampilkan review dan pelaksanaan Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019 di Sekretariat Daerah beserta realisasi anggaran, dapat dilihat pada *Tabel T-C.29*

Tabel T-C.29

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra
SEKRETARIAT DAERAH
s.d Tahun 2019**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2019				
					Target Renja SKPD tahun 2019	Realisasi Renja SKPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
1. BAGIAN TATA PEMERINTAHAN UMUM													
20	03	16											
			Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil kepala daerah	<i>Outcomes:</i> lancarnya penyelenggaraan pemerintahan daerah	100%	89%	100 % pada 4 (empat) kegiatan	100 % pada 4 (empat) kegiatan	75%	100%	79%	79%	
			Kegiatan:										
20	03	16	01	1. Dialog/ audiensi dengan tokoh tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota social masyarakat	<i>Output:</i> Tercapainya peningkatan harmonisasi hubungan pemerintah daerah dengan tokoh masyarakat, organisasi sosial kemasyarakatan	5 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	0 kegiatan	0%	4 Dokumen	0 kegiatan	20%
20	03	16	03	2. Rapat koordinasi unsure muspida	Tercapainya peningkatan harmonisasi hubungan pemerintah daerah dengan muspida	3 kegiatan	3 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	100%	0 Kegiatan	0 Kegiatan	100%
20	03	16	04	3. Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah	Tercapainya peningkatan harmonisasi hubungan antar SKPD dan terlaksananya peringatan hari jadi kabupaten	60 kegiatan	18 kegiatan	12 kegiatan	6 kegiatan	50%	80%	24 kegiatan	40%
20	03	16	06	4. Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	Tercapainya peningkatan harmonisasi hubungan pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi dan pusat	60 kegiatan	27 kegiatan	12 Kegiatan	3 Kegiatan	25%	80%	30 kegiatan	50%
20	03	30		Program meningkatkan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kdh	<i>Outcomes:</i> Tercapainya peningkatan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	3 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	100%	3 dokumen	100%
20	03	30	32	1. Penamaan rupa bumi	Terlaksananya pendataan dan pembakuan nama rupa bumi unsur budaya	5 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	80%	1 dokumen	90%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2019	
					Target Renja SKPD tahun 2019	Realisasi Renja SKPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
20 03 30 3	2. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDh	Tersedianya kesegaraman adm. Kecamatan sesuai aturan	28 dokumen	28 dokumen	13 kecamatan	13 kecamatan	13 kecamatan	13 kecamatan	13 kecamatan	100%
20 03 30	3. Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Terlaksananya evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	5 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 Dokumen	1 dokumen	100%
20 03 23	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Kegiatan:	<i>Outcomes:</i> Tercapainya peningkatan kualitas pelayanan publik di kecamatan	13 kecamatan	13 kecamatan	13 kecamatan	13 kecamatan	100%	100%	13 kecamatan	100%
20 03 23 01	1. Penyusunan system informasi terhadap layanan public	<i>Output:</i> Terlaksananya pelayanan administrasi terpadu di kecamatan (PATEN)	13 kecamatan	13 kecamatan	13 kecamatan	13 kecamatan	100%	100%	13 kecamatan	100%
20 03 23	2. Pendidikan dan pelatihan PATEN bagi aparatur kecamatan	Tersedianya aparatur yang memahami tugas teknis pemerintahan	13 kecamatan	13 kecamatan	13 kecamatan	13 kecamatan	100%	100%	13 kecamatan	100%
20 03 27	Program penataan otonomi daerah Kegiatan:	<i>Outcomes:</i> Tersedianya daerah yang tertata pemerintahan dan dan daerahnya sesuai dengan peruntukan	5 paket	4 paket	1 paket	1 paket	100%	60%	5 paket	95%
20 03 27 03	1. Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah	<i>Output:</i> Terlaksananya pelacakan, penegasan, dan penepatan tapal batas diwilayah kabupaten lima puluh kota	5 paket	4 paket	1 paket	1 paket	100%	50%	5 paket	100%
20 03 30	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Kegiatan:	<i>Outcomes:</i> Terwujudnya peningkatan pemahaman kapasitas aparatur kecamatan	5 kegiatan	2 kegiatan	13 kecamatan	13 kecamatan	100%	100%	5 kegiatan	100%
20 03 30 03	1. Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah	<i>Output:</i> Tersedianya aparatur yang memahami tugas teknis pemerintahan	5 kegiatan	3 kegiatan	13 kecamatan	13 kecamatan	100%	100%	4 kegiatan	100%
20 03 31	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	<i>Outcomes:</i> Terlaksananya evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan kepala daerah pada	5 kegiatan	5 kegiatan	13 camat	13 camat	100%	100%	5 kegiatan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2019					
					Target Renja SKPD tahun 2019	Realisasi Renja SKPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
	Kegiatan:	aparatur pemerintah kecamatan												
20	03	31	17	1. Pemberian penghargaan bagi camat berprestasi	<i>Output:</i> Penghargaan bagi camat berprestasi	5 kegiatan	3 kegiatan	13 camat	13 camat	100%	100%	4 kegiatan	80%	
20	03	16		Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	<i>Outcomes:</i> Tersedianya tanah yang telah dibebaskan/ diganti rugi untuk pembangunan sarana pemerintah, sosial dan umum	100%	0%	0%	0.00%	0%	0%	0%	0%	
20	03	16	01	1. Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	<i>Output:</i> Terlaksananya penyediaan tanah yang telah dibebaskan/ diganti rugi untuk pembangunan sarana pemerintah, sosial dan umum	100%	0%	0%	0.00%	0%	0%	0%	0%	
20	03	17		Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	<i>Outcomes:</i> Terlaksananya kasus-kasus pertanahan	4 kasus	0 kasus	0 kasus	0 kasus	0%	0%	0 kasus	0%	
20	03	17	01	1. Fasilitas penyelesaian konflik-konflik pertanahan	<i>Output:</i> Terlaksananya penyelesaian konflik-konflik pertanahan.	4 kasus	0 kasus	0 kasus	0 kasus	0%	0%	0 kasus	0%	
2. BAGIAN HUKUM														
20	03	26		Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Produk Hukum yang sesuai dengan mekanisme pembentukan Produk Hukum Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	90%	
20	03	26	01	Kegiatan koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan	Jumlah khusus yang difasilitasi penyelesaiannya	3 Kasus	15 Kasus	5 Kasus	5 Kasus	100	100	4 Kasus	24 Kasus	90%
20	03	26	02	Kegiatan penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang undangan	Jumlah rancangan peraturan Kepala Daerah yang ditetapkan	35 peraturan bupati dan 135 keputusan bupati	50 peraturan bupati dan 310 keputusan bupati	57 peraturan bupati dan 278 keputusan bupati	57 peraturan bupati dan 278 keputusan bupati	100	100	30 peraturan bupati dan 130 keputusan bupati	137 pertauran bupati dan 718 keputusan bupati	85%
20	03	26	03	Kegiatan legislasi rancangan peraturan perundang undangan	Jumlah rancangan Perda yang dikaji	16 rancangan peraturan daerah	24 rancangan peraturan daerah	3 rancangan peraturan daerah	3 rancangan peraturan daerah	100	100	14 rancangan peraturan daerah	41 rancangan peraturan daerah	2,6
20	04	27	04	Kegiatan fasilitasi sosialisasi peraturan perundang undangan	Jumlah nagari dan aparatur pemerintahan yang	25 nagari dan 750 aparatur	32 nagari dan 805 aparatur	10 nagari dan 325 aparatur	10 nagari dan 325 aparatur	100	100	20 nagari dan 600 aparatur	62 nagari dan 1.880 aparatur	2,5

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2019				
					Target Renja SKPD tahun 2019	Realisasi Renja SKPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
		diberikan penyuluhan hukum	pemerintah	pemerintah	pemerintah	pemerintah		pemerintah	pemerintah				
20	05	28	05	Kegiatan publikasi peraturan perundang-undangan	Jumlah produk hukum yang dipublikasikan	100 buku peraturan perundang-undangan yang telah dipublikasikan	320 buku peraturan perundang-undangan yang telah dipublikasikan	80 buku peraturan perundang-undangan	80 buku peraturan perundang-undangan	100	90 buku peraturan perundang-undangan yang telah dipublikasikan	490 buku peraturan perundang-undangan yang telah dipublikasikan	4,9
20	06	28	17	Kegiatan evaluasi dan pengawasan produk hukum nagari	Jumlah rancangan produk hukum nagari yang di evaluasi	90 rancangan peraturan nagari yang di evaluasi	180 rancangan peraturan nagari yang di evaluasi	512 rancangan peraturan nagari yang di evaluasi	512 rancangan peraturan nagari yang di evaluasi	100	85 rancangan peraturan nagari yang di evaluasi	777 rancangan peraturan nagari yang di evaluasi	8,6
20	06	28	18	Kegiatan diseminasi aksi nasional hak asasi manusia	Jumlah aparatur pemerintah dan masyarakat yang mengikuti diseminasi	60 aparatur pemerintah dan masyarakat	180 aparatur pemerintah dan masyarakat	60 aparatur pemerintah dan masyarakat	60 aparatur pemerintah dan masyarakat	100	60 aparatur pemerintah dan masyarakat	300 aparatur pemerintah dan masyarakat	5,0
3. BAGIAN ORGANISASI													
01	01	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Akuntabilitas Setda	75	70	67	66,57	99,35%	80	-	
01	01	06	01	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai LKJIP dan PK	Nilai A	Nilai CC	Nilai B	Nilai CC	-	Nilai BB	Nilai CC	-
01	01	26		Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Produk Hukum yang sesuai dengan mekanisme pembentukan Produk Hukum Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	100%
01	01	26	07	Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penerapan SPM	Jumlah SKPD yang dimonitoring	Dokumen SPM	Dokumen SPM	Dokumen SPM	Dokumen SPM	100%	Dokumen SPM	100%	100%
01	01	31		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase tersusunnya dokumen analisis dan evaluasi jabatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
01	01	31	06	Kegiatan Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS	Jumlah Dokumen Anjab	Dokumen Anjab	Dokumen Anjab	Dokumen Anjab	Dokumen Anjab	100%	Dokumen Anjab	1007%	100%
01	01	31	18	Kegiatan Penyusunan Evaluasi Jabatan	Jumlah Dokumen Evjab	Dokumen Evjab	Dokumen Evjab	Dokumen Evjab	Dokumen Evjab	100%	Dokumen Evjab	100%	100%
01	01	35		Program Reformasi Birokrasi	Jumlah peraturan perundang-undangan yang telah disosialisasikan	Peraturan Perundang-Undangan	3 Peraturan yang telah disosialisasikan	1 peraturan perundang-undangan	1 Peraturan Perundang-undangan	100%	Peraturan Perundang-Undangan yang	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2019				
					Target Renja SKPD tahun 2019	Realisasi Renja SKPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
			yang tersosialisasikan	ikan				tersosialisasikan					
01	01	35	01	Kegiatan Restrukturisasi/penataan tugas dan fungsi SKPD	Jumlah Ranperda(Perda) dan Ranperbup(Perbup) tentang Tupoksi	2 Kegiatan (Perda dan Perbup)	2 Kegiatan (Perda dan Perbup)	2 Kegiatan (Perda dan Perbup)	100%	2 Kegiatan (Perda dan Perbup)	100 %	90 %	
01	01	35	02	Kegiatan Penetapan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan SOP	Jumlah Monitoring ke SKPD yang menerapkan SPP dan SOP dan Bimtek SOP	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	2 Kegiatan	100 %	90 %	
01	01	35	06	Kegiatan Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi	Sosialisasi dan Monitoring Reformasi Birokrasi	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	2 Kegiatan	100 %	90 %	
01	01	35	07	Kegiatan Penyusunan Pedoman Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	Perbup tentang Tata Naskah Dinas(Ketatalaksanaan)	Perbup	Perbup	Perbup	100%	Perbup Tata naskah Dinas	100 %	90 %	
4. BAGIAN KERJASAMA DAN MINBANG													
1	01	01	25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Terpenuhinya kesepakatan kerjasama dengan lembaga pemerintah, badan maupun pihak ketiga dalam rangka peningkatan sektor ekonomi	90 %	93,75 %	86 %		88 %			
20	3	25	02	Kegiatan Fasilitasi/Pembentukan perkuatan kerjasama antar daerah pada bidang ekonomi	Tercapainya kesepakatan kerjasama antar daerah dengan lembaga pemerintah, badan maupun pihak ketiga dalam meningkatkan sektor ekonomi	10 MoA/MoU	4 MoU	4 MoU	7 MoU	175%	10 MoA/MoU	-	-
20	3	25	05	Kegiatan Koordinasi kerjasama Pembangunan Antar Daerah	- Tercapainya kesepakatan kerjasama antar lembaga pemerintah pusat, propinsi maupun daerah.	4 MoA	4 MoU	4 MoU	22 MoU	550%	4 MoA	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2019	
					Target Renja SKPD tahun 2019	Realisasi Renja SKPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
20 3 25 06	Kegiatan Fasilitasi/Pembentukan kerjasama dengan dunia usaha/lembaga	- Tercapainya kesepahaman atas dasar kerjasama antar daerah dengan lembaga pemerintah maupun pihak ketiga	8 MoA	4 MoU	4 MoU	4 MoU	100%	8 MoA	-	-
20 3 25 07	Kegiatan Pendataan Perantau Minang di Nagari	Terlaksananya penguatan kelembagaan kecamatan dan nagari dalam pendataan perantau	34 Nagari	-	20 Nagari	4 Kecamatan 25 Nagari	100%	34 Nagari	-	-
20 3 25 08	Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Nagari Binaan Kerjasama Rantau	Terlaksananya pembentukan nagari Binaan Kerjasama Rantau	15 Nagari	5 Nagari	5 Nagari	5 Nagari	100%	25 Nagari	-	-
20 3 25 09	Kegiatan Peningkatan Jaringan Komunikasi Pemerintah Daerah dengan Perantau	Terlaksananya pertemuan Jaringan Komunikasi Pemerintah Kabupaten dengan perantau minang	8 MoU/ MoA	-	4 MoU/ MoA	4 MoU/ MoA	100%	5 MoU/ MoA	-	-
01 01 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Tersedianya bahan informasi Up to date tentang pelaksanaan program/ kegiatan bagi KDH	93 %		91 %			92 %		
01 01 20 36	Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan APBD	Himpunan Rekapitulasi capaian/ kemajuan program/ kegiatan SKPD per-bulan	96 buku		96 buku	96 buku	100%	96 buku		
01 01 20 09	Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala daerah tentang Penyelenggaraan dan Pengaturan Sistem	Terlaksananya penyusunan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan anggaran	1 Perbub		1 buku	1 buku	100%	1 buku		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2019				
					Target Renja SKPD tahun 2019	Realisasi Renja SKPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
	Pengendalian Intern	pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020											
5. BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA													
1	20	20											
		<i>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</i>											
1	2	20	20	Kegiatan Penyusunan format standar administrasi pengadaan barang dan jasa	Tersedianya format-format yang dibutuhkan dalam pengadaan barang dan jasa	10 format	18 format	1 format	1 format	100%	2 format	20 format	200%
1	2	20	33	Kegiatan Pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa	Persentase terlaksananya pemilihan penyedia di ULP sesuai dengan peraturan perundang-undangan	97%	100 %	80 paket	89 paket	111,25%	100 %	100%	100%
1	2	20	34	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengadaan barang/jasa	Laporan triwulan monitoring pengadaan barang dan jasa	20 laporan	8 laporan	4 laporan	4 laporan	100%	4 laporan	16 laporan	80%
1	2	20	35	Kegiatan Penilaian dan penyelesaian permasalahan pengadaan barang dan jasa	Terfasilitasinya permasalahan dalam pengadaan barang dan jasa	50 masalah	30 masalah	10 masalah	10 masalah	100%	10 masalah	40 masalah	80%
1	2	30		<i>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</i>									
1	2	30	05	Kegiatan Pelatihan, Bimtek dan Workshop ULP	Bimtek/ diklat peningkatan kompetensi yang diikuti personil UKPBJ	10 bimtek/ diklat	4 bimtek/ diklat	1 bimtek	3 bimtek	300%	2 bimtek	9 bimtek	90%
6. BAGIAN PEREKONOMIAN													
1	2	17		<i>Program Perlindungan dan Konservasi Sumber</i>	Persentase terpenuhinya penyusunan dok	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2019	
					Target Renja SKPD tahun 2019	Realisasi Renja SKPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Daya Alam	evaluasi dan pelaporan								
1	2 17 18	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100%	10 Kegiatan	95%	95%
1	2 16 0	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95%	95%
1	2 16 05	Kegiatan fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi	7 event	7 event	2 event	2 event	100%	5 event	95%	95%
1	2 30 07	Kegiatan Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD	35 PKP RI	35 PKP RI	30 PKP RI	30 PKP RI	100%	32 PKP RI	95%	95%
1	2 15 0	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95%	95%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2019				
					Target Renja SKPD tahun 2019	Realisasi Renja SKPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
		perusahaan daerah dan BPR/bank nagari sesuai peraturan perundang-undangan											
1	20	15	04	Kegiatan koordinasi antar lembaga dlm pengendalian investasi PMDN/ PMA	Terlaksananya koordinasi dan pengawasan BUMD, BUMN dan Perusahaan Swasta	6 BPR, 2 BUMD	6 BPR, 2 BUMD	6 BPR, 2 BUMD	6 BPR, 2 BUMD	100%	6 BPR, 2 BUMD	95%	95%
1	20	15		Program pengembangan data/ informasi/ statistik daerah	Persentase data potensi ekonomi daerah yang diperbaharui dalam buku potensi ekonomi daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95%	95%
1	20	15	02	Kegiatan pengolahan, updating dan analisis data dan statistic daerah	Jumlah buku potensi ekonomi daerah yang dicetak	500 buku	100 buku	100 buku	100 buku	100%	100 buku	95%	95%
1	20	15		Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang pertambangan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	20	15	04	kegiatan koordinasi dan pendataan ttg hasil produksi dibidang pertambangan	Terlaksananya koordinasi, monitoring pengendalian dan evaluasi terhadap pengelola dan pemanfaat minyak bumi dan energi	7 Kegiatan/ Rakor	7 Kegiatan/ Rakor	7 Kegiatan/ Rakor	7 Kegiatan/ Rakor	100%	5 Kegiatan/ Rakor	100%	100%
1	20	17		Program pengembangan kemitraan	Persentase permasalahan migas yang dikoordinasikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	20	17	05	Kegiatan pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata	Persentase peningkatan koordinasi kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2019				
					Target Renja SKPD tahun 2019	Realisasi Renja SKPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
1	20	15											
1	20	15	03	Kegiatan Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Persentase koordinasi kegiatan DBH-CHT dan pengawasan distribusi pupuk dan pestisida bersubsidi	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
1	20	15											
1	20	15											
1	20	15	03	Kegiatan Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Terwujudnya koordinasi dgn OPD terkait pemanfaatan dana DBHCHT	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	100%	100%
1	20	15											
1	20	15											
1	20	15											
1	20	15	06	Kegiatan peningkatan system dan jaringan informasi perdagangan	Persentase kegiatan TPID, TPAKD dan TPDD yang dikoordinasikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	20	15	06	Kegiatan peningkatan system dan jaringan informasi perdagangan	-jumlah laporan dalam rangka pemantauan harga komoditi yang beredar	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	100%	100%
7. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT													
x	xx	01											
x	xx	01	01	Program Peningkatan Pemahaman Keagamaan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Keagamaan yang terfasilitasi								
x	xx	01	01	Penyelenggaraan even-even keagamaan	Jumlah pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten dan Jumlah kafilah yang terfasilitasi untuk mengikuti even MTQ Nasional Tk Provinsi	3 kali MTQ Tk Kab. dan 3 kali MTQ provinsi	Fasilitasi terhadap kafilah Kab. Lima Puluh Kota untuk even MTQ Provinsi	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Fasilitasi terhadap kafilah Kab. Lima Puluh Kota untuk even MTQ Provinsi	-	80%
x	xx	01	02	Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)	Jumlah Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) yang terfasilitasi	33 kali	10 kali	5 kali	5 kali	100%	6 kali	6 kali	63,64%
x	xx	01	03	Peningkatan Manajemen Organisasi dan Kopetensi Pembimbing Lembaga Didikan Subuh	Jumlah Lomba LDS Tk. Kab dan Provinsi yang dibina dan dinilai	71 LDS	15 LDS	14 LDS	14 LDS	100%	14 LDS	14 LDS	46,48%
x	xx	02											
x	xx	02	01	Safari Ramadhan	Persentase Kegiatan Keagamaan yang terkoordinasi	461 masjid	145 masjid	79 masjid	79 masjid	100%	79 masjid	79 masjid	65,72%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2019				
					Target Renja SKPD tahun 2019	Realisasi Renja SKPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
		Safari											
x	xx	03											
		Program Pengembangan Nilai Budaya											
x	xx	03	01	Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya dan keagamaan	Jumlah Jamaah Haji dan TPHD yang difasilitasi pemberangkatan dan pemulangnya	1.882 orang	493 orang	797 orang	797 orang	100%	355 orang	1.152 orang	61,21%
x	xx	03	02	Peningkatan nilai-nilai budaya dan keagamaan	Jumlah guru Surau, TPQ, MDTA dan Imam serta Gharin Masjid	18.025 orang	5865 orang	3000	2972 orang	99,07%	3010 orang	6010 orang	65,82%
x	xx	04		Program Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya pembinaan kelembagaan masyarakat								
x	xx	04	01	Pelaksanaan pembinaan dan lomba-lomba UKS	Jumlah UKS yang dibina dan dinilai pada sekolah untuk LSS tingkat Kab. Dan Provinsi	336 sekolah	112 sekolah	56 sekolah	56 sekolah	100%	56 sekolah	-	66,67%
x	xx	04	02	Koordinasi dan peningkatan jejaring kerjasama stakeholder kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan dan dihadiri pada tingkat provinsi dan pusat	48 kali	15 kali	7 kali	7 kali	100%	7 kali	2 kali	60,42%
x	xx	04	03	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial	Jumlah Wirid dan Senam Pagi yang terselenggara	132 kali wirid, 132 kali senam	44 kali wirid, 44 kali senam	22 kali wirid, 22 kali senam	20 kali wirid, 17 kali senam	84,09%	18 kali wirid, 18 kali senam	6 kali wirid, 6 kali senam	94,32%

8. BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN

1	01	01		Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya pelayanan kegiatan KDH/WKDH	100%	85%	90%	90%	100%	95%	84,5%	100%
1	01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Persentase terpenuhinya peralatan surat menyurat dan benda pos lainnya	100%	85%	90%	90%	100%	95%	90%	100%
1	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik	Persentase terbayarnya biaya komunikasi, sumber daya air, listrik, dan telepon	100%	85%	90%	90%	100%	95%	78,5%	100%
1	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase terpenuhinya alat kebersihan kanto	100%	85%	90%	90%	100%	95%	90%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2019	
					Target Renja SKPD tahun 2019	Realisasi Renja SKPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1 01 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase terpenuhinya alat tulis kantor sesuai dengan kebutuhan	100%	85%	90%	90%	100%	95%	85,5%	100%
1 01 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan sesuai dengan kebutuhan	100%	85%	90%	90%	100%	95%	85%	100%
1 01 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Persentase terpenuhinya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor dan rumah dinas	100%	85%	90%	90%	100%	95%	86,5%	100%
1 01 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentasenya terpenuhinya makan minum KDH/WKDH, tamu dan rapat-rapat	100%	85%	90%	90%	100%	95%	88,5%	100%
1 01 01 18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Persentase terikutinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah sesuai kebutuhan	100%	85%	90%	90%	100%	95%	73,5%	100%
1 01 01 19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung administrasi/Teknis Perkantoran	Persentase terpenuhinya jasa tenaga pendukung administrasi / teknis perkantoran Setda	100%	85%	90%	90%	100%	95%	77%	100%
1 01 02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase terpenuhinya pelayanan kegiatan KDH / WKDH	100%	85%	80%	80%	100%	100%	79,75%	100%
1 01 02 05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpenuhi	6 unit	4 unit	-	-	100%	5 unit	5 unit	100%
1 01 02 08	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Persentase terpenuhinya peralatan rumah jabatan / dinas	100%	85%	90%	90%	100%	95%	81%	100%
1 01 02 09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Persentase terpenuhinya peralatan gedung kantor	100%	85%	90%	90%	100%	95%	70,5%	100%
1 01 02 10	Pengadaan Mebeleur	Persentase terpenuhinya	100%	85%	90%	90%	100%	95%	85,5%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2019	
					Target Renja SKPD tahun 2019	Realisasi Renja SKPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		mebeleur kantor								
1	01 02 21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas	100%	85%	90%	90%	100%	95%	90%	100%
1	01 02 22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	100%	85%	90%	90%	100%	95%	74%	100%
1	01 02 23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	100%	85%	90%	90%	100%	95%	71,5%	100%
1	01 02 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Ops	100%	85%	90%	90%	100%	95%	88,5%	100%
1	01 02 26	Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	100%	85%	90%	90%	100%	95%	89,5%	100%
1	01 02 40	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	100%	85%	90%	90%	100%	95%	74,5%	100%
1	01 03	Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	85%	90%	90%	100%	95%	74%	100%
1	01 03 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	100%	85%	90%	90%	100%	95%	74%	100%
1	01 16	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	-	100%	100%	100%	100%	66,67%	100%
1	01 16 02	Pendidikan dan Pelatihan Formal	15 kali	-	15 kali	8 kali	55%	5 kali	15 kali	100%
1	01 16 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	100%	-	100%	100%	100%	100%	66,67%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2019				
					Target Renja SKPD tahun 2019	Realisasi Renja SKPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
	Aparatur												
1	01	16	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah terikutinya kegiatan pendidikan dan pelatihan formal bagi ASN Setda	15 kali	-	15 kali	15 kali	100%	15 kali	20 kali	100%
			16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah		100%	85%	90%	90%	100%	95%	68,67%	100%
			02	Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Departemen / Lembaga Pemerintah Non Departemen / Luar Negeri	Persentase terpenuhinya layanan kunjungan kerja pejabat negara / departemen / lembaga pemerintah non departemen	100%	85%	90%	90%	100%	95%	78,5%	100%
			05	Kunjungan Kerja / Inspeksi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Persentase terpenuhinya kegiatan inspeksi KDH / WKDH	100%	85%	90%	90%	100%	95%	80%	100%
1	01	16	08	Peningkatan Kapasitas Kepala Daerah/KDH dan Wakil KDH (LEMHANAS)	Jumlah terikutinya kegiatan peningkatan kapasitas KDH / WKDH (Lemhanas)	6 orang	6 orang	6 orang	0 orang	0%	6 orang	6 orang	100%
1	01	05		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									
1	01	05	01	Pendidikan dan pelatihan formal	Terpenuhinya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	20,28%	20,28%
1	01	05	06	Bimbingan teknis keprotokolanan	Terlaksananya kegiatan bimbingan teknis bagi aparatur	1 kegiatan bimbingan teknis	1 kegiatan bimbingan teknis	1 kegiatan bimbingan teknis	1 kegiatan bimbingan teknis	1 kegiatan bimbingan teknis	1 kegiatan bimbingan teknis	-	-
9. BAGIAN KEUANGAN													
1	20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya pelayanan kegiatan KDH/WKDH	100%	85%	90%	74%	80,74%	95%	84,5%	100%
1	20	02	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Persentase Pengelola Administrasi Keuangan yang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2019		
					Target Renja SKPD tahun 2019	Realisasi Renja SKPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		terbayarkan honorinya									
1	20 06	Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Akuntabilitas Sekretariat Daerah			7	9,42	134%			
1	20 06 02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen Laporan keuangan Semesteran dan Prognosis yang selesai tepat waktu	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	0	1 dokumen 100%	
1	20 06 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Terwujudnya laporan keuangan setda yang dapat dipertanggung jawabkan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	100%	1 dokumen 100%	
10. BAGIAN HUMAS DAN PEMBERITAAN											
20	10 16 '09	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala daerah/ WKDH	Persentase pelaksanaan kegiatan kepala daerah/wakil kada sesuai dengan aturan yg berlaku, terlaksananya tata keprotokolan baik di dalam maupun di luar daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Layanan Keprotokolan KDH/Wakil KDH	Terseleenggaranya kegiatan kepala daerah/Wakil kada sesuai dengan aturan dan tata keprotokolan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	20 30 06	Program : Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kapasitas aparatur terhadap aturan keprotokolan	1 Kegiatan	90%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	100%	100%
		Bimbingan Teknis Keprotokolan	Terseleenggaranya bimbingan teknis keprotokolan	1 Kegiatan	90%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	90%	1 Kegiatan	100%	100%
20	10 15 20	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase kegiatan pemerintah daerah yang terpublikasikan	100%	100%	100%	100%	90%	Persentase kegiatan pemerintah daerah yang terpublikasikan	100%	100%
20	10 15 02	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan	Persentase terpublikasinya	4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	100%	Persentase terpublikasinya kegiatan	14,23%	14,23%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2019			
					Target Renja SKPD tahun 2019	Realisasi Renja SKPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)		
	Komunikasi dan Informasi	kegiatan pemerintah daerah melalui kegiatan Badan Koordinasi Kehumasan (BAKOHUMAS) daerah dan nasional serta melalui website Bagian Humas dan Pemberitaan Setda.	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan		pemerintah daerah melalui kegiatan Badan Koordinasi Kehumasan (BAKOHUMAS) daerah dan nasional serta melalui website Bagian Humas dan Pemberitaan Setda.				
20	10	18						Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Pesentase kegiatan pemerintah daerah yang terpublikasikan			
20	10	18	01	Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Persentase kegiatan pemerintah daerah yang terpublikasikan melalui media cetak dan elektronik	7 Media Harian dan 25 Media Mingguan	7 Media Harian dan 25 Media Mingguan	7 Media Harian dan 25 Media Mingguan	100%	Persentase kegiatan pemerintah daerah yang terpublikasikan melalui media cetak dan elektronik	18,08%	18,08%
20	10	18	02	Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase kegiatan pemerintah daerah yang terpublikasikan melalui media internal Pemkab " Tabloid Sinamar" serta pemberitaan daerah di media cetak dan elektronik	12 Kali Cetak / 1.000 eks	12 Kali Cetak / 1.000 eks	12 Kali Cetak / 1.000 eks	100%	Persentase kegiatan pemerintah daerah yang terpublikasikan melalui media internal Pemkab " Tabloid Sinamar	9,57%	9,57%
20	10	18	03	Kegiatan Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat	Tersebar nya informasi pembangunan melalui mobil unit keliling serta spanduk/baliho pembangunan	8 kali, 750 meter spanduk, 25 buah baliho	8 kali, 750 meter spanduk, 25 buah baliho	8 kali, 750 meter spanduk, 25 buah baliho	100%	Tersebar nya informasi pembangunan melalui mobil unit keliling serta spanduk/baliho pembangunan	17,62%	17,62%

Untuk evaluasi Rencana Kerja Tahun lalu pada masing- masing bagian dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Bagian PUM

Pada tahun anggaran 2019, Tata Pemerintahan Umum (TAPUM) memiliki 6 (enam) Program yang diwujudkan dengan 10 (sepuluh) kegiatan dimana pelaksanaan kegiatan tersebut terbagi pada tiga sub bagian yang ada di Tata Pemerintahan Umum yaitu Sub Bagian Tata Pemerintahan dan Perangkat Daerah, Hubungan Antar Lembaga dan Otonomi Daerah.

Secara umum pelaksanaan Program/kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (RENJA) yang dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan Umum (TAPUM) sampai pada Tahun 2019 sudah berjalan dengan Cukup baik. Hal tersebut terlihat pada capaian Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan pada tahun 2019 mencapai 91,13% dimana sesuai dengan Indikator Kinerja Utama pada bagian Tata Pemerintahan Umum adalah Fasilitasi dan Koordinasi bidang Pemerintahan, antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lainnya.



(Gambar 2 : Dokumentasi Rapat Koordinasi bersama aparatur dan pemerintahan mengenai batas daerah)

Secara menyeluruh rekapitulasi pelaksanaan RENJA pada Bagian Tata Pemerintahan Umum (TAPUM) dari tahun 2016 sampai pada Tahun 2019 (Tahun Berjalan) berada diangka 75%. Hal tersebut merupakan wujud keseriusan Bagian Tata Pemerintahan Umum (TAPUM) untuk melaksanakan seluruh Program maupun kegiatan yang telah tertuang pada RENJA di tahun 2019 dalam rangka memberikan dukungan penuh demi mewujudkan pemerintahan yang amanah sesuai dengan visi daerah.

2. Bagian Hukum

Pelaksanaan program dan kegiatan pelaksanaan pembangunan tahun 2019 di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu:

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan. Pada program ini terdapat 7 (tujuh) kegiatan pendukung sebagai berikut :

1. Kegiatan Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan

- Sumber Anggaran (APBD)
- Alokasi Anggaran Rp. 288.100.000,-
- Realisasi Kegiatan :
 - a. Realisasi keuangan Rp. 288.100.000,- (100%)
 - b. Realisasi fisik (100 %)

Kegiatan Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 288.100.000,- dan realisasi keuangan Rp. 288.100.000,- (100 %) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100 %, keluaran dari kegiatan ini adalah Terlaksananya koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan.

2. Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan

- Sumber Anggaran (APBD)
- Alokasi Anggaran Rp. 121.587.750,-
- Realisasi Kegiatan :

- a. Realisasi keuangan Rp. 119.189.103,- (98,03 %)
- b. Realisasi fisik (100 %)

Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 121.587.750,- dan realisasi keuangan Rp. 119.189.103,- (98,03 %) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100 %, keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Penyusunan Produk Hukum Daerah seperti Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

3. Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan

- Sumber Anggaran (APBD)
- Alokasi Anggaran Rp. 169.183.125,-
- Realisasi Kegiatan :
 - a. Realisasi keuangan Rp. 1168.203.800,- (99,42 %)
 - b. Realisasi fisik (100 %)

Kegiatan Legislasi Peraturan Perundang-Undangan yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 169.183.125,- dan realisasi keuangan Rp. 1168.203.800,- (99,42 %) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100 %, keluaran dari kegiatan ini adalah Perumusan dan penyusunan rancangan peraturan daerah dan penyusunan rencana legislasi Daerah.

4. Kegiatan Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

- Sumber Anggaran (APBD)
- Alokasi Anggaran Rp. 239.966.700,-
- Realisasi Kegiatan :
 - a. Realisasi keuangan Rp. 238.857.530,- (99,54 %)
 - b. Realisasi fisik (100 %)

Kegiatan Legislasi Peraturan Perundang-Undangan yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 239.966.700,- dan realisasi keuangan Rp. 238.857.530,- (99,54 %) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100 %, keluaran dari kegiatan ini adalah Terlaksananya penyuluhan hukum terhadap Aparatur Pemerintahan Nagari.

5. Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan

- Sumber Anggaran (APBD)
- Alokasi Anggaran Rp. 89.325.100,-
- Realisasi Kegiatan :
 - a. Realisasi keuangan Rp. 87.746.000,- (98,23 %)
 - b. Realisasi fisik (100 %)

Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 89.325.100,- dan realisasi keuangan Rp. 87.746.000,- (98,23 %) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100 %, keluaran dari kegiatan ini adalah Tersedianya Buku Himpunan Peraturan Pusat dan Daerah.

6. Kegiatan Evaluasi dan Pengawasan Produk Hukum Nagari

- Sumber Anggaran (APBD)
- Alokasi Anggaran Rp. 82.686.000,-
- Realisasi Kegiatan :
 - a. Realisasi keuangan Rp. 81.951.600,- (99,11 %)
 - b. Realisasi fisik (100 %)

Kegiatan Evaluasi dan Pengawasan Produk Hukum Nagari yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 82.686.000,- dan realisasi keuangan Rp. Rp. 81.951.600,- (99,11 %) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100 %, keluaran dari kegiatan ini adalah Terevaluasinya dan terawasinya produk hukum nagari yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Kegiatan Desiminasi Aksi Nasional Hak Azazi Manusia (HAM)

- Sumber Anggaran (APBD)
- Alokasi Anggaran Rp. 69.415.300,-
- Realisasi Kegiatan :
 - a. Realisasi keuangan Rp. 67.845.900,- (97,74 %)
 - b. Realisasi fisik (100 %)

Kegiatan Desiminasi Aksi Nasional Hak Azazi Manusia (HAM) yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 69.415.300,- dan realisasi keuangan Rp. 67.845.900,- (97,74 %) serta realisasi fisik kegiatan mencapai

100 %, keluaran dari kegiatan ini adalah Terlaksananya upaya kemajuan dan penegakan HAM tingkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah.

3. Bagian Organisasi

Pada tahun anggaran 2019, Bagian Organisasi melaksanakan 8 (delapan) kegiatan dimana pelaksanaan kegiatan tersebut terbagi pada tiga sub bagian yang ada di Bagian Organisasi. Secara umum pelaksanaan Program/kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (RENJA) yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi sampai pada Tahun 2019 sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut terlihat pada capaian Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan yang berada diangka 97,18%, dengan rincian :

- Kegiatan Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS dengan anggaran sebesar Rp. 153.252.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 149.533.100,- (97,57%) realisasi fisik sebesar 100% keluaran dari kegiatan ini adalah terwujudnya OPD yang memiliki dokumen analisis jabatan
- Kegiatan Penyusunan Evaluasi Jabatan dengan anggaran sebesar Rp. 130.000.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 129.944.200,- (99,96%) realisasi fisik sebesar 100% keluaran dari kegiatan ini adalah terwujudnya OPD yang memiliki dokumen evaluasi jabatan
- Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 175.688.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 170.237.000,- (96,90%) realisasi fisik sebesar 100% keluaran dari kegiatan ini adalah terwujudnya dokumen LKjIP dan Perjanjian Kinerja Kabupaten Lima Puluh Kota
- Kegiatan Restrukturisasi penataan tugas dan fungsi SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 146.318.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 136.888.492,- (93,56%) realisasi fisik sebesar 100% keluaran dari kegiatan ini adalah terwujudnya Peraturan daerah dan Peraturan bupati tentang Perubahan OPD

- Kegiatan Penyusunan Pedoman Ketatalaksanaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 61.240.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 61.209.000,- (99,95%) realisasi fisik sebesar 100% keluaran dari kegiatan ini adalah terwujudnya OPD yang memiliki dokumen Pedoman Ketatalaksanaan Perangkat Daerah
- Kegiatan Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi dengan anggaran sebesar Rp. 101.660.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 93.059.500,- (91,54%) realisasi fisik sebesar 100% keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Sosialisasi dan Monitoring bidang reformasi birokrasi
- Kegiatan Penyusunan dan Penerapan SPM dengan anggaran sebesar Rp. 99.075.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 98.740.300,- (99,66%) realisasi fisik sebesar 100% keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan monitoring penerapan SPM kepada SKPD
- Kegiatan Penetapan Standar Pelayanan Publik dengan anggaran sebesar Rp. 111.212.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 111.192.282,- (99,98%) realisasi fisik sebesar 100% keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya monitoring penerapan SPP dan SOP pada SKPD

4. Bagian Kerjasama dan Administrasi Pembangunan

Pada tahun anggaran 2020, Bagian Kerjasama dan Adm. Pembangunan memiliki 2 (dua) Program yang diwujudkan dengan 3 (tiga) sub kegiatan dimana pelaksanaan kegiatan tersebut terbagi pada delapan kegiatan yang ada di Bagian Kerjasama dan Adm. Pembangunan yaitu Sub Bagian Kerjasama Antar Daerah, Sub Bagian Kerjasama Pihak Ketiga dan Rantau dan Sub Bagian Administrasi Pembangunan.

Secara umum pelaksanaan Program/kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (RENJA) yang dilaksanakan oleh Bagian Kerjasama sampai pada Tahun 2019 sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut terlihat pada

capaian Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan diatas 100% dari target yang direncanakan, dengan rincian pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi/Pembentukan Perkuatan Kerjasama Antar Daerah Pada Bidang Ekonomi dengan realisasi kinerja 175% dimana dari target 4 MoU yang direncanakan dapat tercapai 7 MoU kerjasama yang disepakati, Kegiatan Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah dengan realisasi kinerja 550% dan Kegiatan Fasilitasi / Pembentukan Kerjasama dengan dunia usaha/lembaga dengan realisasi kinerja 100%. Seterusnya Kegiatan Pembentukan dan pembinaan kerjasama Rantau 100 %, Pendataan Perantau Kab. Lima Puluh Kota 100%, Pembuatan Jaringan Komunikasi antar daerah dan perantau 100%, Penyusunan rancangan Peraturan KDH tentang penyelenggaraan dan pengaturan system pengendalian intern APBD 95,11% serta kegiatan Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan APBD 100%%

Namun pelaksanaan kegiatan pada Bagian Kerjasama ditahun 2019 bukan tanpa kendala, dimana terdapat beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan diantaranya masih masih adanya Kerjasama yang tidak dapat difasilitasi dan kegiatan pembentukan jaringan komunikasi dengan rantau yang belum maksimal. Hal tersebut disebabkan karena :

1. Masih adanya perbedaan pemahaman tentang kerjasama daerah;
2. Adanya perbedaan peraturan kerjasama pada kementerian yang bersifat teknis, sehingga kerjasama belum dapat dilaksanakan; dan
3. Karena keterbatasan anggaran yang tersedia untuk Bagian Kerjasama dalam melaksanakan tugas dan fungsi dari masing- masing sub bagian.
4. Kegiatan yang ada belum mendukung sepenuhnya tugas dan fungsi masing-masing sub bagian yang ada.

5. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Mengacu kepada Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2019 Bagian Pengadaan Barang/Jasa baru terhitung efektif dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada bulan April 2019, oleh karena itu evaluasi dilakukan terhadap program dan kegiatan yang bisa dilaksanakan adalah dalam

bentuk evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bagian Administrasi Pembangunan pada tahun 2018 yang selanjutnya dilaksanakan oleh Bagian Pengadaan Barang/Jasa. Program dan kegiatan tersebut adalah:

- ❖ Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Program ini terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Penyusunan format standar administrasi pengadaan barang dan jasa
- b. Kegiatan Pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa
- c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengadaan barang/jasa
- d. Penilaian dan penyelesaian permasalahan pengadaan barang dan jasa
- e. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini terdiri dari satu kegiatan, yaitu :

- a. Kegiatan Pelatihan, Bimtek dan Workshop ULP

Dari 5 (lima) kegiatan tersebut dengan total dana Rp 592.170.200,- dapat direalisasikan sesuai dengan target keluaran dan kinerja yang telah ditetapkan. Untuk lebih detailnya realisasi dari program dan kegiatan tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Kegiatan penyusunan format standar administrasi pengadaan barang dan jasa

Kegiatan ini memiliki alokasi dana Rp. 42.298.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 35.781.500,- (84,59%). Keluaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya 8 (delapan) Standar Operasional Prosedur/SOP yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.

- b. Kegiatan pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa

Kegiatan ini memiliki alokasi dana Rp 320.026.200,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp 300.229.840,- (93,81 %). Keluaran dari pelaksanaan kegiatan ini

adalah terlaksananya proses pemilihan penyedia barang/jasa melalui tender sebanyak 80 paket.

c. Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengadaan barang/jasa

Kegiatan ini memiliki alokasi dana Rp. 50.838.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp 45.443.000,- (93,81%). Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan paket-paket yang telah ditender sebelumnya di Unit Layanan Pengadaan (ULP).

d. Kegiatan penilaian dan penyelesaian permasalahan pengadaan barang dan jasa

Kegiatan ini memiliki alokasi dana Rp 95.965.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp 93.080.000,- (96,99%).

e. Kegiatan pelatihan, bimtek dan workshop ULP

Kegiatan ini memiliki alokasi dana Rp. 50.711.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp 48.989.765,- (96,61%). Keluaran dari kegiatan ini adalah terikutinya bimtek sebanyak 2 kali oleh 4 personil.

6. Bagian Perekonomian

Berdasarkan tabel 2.1 di atas, evaluasi terhadap pencapaian target dan realisasi renja tahun 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- I. Program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, antara lain:
 1. *Selama tahun 2019 seluruh program dan kegiatan yang ada pada Bagian Perekonomian tidak ada yang tidak memenuhi target.*
- II. Program dan kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, antara lain:
 1. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, direncanakan target pencapaiannya sebesar 90%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 90%, sehingga tingkat realisasi adalah sebesar 100%. Adapun kegiatan yang telah tercapai targetnya antara lain:

- Koordinasi dalam rangka konsultasi, monitoring dan rapat-rapat permasalahan konservasi SDA yang direncanakan adalah sebanyak 6 laporan dengan realisasi pencapaiannya sebanyak 6 laporan atau dengan kata lain realisasinya sebesar 100%. Dengan tercapainya realisasi kegiatan tersebut maka tingkat pelaksanaan perencanaan telah terwujud.
2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah, direncanakan target pencapaiannya sebesar 90%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 90%, sehingga tingkat realisasi adalah sebesar 100%. Adapun kegiatan yang telah tercapai targetnya antara lain:
- Dalam rangka promosi produk unggulan daerah dan promosi produk UKM direncanakan adalah sebanyak 2 event pameran, realisasi adalah sebanyak 2 event pameran atau dengan realisasi sebesar 100%.
 - Pelaksanaan sosialisasi yang direncanakan terhadap anggota PKP-RI yang ada di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah 1 kali sosialisasi dengan peserta sebanyak 30 PKP-RI, realisasi pencapaiannya adalah 1 kali sosialisasi dengan peserta sebanyak 30 PKP-RI atau dengan realisasi 100%. Dengan tercapainya realisasi kegiatan maka pelayanan administrasi perkantoran di Bagian Perekonomian telah terwujud.
3. Program pengembangan system pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah, direncanakan target pencapaiannya sebesar 90%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 90%, sehingga tingkat realisasi adalah sebesar 100%. Adapun kegiatan yang telah tercapai targetnya antara lain:
- Pemantauan terhadap penggunaan fasilitas pemerintah untuk UKM dan koperasi dalam 1 tahun adalah sebanyak 12 laporan, realisasi pencapaiannya adalah 12 laporan atau dengan realisasi 100%.

Dengan tercapainya realisasi kegiatan maka pelayanan administrasi perkantoran di Bagian Perekonomian telah terwujud.

4. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi, direncanakan target pencapaiannya sebesar 80%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 80%, sehingga tingkat realisasi adalah sebesar 100%. Adapun kegiatan yang telah tercapai targetnya antara lain:
 - Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi perusahaan daerah dan BPR sesuai peraturan perundang-undangan direncanakan sebanyak 6 BPR dan 2 BUMD, realisasi pencapaiannya adalah 6 BPR dan 2 BUMD atau realisasi sebesar 100%. Dengan tercapainya realisasi kegiatan maka pelayanan administrasi perkantoran di Bagian Perekonomian telah terwujud.
5. Program pengembangan data/ informasi/ statistic daerah, direncanakan target pencapaiannya sebesar 90%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 90%, sehingga tingkat realisasi adalah sebesar 100%. Adapun kegiatan yang telah tercapai targetnya antara lain:
 - Pembuatan buku ekonomi daerah yang direncanakan sebanyak 100 buku yang dicetak, realisasi pencapaiannya adalah sebanyak 100 buku atau dengan realisasi sebesar 100%. Dengan tercapainya realisasi kegiatan maka pelayanan administrasi perkantoran di Bagian Perekonomian telah terwujud.
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang pertambangan, direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 100%, sehingga tingkat realisasi adalah sebesar 100%. Adapun kegiatan yang telah tercapai targetnya antara lain:
 - Koordinasi dan pemantauan terhadap permasalahan tentang hasil tambang yang ada di wilayah kabupaten Lima Puluh Kota direncanakan adalah sebanyak 7 kegiatan/rakor, realisasi pencapaiannya adalah sebanyak 7 kegiatan/rakor atau dengan realisasi sebesar 100%. Dengan tercapainya realisasi kegiatan

maka pelayanan administrasi perkantoran di Bagian Perekonomian telah terwujud

7. Program pengembangan kemitraan, direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 100%, sehingga tingkat realisasi adalah sebesar 100%. Adapun kegiatan yang telah tercapai targetnya antara lain
 - Koordinasi dan pemantauan terhadap obyek wisata yang ada di wilayah kabupaten Lima Puluh Kota direncanakan adalah sebanyak 1 laporan, realisasi pencapaiannya adalah sebanyak 1 laporan atau dengan realisasi sebesar 100%. Dengan tercapainya realisasi kegiatan maka pelayanan administrasi perkantoran di Bagian Perekonomian telah terwujud
8. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan, direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 100%, sehingga tingkat realisasi adalah sebesar 100%. Adapun kegiatan yang telah tercapai targetnya antara lain
 - Fasilitasi kegiatan sosialisasi yang direncanakan sebanyak 5 kali sosialisasi, dengan realisasi sebanyak 5 kali sosialisasi atau dengan realisasi sebesar 100%.
 - Koordinasi dan pemantauan terhadap penggunaan dana DBH-CHT dan pupuk dan pestisida bersubsidi yang beredar di wilayah kabupaten Lima Puluh Kota yang direncanakan sebanyak 2 laporan, dengan realisasi pencapaiannya adalah 2 laporan atau dengan realisasi sebesar 100%. Dengan tercapainya realisasi kegiatan maka pelayanan administrasi perkantoran di Bagian Perekonomian telah terwujud
9. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri, direncanakan target pencapaiannya sebesar 90%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 90%, sehingga tingkat realisasi adalah sebesar 100%. Adapun kegiatan yang telah tercapai targetnya antara lain:

- Penyediaan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah, direncanakan Jumlah OH yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi adalah sebanyak 3 OH, realisasi pencapaiannya adalah 3 OH atau dengan realisasi sebesar 100%. Dengan tercapainya realisasi kegiatan maka pelayanan administrasi perkantoran di Bagian Perekonomian telah terwujud.
- Penyediaan Rapat koordinasi tentang Inflasi Daerah, direncanakan rapat koordinasi sebanyak 2 laporan, realisasi pencapaiannya adalah 2 laporan, atau dengan kata lain tingkat realisasinya adalah sebesar 100%. Dengan tercapainya realisasi kegiatan dimaksud maka pelaksanaan perencanaan pembangunan ekonomi oleh Bagian Perekonomian telah terwujud.

III. Pada tahun 2019, tidak ada program dan kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Dari tabel 2.1 diatas juga dapat dijelaskan hasil evaluasi terhadap pencapaian target dan realisasi pencapaian renstra sampai dengan Triwulan II tahun 2019. Dikarenakan tahun 2019 ini merupakan tahun keempat dari pelaksanaan Renstra, maka pencapaian target program/kegiatan seharusnya telah mencapai kondisi 70%. Berikut dijelaskan program/kegiatan tingkat pencapaiannya dibawah, sama dengan dan besar dari 70%, sebagai berikut:

1. Program-program yang telah mencapai target 70% atau lebih antara lain:
 - Untuk program dari bagian perekonomian belum ada yang mencapai 70% atau lebih, dikarenakan kegiatan belum berjalan sesuai rencana disebabkan keterlambatan pencairan dana.
2. Program-program yang belum mencapai target 50% atau lebih antara lain:
 - Untuk program dari bagian perekonomian belum ada yang mencapai 70% atau lebih, dikarenakan kegiatan belum berjalan sesuai rencana penyebabnya dana belum cair.

7. Bagian Kesra

I. Program Peningkatan Pemahaman Keagamaan Masyarakat

1. Kegiatan Penyelenggaraan Even-Even Keagamaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.87.286.500,- dan realisasi keuangan Rp. 1.075.781.672,- atau 98,94% dengan realisasi fisik mencapai 100%.

Keluaran dari kegiatan ini adalah :

- a. Terlaksananya MTQ Tingkat Kab. Lima Puluh Kota.
- b. Terfasilitasinya peserta MTQ Nasional dari Kab. Lima Puluh Kota.

Dengan capaian kinerja adalah lahirnya qori dan qori'ah yang berprestasi dan tumbuhnya minat mempelajari Al Quran di masyarakat.

2. Kegiatan Peningkatan Manajemen Organisasi dan Kompetensi Pembimbing Lembaga Didikan Subuh dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 57.932.500,- dan realisasi keuangan Rp. 43.394.623,- atau 74,91% dengan realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah :

- a. Terlaksananya pembinaan terhadap pembimbing dan peserta lembaga didikan subuh;
- b. Terlaksananya pembinaan lembaga didikan subuh;
- c. Terlaksananya lomba didikan subuh tingkat Kab. Lima Puluh Kota (13 Kecamatan);
- d. Ikut sertanya Kab. Lima Puluh Kota pada lomba didikan subuh tingkat Prov. Sumatera Barat.

Dengan capaian Kinerja berupa terlaksananya pembinaan dan penilaian didikan subuh, anak-anak didikan subuh yang berakhlak mulia, cinta masjid dan pandai tulis baca Al Quran. Realisasi Kegiatan Terlaksana 100% tanpa ada hambatan yang berarti, namun secara anggaran tidak terserap seluruhnya karena pada rekening perjalanan dinas dalam daerah ada beberapa anggota tim penilai yang tidak dapat

pergi melaksanakan penilaian LDS, sehingga terjadi sisa dana pada rekening dimaksud.

3. Kegiatan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 70.327.500,- dan realisasi keuangan Rp. 63.042.810,- atau 89,64% dengan realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) di Kab. Lima Puluh Kota yaitu :
 - a. Penyelenggaraan malam takbiran dan Sholat Hari Raya Idul Fitri;
 - b. Penyelenggaraan malam takbiran dan Sholat Hari Raya Idul Adha;
 - c. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW;
 - d. Peringatan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW.
 - e. Peringatan 1 Muharram (Tahun Baru Hijriyah)

Dengan capaian kinerja akan semaraknya syiar agama Islam di Kab. Lima Puluh Kota.

II. Program Pembinaan Keagamaan Masyarakat

1. Kegiatan Safari Ramadhan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 223.345.000,- dan realisasi keuangan Rp. 200.345.594,- atau 89,70% dengan realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya kunjungan Tim Safari Ramadhan Kabupaten dan Provinsi ke Masjid-Mesjid di Kab. Lima Puluh Kota, dengan capaian kinerja antara lain :
 - a. Terjalannya silaturahmi antara Pemkab Lima Puluh Kota dengan masyarakat;
 - b. Tertampungnya aspirasi masyarakat secara langsung.

III. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

1. Kegiatan Peningkatan jejaring kerjasama stakeholders usaha kesejahteraan sosial masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 35.831.000,- dan realisasi keuangan Rp. 31.495.543,- atau 87,90% dengan realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan

ini adalah terlaksananya koordinasi antar pelaku-pelaku jejaring pengaman sosial, dengan capaian kinerja terkoordinasinya kegiatan pada Bagian Kesra dengan stakeholders terkait (Kabupaten, Provinsi dan Pusat).

2. Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 23.200.000,- dan realisasi keuangan Rp. 19.500.00,- atau 84,05% dengan realisasi fisik mencapai 86,36%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya wirid dan senam pagi, dengan capaian kinerja meningkatnya pemahaman keagamaan serta terjaganya keseimbangan kesehatan jasmani dan rohani.
3. Kegiatan Pelaksanaan Pembinaan dan Lomba-Lomba UKS dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 103.786.000,- dan realisasi keuangan Rp. 85.389.100,- atau 82,37% dengan realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pembinaan dan lomba-lomba sekolah sehat Tingkat Kab. Lima Puluh Kota dan Tingkat Provinsi, dengan capaian kinerja berupa terlaksananya penilaian LSS Tingkat Kabupaten dan Terkirimnya Sekolah sehat untuk Lomba Sekolah Sehat Tingkat Provinsi Sumatera Barat.

IV. Program Pengembangan Nilai-Nilai Budaya di Masyarakat

1. Kegiatan Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama di Bidang Budaya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 369.178.000,- dan realisasi keuangan Rp. 259.212.790,- atau 70,21% dengan realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlayannya dan terfasilitasinya pemberangkatan dan pemulangan (penjemputan) Jemaah Haji serta TPHD Kab. Lima Puluh Kota. Capaian kegiatan yang hanya 70%, hal ini disebabkan karena tidak terealisasinya dana ONH TPHD Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2019. Sudah disetor ke Kas Daerah namun tetap menjadi sisa dana karena adanya pembayaran kembali oleh TPHD.

2. Kegiatan Peningkatan Nilai-nilai Budaya dan Keagamaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.450.174.500,- dan realisasi keuangan Rp. 2.433.434.109,- atau 99,32% dengan realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya proses pembelajaran terhadap abak didik di Surau, TPQ dan MDTA, dengan capaian kinerja berupa meningkatnya pemahaman anak didik di Surau, TPQ dan MDTA tentang Agama Islam dan Budaya Minangkabau.

8. Bagian Umum

Selama Tahun 2019, Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota melaksanakan 5 program dan 25 kegiatan dengan total Dana Rp. 14.180.828.000,- dari 25 kegiatan yang dilaksanakan, dengan realisasi kinerja hampir semua kegiatan 100 % sesuai dengan hasil seperti yang diharapkan. Baik dari segi pelayanan administrasi secara umum, perlengkapan, penyediaan sarana dan prasarana perkantoran dan penyediaan mobilitas maupun pelayanan dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah.

Secara umum pelaksanaan Program / Kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (RENJA) yang dilaksanakan oleh Bagian Umum dan Perlengkapan sampai Tahun 2019 sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut terlihat pada capaian Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan yang berada di angka 100 %. Namun ada kegiatan yang tidak dapat direalisasikan yaitu Kegiatan Peningkatan kapasitas Kepala Daerah/KDH dan Wakil KDH (Lemhanas) hal ini disebabkan tidak adanya undangan permintaan kegiatan peningkatan kapasitas KDH/WKDH dimaksud.

Untuk Tahun 2021, Bagian Umum dan Perlengkapan masih terus berupaya melakukan perbaikan-perbaikan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini terutamanya berkaitan dengan penyelenggaraan tata usaha, pengadaan, kepegawaian, perjalanan dinas, keprotokolan,

perlengkapan, serta penyelenggaraan rumah tangga lingkup Sekretariat Daerah dan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah.

9. Bagian Keuangan

Pada tahun anggaran 2019, Bagian Keuangan memiliki 2 (dua) Program yang diwujudkan dengan 3 (tiga) kegiatan. Dimana pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan pada tiga sub bagian yang ada di Bagian Keuangan yaitu Sub Bagian Anggaran, Perbendaharaan dan sub bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.

Secara umum pelaksanaan Program/ kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (RENJA) yang dilaksanakan oleh Bagian Keuangan sampai pada Tahun 2019 sudah berjalan dengan baik.

9	Bagian Keuangan	Penyusunan laporan keuangan semesteran	33,136.000	29,562,227	1,675,000	31,237,227	94,27
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	768,594.000	427,240,103	25,540,000	452,780,103	58,91
		penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	16,753.000	16,390.000	-	16,390.000	97,83
		Jumlah	818,483.000	473,192,330	27,215,000	500,407,330	61,14

Dengan total anggaran sebesar Rp. 818.483.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 782,607.837,- (95,62%). Capaian Kegiatan tersebut yaitu : Terlaksananya Pembayaran Jasa Administrasi keuangan kepada pelaksana penatausahaan keuangan, terwujudnya Dokumen perencanaan dan Pelaporan keuangan Sekretariat Daerah

Untuk tahun 2020, Bagian Keuangan akan terus berupaya melakukan optimalisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini terutama berkaitan dengan penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan dan Pelaporan Keuangan sehingga pengelolaan keuangan di lingkup Sekretariat Daerah dapat berjalan dengan optimal.

10. Bagian Humas dan Pemberitaan

Program dan kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, antara lain:

1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 99,78%, sehingga tingkat realisasi adalah mencapai 100%. Adapun kegiatan yang telah tercapai targetnya antara lain:

a) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

- Pertemuan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) merupakan forum koordinasi dan kerjasama antar humas Lembaga Pemerintah, Lembaga Negara serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan fungsi humas di setiap OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Sasarannya agar terjalinnya komunikasi yang baik antara Bagian Humas dan Pemberitaan dengan humas-humas yang ada di setiap OPD.
- Pengisian informasi di web limapuluhkotakab.go.id khususnya Bagian Humas dan Pemberitaan agar informasi-informasi kegiatan pemerintah daerah dan informasi pembangunan bisa disampaikan ke masyarakat luar secara cepat.

2. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, dan tingkat realisasi nya juga 100%. Adapun kegiatan yang telah tercapai targetnya antara lain:

a) Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

- Bagian Humas dan Pemberitaan sebagai lembaga pengelola informasi di tingkat kabupaten menjembatannya melalui kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan media cetak/elektronik serta online yang beredar di Kabupaten Lima Puluh Kota. Kerjasama ini dalam bentuk kontrak kerjasama dalam satu tahun yang berisikan poin-poin kerjasama yang jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak. Bagian Humas

dan Pemberitaan hanya memfasilitasi media yang mau mengikuti aturan yang telah dijelaskan di dalam kontrak kerjasama tersebut. Kegiatan ini berjalan sesuai yang ditargetkan, yaitu 100%.

- Bagian Humas dan Pemberitaan melaksanakan kegiatan memberi informasi kegiatan dan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah melalui media cetak/elektronik dan online. Bagian Humas dan Pemberitaan setiap hari membuat pers rilis kegiatan Kepala Daerah serta kegiatan lain yang berhubungan dengan kebijakan daerah dan dikirimkan ke media cetak/elektronik dan online melalui wartawan yang bertugas di Lima Puluh Kota. Sehingga , setiap kegiatan serta kebijakan daerah dapat dilihat dan dibaca oleh masyarakat umum melalui media cetak/elektronik yang beredar di Lima Puluh Kota maupun media online yang bisa diakses oleh masyarakat dimana saja. Indikator kegiatan ini dapat tercapai 100 % karena adanya kerjasama yang baik antara Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota khususnya Bagian Humas dan Pemberitaan dengan wartawan media cetak/elektronik dan online.
- Kegiatan Jumpa Pers dimaksudkan untuk terpublikasinya informasi yang benar dan seimbang kepada masyarakat agar hilangnya asumsi-asumsi yang tidak benar atas pemberitaan dan penyelenggaraan pemerintah. Kegiatan ini menjadi sarana klarifikasi dan jumpa pers atas pemberitaan antara Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan wartawan sebagai awak media yang dapat meluruskan dan memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat, khususnya berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang telah dianggarkan. Kegiatan klarifikasi dan jumpa pers atas pemberitaan yang dilaksanakan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan kebijakan publik sehingga mengarah pada hasil yang diharapkan yaitu terciptanya

pelayanan informasi yang benar dan seimbang. Kegiatan ini dapat terlaksana 100%

- Pelaksanaan kegiatan peliputan kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di dalam maupun di luar Kabupaten Lima Puluh Kota dapat terlaksana secara maksimal yaitu 100%.

b) Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

- Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota melalui Bagian Humas dan Pemberitaan sebagai lembaga pengelola informasi di tingkat kabupaten menjembatannya melalui kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Agar penyebarluasan informasi ini dapat berjalan secara efektif, efisien serta menjangkau banyak wilayah, maka dilaksanakan melalui penerbitan media internal Kabupaten Lima Puluh Kota "Tabloid Sinamar" yang dikelola oleh Bagian Humas dan Pemberitaan.

Indikator kinerja ini dapat terlaksana sesuai dengan yang ditargetkan, yaitu 100%. Hal ini didukung oleh ketersediaan dana serta pengelolaan yang baik oleh Bagian Humas dan Pemberitaan.

- Pelaksanaan kegiatan peliputan kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di dalam maupun di luar Kabupaten Lima Puluh Kota dapat terlaksana secara maksimal yaitu 100%.

c) Kegiatan Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat

- Dokumentasi seluruh kegiatan Kepala Daerah di dalam maupun luar daerah dalam bentuk foto-foto kegiatan serta penghimpunan data informasi dari media cetak dalam bentuk kliping sehingga terwujudnya arsip daerah tentang pemberitaan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota di media cetak dalam bentuk buku kliping. Selain

- itu Bagian Humas dan Pemberitaan juga memakai aplikasi E-kliping untuk penyimpanan data kliping Koran berbasis elektronik. Tujuan dari kliping elektronik dapat membuat pekerjaan secara efektif dan efisien sehingga dapat membantu mengatasi permasalahan yang terjadi misalnya dalam melakukan pengklipingan jumlah informasi berita pada Bagian Humas dan Pemberitaan. Kegiatan ini dapat dicapai sesuai target yang ditetapkan, yaitu terlaksana 100%.
- Penyebarluasan informasi melalui spanduk / baliho penyampaian informasi yang dapat dicapai 100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan untuk membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja dari indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja yang dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis dan analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Untuk penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian sasaran

strategis dan keberhasilan / kegagalan capaian indikator kinerja, menggunakan kategori penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja yang disesuaikan dengan kriteria yang tercantum dalam Tabel T-E.1 (berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017) sebagai berikut:

Klasifikasi Penilaian Dan Kategori Penilaian Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategi Dan Capaian Indikator

NO	KLASIFIKASI PENILAIAN	PREDIKAT
1	91% – 100%	Sangat Tinggi
2	76% – 90%	Tinggi
3	66% - 75%	Sedang
4	51% - 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

(1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

(2) Hasil Sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

(3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Dalam rangka menjalankan fungsi sebagai administrator dan fasilitator yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel, Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota berupaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan cara melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai visi dan misi Sekretariat Daerah dalam rangka membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikannya dengan Dinas dan lembaga teknis Daerah.

Untuk mendukung visi dan misi dimaksud, diperlukan kinerja pelayanan yang terdiri dari :

1. Penyelenggaraan administrasi pertanahan, hukum dan HAM, pemerintahan umum, kesejahteraan rakyat, pembangunan, perekonomian, hubungan kemasyarakatan, organisasi dan Reformasi Birokrasi, serta umum
2. Penyelenggaraan koordinasi, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pada lingkup Sekretariat Daerah
3. Melakukan koordinasi dengan seluruh PD
4. Pelayanan Teknis Administratif Kepala Daerah dan seluruh PD di lingkup Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota

Dilihat dari kinerja pelayanan kinerja tersebut diatas dapat dijelaskan tentang pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah beserta pengembangan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang telah dilakukan, yang mencakup hal- hal positif yang berhasil ditingkatkan, masalah dan tantangan yang dihadapi terkait pelayanan dan kondisi/ prediksi pelayanan Perangkat Daerah yang diharapkan ke depan.

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan pada RPJMD Kab. Lima Puluh Kota, sesuai dengan Perda Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 terdapat IKU Daerah yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah/ Bagian Kesejahteraan Rakyat, yaitu “ Meningkatkan Aktifitas Masjid/Mushalla/surau/ MDA/ TPQ.

Berdasarkan hal tersebut, capaian IKU yang menjadi tugas pada Bagian Kesra terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel. T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Sekretariat Daerah

No	Sasaran	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah/ RPJMD						Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	Meningkatnya Aktifitas Masjid/ Musholla/ Surau/ MDA/ TPQ	Persentase Masjid/ Musholla/ Surau/ MDA/ TPQ yang dibantu Pemda melalui hibah	7.27%	7.42%	7.55%	7.70%	7.85%	7.90%	7.27%	7.42%	6.82%	6.59%	7.85%	7.90%	Capaian realisasi sangat tergantung pada ketersediaan anggaran Hibah

Pada tahun 2019 target Masjid/ Mushalla yang akan diberi bantuan sebanyak 73 unit dari 1334 unit atau sekitar 7,70 % dari jumlah Masjid/ Mushalla yang tersebar di Kabupaten Lima Puluh Kota.



(Gambar 3. Foto Dokumentasi Penyerahan Bantuan hibah untuk masjid di Nagari Andaleh Kec. Luak pada acara Safari Ramadhan)

Secara rinci Masjid yang dibantu berjumlah sebanyak 73 Masjid, dimana bantuan ini diserahkan bersamaan dengan momen safari ramadhan sebanyak 68 Masjid dan diluar kegiatan safari ramadhan sebanyak 5 Masjid. Sedangkan jumlah Mushalla yang dibantu sebanyak 15 Mushalla, 8 Mushalla pada saat safari

ramadhan dan 7 mushalla diluar kegiatan safari ramadhan. Adapun jumlah anggaran yang terealisasi untuk bantuan hibah Masjid/ Mushalla mencapai Rp.1.158.000.000,-

Realisasi yang masih kurang dari target ini disebabkan karena anggaran yang dialokasikan pada Belanja Tidak Langsung belum mencukupi sesuai target. Oleh karena itu untuk tahun berikutnya, agar realisasi sesuai dengan target maka perlu penambahan anggaran hibah untuk Masjid/ Mushalla tersebut.

Sekretariat Daerah yang merupakan OPD yang mempunyai fungsi Koordinasi dan fasilitasi, pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format Tabel sebagai berikut:

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PREDIK AT
1.	Meningkatnya fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Hukum	Nilai EKPPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tingkat Provinsi Sumatera Barat Puluh Kota.	Nilai EKPPD 3,150	*		-
		Jumlah Produk Hukum yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	10 Perda 20 Perbup 20 Pernag	10 Perda 20 Perbup 20 Pernag	100	Sangat tinggi
		Nilai komponen Pelaporan Akuntabilitas Kinerja	67	66,57	99,35	Sangat tinggi
2.	Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian, Pembangunan, Kesra dan Kerjasama	Jumlah UMKM dan Koperasi yang menggunakan dana bergulir	20 UMKM dan koperasi	20 UMKM dan koperasi	100	Sangat tinggi
		Persentase lancarnya pengadaan barang dan jasa di Kabupaten	90%	94,81%	118%	Sangat tinggi

		Lima Puluh Kota yang sesuai dengan aturan perundang-undangan				
		Persentase Masjid/Mushalla/MDA/TPQ yang dibantu melalui dana hibah	7,70	6,59	85,54	Tinggi
		Persentase peningkatan kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti	75%	93,75%	125%	Sangat tinggi
3.	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Umum yang efektif dan efisien	Persentase kegiatan Pemerintah Daerah yang terpublikasikan	100%	100%	100%	Sangat tinggi
		Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan Sekretariat Daerah yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Sangat Tinggi
		Persentase sarana dan prasarana KDH/WKDH dalam kondisi baik	90%	97%	108%	Sangat tinggi

Pada umumnya Kinerja Pelayanan pada Sekretariat Daerah yang terkait dengan capaian kinerja pelayanan berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat terlaksana dengan capaian rata-rata diatas 90%, Secara rinci pada masing-masing Bagian dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bagian PUM

Analisis kinerja pelayanan bagian Pemerintahan Umum berdasarkan hasil capaian kinerja dapat dilakukan evaluasi terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran berikut indikatornya sebagai berikut :

1. Terlaksananya Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah se-Kabupaten Lima Puluh Kota. Indikator sasaran ini adalah Terlaksananya Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah. Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah yang telah dilaksanakan dengan baik.

2. Terlaksananya Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya. Indikator sasaran ini adalah Terlaksananya Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya. Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya yang telah dilaksanakan dengan baik.
3. Terbinanya hubungan baik antara antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan melalui komunikasi yang efektif. Indikator sasaran ini adalah Terlaksananya Dialog/Audiensi dengan Tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan masyarakat. Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan kegiatan Dialog/Audiensi dengan Tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan masyarakat.
4. Terlaksananya pendataan pembakuan nama rupa bumi. Indikator sasaran ini adalah Terlaksananya pendataan pembakuan nama rupa bumi. Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan kegiatan Penamaan Rupa Bumi yang telah dilaksanakan dengan baik.
5. Terlaksananya evaluasi kinerja pemerintah daerah. Indikator sasaran ini adalah Terlaksananya Evaluasi kinerja pemerintah daerah. Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan kegiatan Evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang telah dilaksanakan dengan baik.
6. Terlaksananya peningkatan pembangunan daerah. Indikator sasaran ini adalah Terlaksananya peningkatan pembangunan daerah. Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan kegiatan Pengendalian Manajemen pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah yang telah dilaksanakan dengan baik.
7. Terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Indikator sasaran ini adalah Terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan kegiatan

pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS yang telah dilaksanakan dengan baik.

8. Terlaksananya pendidikan dan pelatihan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) bagi aparatur Kecamatan. Indikator sasaran ini adalah pendidikan dan pelatihan PATEN. Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan kegiatan Pendidikan dan pelatihan PATEN bagi aparatur kecamatan yang telah dilaksanakan dengan baik.
9. Terlaksananya pemanfaatan teknologi informasi dalam mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan. Indikator sasaran ini adalah Terlaksananya PATEN di Kecamatan sesuai Permendagri no 4 tahun 2010. Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan kegiatan penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik yang telah dilaksanakan dengan baik.
10. Terlaksananya evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan kepala daerah pada aparatur Kecamatan. Indikator sasaran ini adalah Terlaksananya pemilihan camat berprestasi tingkat kabupaten Lima Puluh Kota. Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan kegiatan pemberian penghargaan bagi camat berprestasi yang telah dilaksanakan dengan baik.

2. Bagian Hukum

Bab ini berisikan kajian tentang capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Bila diisuesuaikan dengan tugas dan fungsi Bagian Hukum dan peraturan perundang-undangan diatas maka indikator kinerja pelayanan tersebut tidak ada yang terkait dengan tugas dan fungsi Bagian Hukum.

3. Bagian Organisasi

Pada bagian ini berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan bagian Organisasi berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 dan terhadap IKU Kabupaten .

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah merupakan unit kerja yang melaksanakan pelayanan yang lebih banyak berhubungan dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) dibandingkan dengan berhubungan langsung dengan masyarakat, sehingga lebih banyak yang merasakan pelayanan dari Bagian Organisasi adalah Aparatur Sipil Negara (ASN).

4. Bagian Kerjasama

Adapun analisis kinerja pelayanan bagian Kerjasama berdasarkan hasil capaian kinerja dapat dilakukan evaluasi terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran berikut indikatornya sebagai berikut :

1. Terlaksananya Kesepakatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah untuk meningkatkan sektor ekonomi, sosial dan budaya
2. Terlaksananya kesepakatan kerjasama antar lembaga pemerintah baik pemerintah pusat, propinsi maupun daerah
3. Terlaksananya Kesepakatan Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga untuk meningkatkan sektor ekonomi, sosial dan budaya
4. Mewujudkan kerjasama sister city dengan negara negara yang memiliki kesamaan karakteristik, namun belum terlaksana karena belum adanya anggaran yang tersedia hingga saat ini.
5. Terlaksananya penguatan kelembagaan kecamatan dan nagari dalam pendataan perantau minang yang hingga saat ini (tahun 2018) belum maksimal karena keterbatasan dana.

6. Terlaksananya pembentukan nagari binaan kerjasama rantau yang hingga saat ini baru terbentuk 1 (satu) nagari pilot project binaan kerjasama rantau dengan 4 (empat) nagari binaan Berjasama Kabupaten Lima Puluh Kota.
7. Terlaksananya pertemuan jaringan komunikasi Pemerintah Kabupaten dengan Perantau Minang, dimana untuk Tahun sebelumnya hingga tahun berjalan saat ini (2018) baru dapat mengikuti pertemuan dengan perantau yang sedang mengadakan acara HUT organisasi Perantau.
8. Sedangkan untuk kegiatan Rakor dengan Perantau yang diadakan di 4 (empat) lokasi lainnya yaitu Manado, Aceh, Batam dan Jakarta tidak dapat kita ikuti karena keterbatasan Anggaran.
9. Terlaksanakannya fungsi pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan APBD baik melalui rapat-rapat, laporan, kunjungan apangan ataupun bentuk lainnya.

5. Bagian Administrasi Pembangunan

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Bagian Pengadaan Barang/Jasa ini memiliki tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam menyelenggarakan dukungan Pengadaan Barang/Jasa dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, dan koordinasi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyediaan layanan pengadaan barang/jasa, pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa serta pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan/bimbingan teknis pengadaan barang/jasa.

Untuk melaksanakan tugas ini maka Bagian Pengadaan Barang/Jasa menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Pengelolaan pengadaan barang/jasa

- Pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa
- Pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa
- Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya

Dengan memperhatikan pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2019 (lanjutan dari program/kegiatan yang sebelumnya dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pembangunan), dapat diketahui kalau kinerja pelayanan Bagian Pengadaan Barang/Jasa ini hampir mendekati apa yang diharapkan sesuai dengan tujuan pembentukannya. Sebagaimana dituangkan dalam renstra, indikator sasaran Bagian Pengadaan Barang/Jasa adalah ***lancarnya pengadaan barang/jasa di Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan aturan perundang-undangan***. Sedangkan untuk mendukung pencapaian ini, maka Bagian Pengadaan Barang/Jasa telah melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- Melaksanakan pemilihan penyedia melalui tender sebanyak 83 paket oleh pokja di Bagian PBJ. Disamping itu juga telah terlaksana proses pengadaan langsung atas permintaan OPD sebanyak 200 paket.
- Melaksanakan pembinaan SDM di Bagian PBJ melalui bimtek-bimtek dan proses inpassing SDM untuk menjadi jabatan fungsional PBJ.
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan pada perangkat daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Melaksanakan pendampingan pengadaan barang/jasa di OPD OPD karena Bagian Pengadaan Barang/Jasa telah menjadi tempat konsultasi bagi OPD dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa.

6. Bagian Perekonomian

berisikan kajian tentang capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Bila disesuaikan dengan tugas dan fungsi Bagian Perekonomian dan peraturan perundang-undangan diatas maka indikator kinerja pelayanan tersebut tidak ada yang terkait dengan tugas dan fungsi Bagian Perekonomian

7. Bagian Kesra

Pada bagian Kesra, capaian IKU yang menjadi tugas pada Bagian Kesra terlihat pada tabel di bawah ini :

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian %
1.	Meningkatnya Aktifitas Masjid/ Musholla/ Surau/ MDA/ TPQ	Persentase Masjid/ Musholla/ Surau/ MDA/ TPQ yang dibantu Pemda melalui hibah	-	7,70 %	6,59 %	85,54%

Secara rinci Masjid yang dibantu berjumlah sebanyak 73 Masjid, dimana bantuan ini diserahkan bersamaan dengan momen safari ramadhan sebanyak 68 Masjid dan diluar kegiatan safari ramadhan sebanyak 5 Masjid. Sedangkan jumlah Mushalla yang dibantu sebanyak 15 Mushalla, 8 Mushalla pada saat safari ramadhan dan 7 mushalla diluar kegiatan safari ramadhan. Adapun jumlah anggaran yang terealisasi untuk bantuan hibah Masjid/ Mushalla mencapai Rp.1.158.000.000,-

Realisasi yang masih kurang dari target ini disebabkan karena anggaran yang dialokasikan pada Belanja Tidak Langsung belum mencukupi sesuai target. Oleh karena itu untuk tahun berikutnya, agar realisasi sesuai

dengan target maka perlu penambahan anggaran hibah untuk Masjid/ Mushalla tersebut

8. Bagian Umum

Bagian Umum dan Perlengkapan merupakan bagian dengan tugas menyelenggarakan pengadaan, administrasi umum, tata usaha, kepegawaian, perjalanan dinas, keprotokolan, perlengkapan serta penyelenggaraan rumah tangga lingkup Sekretariat Daerah dan rumah tangga Bupati / Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah serta pelaksanaan sebagian urusan pemerintah, sub-sub bidang fasilitasi dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan kerjasama yang menjadi kewenangan daerah. Untuk melaksanakan tugas ini, Bagian Umum dan Perlengkapan memiliki fungsi sebagai berikut:

- Pelaksanaan pelayanan umum skala kabupaten;
- Pelaksanaan tata usaha pimpinan;
- Pelaksanaan urusan perjalanan dinas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah;
- Pelaksanaan urusan kepegawaian Sekretariat Daerah;
- Pelaksanaan urusan rumah tangga Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Sekretariat Daerah;
- Pelaksanaan pemeliharaan peralatan dan pengadaan perlengkapan peralatan bagi kebutuhan gedung kantor, rumah dinas Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah serta Sekretariat Daerah;
- Pelaksanaan pelayanan tamu Daerah;
- Pelaksanaan pelayanan keprotokoleran;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan

Dengan memperhatikan pelaksanaan program / kegiatan yang dilaksanakan selama beberapa tahun terakhir, khususnya pada tahun 2017, dapat diketahui kalau kinerja pelayanan Umum dan Perlengkapan ini hampir mendekati apa yang diharapkan pada awal perencanaan sesuai dengan fungsinya. Hal ini terlihat pada :

- Terlaksananya administrasi umum dengan baik dan lancar;

- Tersedianya sarana dan prasarana di lingkungan rumah dinas Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah dan Sekretariat Daerah;
- Tersedianya perlengkapan dan peralatan penunjang di lingkungan Sekretariat Daerah;
- Terlaksananya urusan kepegawaian di Sekretariat Daerah dengan baik dan lancar;
- Terlaksananya layanan keprotokolan terhadap kegiatan KDH / WKDH maupun tamu-tamu yang datang;
- Tersedianya mobilitas yang representatif untuk pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah;
- Terselenggaranya berbagai even-even berskala Lokal maupun Nasional yang tidak terlepas dari peranan Bagian Umum dan Perlengkapan dalam penyediaan sarana dan prasarana;
- Terselenggaranya berbagai kegiatan Bupati / Wakil Bupati dalam kunjungan kemasyarakatan;
- Tersedianya mobiler dan perlengkapan Bupati / Wakil Bupati / Sekretaris Daerah baik di kantor maupun di rumah dinas.

9. Bagian Keuangan

Bagian Keuangan merupakan bagian dengan tugas menyelenggarakan penatausahaan Keuangan didalam lingkup Sekretariat Daerah. Untuk melaksanakan tugas ini, bagian Keuangan memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyusunan rencana anggaran Sekretariat Daerah;
2. Pelaksanaan penatausahaan keuangan Daerah ;
3. Pelaksanaan penyusunan Laporan keuangan Sekretariat Daerah.

Dengan memperhatikan pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2018, dapat diketahui kalau kinerja pelayanan Keuangan ini hampir mendekati apa yang diharapkan pada awal perencanaan sesuai dengan fungsinya. Hal ini terlihat pada:

1. Terlaksananya jasa administrasi keuangan dengan tertib dan lancar
2. Terwujudnya laporan keuangan semesteran dan laporan prognosis.

3. Terwujudnya Laporan akhir Sekretariat Daerah yang dapat dipertanggung jawabkan.

10. Bagian Humas dan Pemberitaan

Pelayanan Informasi merupakan bentuk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pengguna informasi. Tim pelayanan informasi memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna informasi sesuai dengan keyakinan profesi dan standar yang ditetapkan. Hal ini ditujukan agar pelayanan informasi yang diberikan senantiasa merupakan pelayanan yang memiliki nilai *security* serta dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Bentuk kinerja yang dilaksanakan selama ini adalah sebagai berikut :

- Melakukan kerja sama pemberitaan dan penyiaran dengan media cetak dan elektronik lokal tentang program maupun kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Melakukan pengiriman dan penerimaan informasi tentang kegiatan baik yang diprogramkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat maupun oleh Pemerintah Pusat.
- Meliput kegiatan kepala daerah ke lapangan dan membuat pers rilis nya untuk disebarluaskan kepada wartawan yang bertugas di Lima Puluh Kota.

- Melaksanakan pelayanan keprotokolan kepala daerah di setiap acara/kegiatan yang dihadiri oleh Bupati/Wakil Bupati
- Melakukan inventarisasi kegiatan PD melalui pertemuan Bakohumas serta Pertemuan PPID Lima Puluh Kota.

Adanya target yang tidak tercapai secara maksimal bukan berarti ini menandakan adanya gap atau kesenjangan yang begitu besar. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target tersebut adalah kurang antusiasnya PD dalam mengikuti kegiatan Pertemuan Bakohumas dan PPID dan anggaran yang kurang mendukung, minimnya tenaga liputan di lapangan serta kurangnya peralatan dokumentasi berupa kamera video dan kamera foto digital sehingga tidak dapat mendokumentasikan semua kegiatan sekaligus pada waktu yang sama. Hal ini mempengaruhi jumlah liputan kegiatan dan press realise untuk mas media yang ditargetkan setiap hari.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah, Kajian hasil evaluasi pelaksanaan Perangkat Daerah, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra dan Renja Perangkat Daerah, maka dapat dirumuskan isu- isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Masing-masing bagian di lingkup Sekretariat Daerah memiliki beberapa isu yang terkait dengan penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsinya, antara lain

1. Bagian PUM

Bagian Tata Pemerintahan Umum (TAPUM) dalam pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab yang diimplementasikan ke dalam tugas dan fungsi lembaga berupaya mewujudkan dan menjalankan visi dan misi daerah sebagai komitmen bersama. Upaya yang dilakukan merupakan tindakan preventif dan antisipatif sebagai langkah pengendalian terhadap berbagai permasalahan dibidang Pemerintahan secara Umum yang perlu dilakukan pembenahan dan pengaturan melalui regulasi dan kebijakan yang konkrit.

Inventarisasi permasalahan maupun Isu–isu teraktual pada penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkembang dari tahun sebelumnya dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk menentukan langkah-langkah nyata yang dijadikan filosofis penetapan program dan kegiatan.

Selanjutnya selain dari Isu–Isu tersebut diatas, dalam memformulasi suatu Rencana Kerja (RENJA), Bagian Tata Pemerintahan Umum (TAPUM) juga melihat dan didasarkan dari permasalahan yang terjadi terkait pada bidang Pemerintahan sebagai berikut :

1. Peningkatan Harmonisasi hubungan antar Satuan Perangkat Daerah (PD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima puluh Kota.
2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di seluruh Kecamatan se Kabupaten Lima Puluh Kota
3. Peningkatan Harmonisasi hubungan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya.

Permasalahan yang dihadapi terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Tata Pemerintahan Umum (TAPUM) ditahun 2019 dan juga berdasarkan kondisi beberapa tahun sebelumnya, dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Perkembangan globalisasi dan tuntutan peraturan perundang-undangan dirasakan masih belum terdukung dengan kompetensi dan cakrawala berfikir serta wawasan aparatur. Masih banyaknya aparatur yang tidak mampu mengembangkan bidang tugas dan tanggung jawab yang diberikan, dikarenakan kurangnya penguasaan pengetahuan, pengalaman kerja dan keterampilan teknis;
2. Adanya tahapan–tahapan dalam rangkaian kegiatan yang belum terpenuhi sehingga menyebabkan pelaksanaan kegiatan belum dapat berjalan, seperti pengadaan tanah dalam pengembangan Ibu Kota Sarilamak dikarenakan ketentuan yang mengatur Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) masih berbentuk Ranperda;

3. Tuntutan peningkatan kinerja dan kualitas kerja aparatur Bagian TAPUM belum mampu diwujudkan secara optimal dikarenakan masih dirasakan minimnya dukungan sarana dan prasarana kerja yang *representative* untuk mewujudkan percepatan pelaksanaan tugas;
4. Anggaran pelaksanaan kegiatan yang belum memadai, sehingga pada beberapa kegiatan terjadi kendala–kendala dilapangan yang dapat menyebabkan pelaksanaan kegiatan menjadi berjalan lamban dan tidak memenuhi target;
5. Masih dirasakan lemahnya koordinasi antar instansi pemerintah daerah yang cenderung mengedepankan ego sektoral dan mementingkan kepentingan instansi masing–masing;
6. Perubahan SOTK dan TUPOKSI pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, sehingga menyebabkan adanya tugas pokok dan fungsi yang ditambahkan dan menjadi kewenangan pada Tata Pemerintahan Umum (TAPUM).

2. Bagian Hukum

Bagian Hukum memiliki beberapa isu yang terkait dengan penyelenggaraan Tupoksi Bagian Hukum, antara lain :

1. Masih rendahnya pemahaman aparatur dalam implementasi peraturan perundang-undangan tingkat daerah.
2. Masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan, sehingga pelanggaran-pelanggaran hukum dikalangan generasi muda cenderung meningkat.

3. Bagian Organisasi

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki beberapa isu yang terkait dengan penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

a. Reformasi Birokrasi

Dalam rangka mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dipandang perlu melakukan Reformasi Birokrasi di Pemerintahan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. Untuk melaksanakan hal dimaksud Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota telah memulai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan menyusun Road Map Reformasi Birokrasi. Road Map Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi dari Grand Design Reformasi Birokrasi yang disusun oleh MENPAN-RB yang ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan membuat rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dengan berbagai tahapan selama lima tahun dengan sasaran yang jelas.

Untuk periode 2016 - 2021 Bagian Organisasi sedang menyusun kembali Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang Road map reformasi Birokrasi tersebut. Adanya Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan.

b. Analisa Jabatan

Dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi dan mengoptimalkan kinerja PNS serta efisiensi anggaran belanja pegawai yang telah ada, maka perlu dilakukan penataan organisasi dan penataan PNS. Hal tersebut sesuai dengan kebijakan pemerintah dengan pemberlakuan Peraturan Bersama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan Nomor 02/SPB/M.PAN-RB/8/2011 tentang Penundaan Sementara Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil.

Sehubungan dengan itu, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, khususnya Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota diwajibkan menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan.

c. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan pemerintah Tentang Standar Pelayanan Minimal, maka Pemerintah Daerah wajib menerapkan SPM pada 6 Bidang Pelayanan Dasar, yaitu Pendidikan, Kesehatan, Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman, PUPR, Trantibum Linmas dan Sosial, sehingga semua peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan SPM wajib untuk disesuaikan.

Pemerintah menyusun dan menetapkan SPM untuk menjamin hak konstitusional setiap warga dalam memperoleh akses dan kualitas pelayanan dasar dalam mendukung terwujudnya kesejahteraan rakyat yang merupakan tujuan utama dari pelaksanaan desentralisasi di Indonesia.

SPM yang telah ditetapkan tersebut selanjutnya akan menjadi acuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggung jawaban di daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib. Pada tahun 2014, Pemerintah Daerah diharapkan telah mampu untuk menerapkan SPM ini pada unit kerjanya masing-masing.

4. Bagian Kerjasama dan Administrasi Pembangunan

Inventarisasi permasalahan maupun Isu–isu teraktual pada penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkembang dijadikan sebagai bahan untuk menentukan langkah-langkah nyata yang dijadikan filosofis penetapan program dan kegiatan. Selanjutnya selain dari Isu–Isu tersebut diatas, dalam memformulasi suatu Rencana Kerja (RENJA) Bagian Kerjasama dan Administrasi Pembangunan, juga melihat dan didasarkan dari permasalahan yang terjadi terkait pada bidang Kerjasama sebagai berikut :

1. Inventarisasi kebutuhan kerjasama daerah yang sudah teranggarkan pada APBD Kabupaten.
2. Implementasi Kesepakatan Bersama (MoU) antar daerah dan pihak ketiga dalam bentuk perjanjian kerjasama.
3. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan mulai dari tahap penawaran MoU sampai implementasi MoU berupa Perjanjian Kerjasama.
4. Pengembangan potensi ranah yang perlu dikoordinasikan dengan perantau
5. Pembentukan jaringan komunikasi rantau yang didasarkan pada data perantau baik data dari nagari maupun dari perantau yang telah terorganisir.

Permasalahan yang dihadapi terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Kerjasama dan Administrasi Pembangunan ditahun 2019 dan juga berdasarkan kondisi tahun sebelumnya dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya pelaksanaan kerjasama antar daerah dan Non Departemen yang telah dan sedang berjalan.
- b. Kurang tersosialisasinya pemahaman terhadap Kerjasama Daerah terhadap OPD yang ada yang mengakibatkan perbedaan persepsi tentang Kerjasama Daerah .
- c. Adanya perbedaan aturan yang mengatur tentang kerjasama dari beberapa kementerian dengan kerjasama yang bersifat teknis yang mengakibatkan lambatnya/belum dapat mewujudkan kerjasama yang akan dibangun.
- d. Tuntutan peningkatan kinerja dan kualitas kerja aparatur Bagian Kerjasama belum mampu diwujudkan secara optimal dikarenakan masih dirasakan minimnya dukungan sarana dan prasarana kerja yang *representative* untuk mewujudkan percepatan pelaksanaan tugas;

- e. Anggaran pelaksanaan kegiatan yang belum memadai, sehingga pada beberapa kegiatan terjadi kendala-kendala dilapangan yang dapat menyebabkan pelaksanaan kegiatan menjadi berjalan lamban dan tidak memenuhi target;
- f. Masih dirasakan lemahnya koordinasi antar instansi pemerintah daerah yang cenderung mengedepankan ego sektoral dan mementingkan kepentingan instansi masing-masing;

5. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Secara umum tugas dan fungsi bagian pengadaan barang/jasa sudah dilaksanakan secara optimal. Hal ini terlihat pada:

- Adanya pelatihan-pelatihan peningkatan kompetensi yang dilaksanakan bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ataupun PPHP yang dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya.
- Terlaksananya proses tender paket-paket pengadaan dari OPD di UKPBJ sesuai dengan perencanaan.
- Terlaksananya pendampingan terhadap pelaksanaan paket pengadaan barang/jasa di OPD, baik melalui pemantauan lapangan maupun dari OPD yang datang untuk berkonsultasi.

Walaupun demikian dalam kenyataannya masih ada beberapa permasalahan yang menghambat proses pencapaian tujuan dan sasaran yang diinginkan. Beberapa permasalahan tersebut adalah:

- Personil yang mengikuti pelatihan bukanlah personil yang terlibat secara aktif dalam pengadaan barang/jasa
- Adanya keterbatasan anggaran yang dialokasikan sehingga jumlah bimtek dan personil bimtek yang dapat dilaksanakan terbatas jumlahnya.
- Kurangnya keinginan OPD untuk berkonsultasi ke Bagian Pengadaan Barang/Jasa

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas akan mengganggu pencapaian hal yang telah ditetapkan di dalam RPJMD sehingga perlu disikapi secara cermat. Walaupun ada beberapa permasalahan yang dihadapi, peluang bagi Bagian Pengadaan Barang/Jasa untuk meningkatkan kinerja masih terbuka lebar. Hal ini disebabkan oleh karena instansi pemerintahan pastilah tidak bisa lepas dari

pengadaan barang/jasa sedangkan semua bentuk pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintahan di arahkan untuk dilaksanakan secara elektronik.

6. Bagian Perekonomian

Pada bab ini dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi, badan, dinas terkait belum terlaksana dengan baik dalam pemenuhan ketersediaan data ekonomi yang dapat dijadikan sumber referensi komoditi yang dihasilkan masyarakat maupun komoditi kekayaan alam.
- b. Belum optimalnya penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam pembinaan dan bimbingan teknis terhadap pengurus PKP-RI.
- c. Belum optimalnya penyediaan data, informasi dan laporan mengenai UMK dan koperasi dalam menyusun dan mengumpulkan kegiatan UMK dan koperasi mana yang aktif dan non aktif untuk memacu perkembangan usaha kelompok.
- d. Pelaksanaan koordinasi dalam penyelenggaraan perekonomian yang belum terlaksana sesuai dengan harapan dikarenakan anggaran yang kurang mencukupi.
- e. Penyelenggaraan evaluasi, fasilitasi dan koordinasi dalam upaya-upaya pengendalian harga kebutuhan pokok dipasaran masih belum terlaksana sesuai dengan target kinerja yang direncanakan karena keadaan alam yang berubah tak menentu yang menyebabkan dampak terhadap pertanian dan harga barang.
- f. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengawasan terhadap pupuk/ pestisida bersubsidi dari produsen s/d kelompok tani.
- g. Masih ditemukannya peredaran produk rokok dipasaran tanpa dilekati pita cukai/ilegal.

- h. Belum tercapai secara optimal mengenai penyelenggaraan fasilitasi, koordinasi dan evaluasi fungsi pengawasan pemerintah daerah terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta memfasilitasi penyelenggaraan rapat umum pemegang saham Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- i. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2019.

Kinerja pelayanan Bagian Perekonomian pada tahun 2019 belum optimal. Hal ini dikarenakan adanya keterlambatan dalam pencairan dana :

1. *Klinik Pengaduan*

Perlu adanya klinik pengaduan di Bagian Perekonomian masih harus dilakukan perbaikan dan penyempurnaan agar memperoleh hasil capaian seperti yang ditargetkan seperti yang dituangkan dalam agenda kegiatan. sehingga Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dapat meningkatkan kualitas penyelesaian masalah perekonomian.

- 2. Pelaksanaan Rapat Bagian Perekonomian. Rapat ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan perencanaan maupun pengendalian terhadap stakeholder yang ada.
- 3. Memanfaatkan media sosial untuk kelancaran komunikasi dengan OPD seperti melalui Whatsapp group.

Namun demikian, upaya-upaya sebagaimana dimaksud diatas bukan berarti tanpa kelemahan, antara lain:

- 1. Belum adanya klinik pengaduan dalam rangka menampung permasalahan yang berkaitan dengan perekonomian.
- 2. Belum meratanya kualitas SDM yang ada pada Bagian Perekonomian dalam melaksanakan tugas koordinasi dengan instansi terkait.
- 3. Masih rendahnya koordinasi yang dilakukan dalam pengumpulan data yang valid dan akurat sesuai kebutuhan organisasi.

4. Hambatan lokasi yang jauh jaraknya dan lemahnya jaringan internet sehingga menyebabkan keterlambatan informasi yang diperlukan.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Bagian Perekonomian untuk meningkatkan kualitas penyusunan perencanaan pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Kurangnya data yang akurat dalam pemberian informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat mengenai harga komoditi yang beredar.
2. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengawasan terhadap pupuk/ pestisida bersubsidi dari produsen s/d kelompok tani.
Masih ditemukannya
3. Belum optimalnya penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam pembinaan dan bimbingan teknis terhadap pengurus PKP-RI.
4. Belum optimalnya penyediaan data, informasi dan laporan mengenai UKM dan koperasi dalam menyusun dan mengumpulkan kegiatan UMK dan koperasi mana yang aktif dan non aktif untuk memacu perkembangan usaha kelompok.
5. Pelaksanaan koordinasi dalam penyelenggaraan perekonomian yang belum terlaksana sesuai dengan harapan dikarenakan anggaran yang kurang mencukupi.
6. Penyelenggaraan evaluasi, fasilitasi dan koordinasi dalam upaya-upaya pengendalian harga kebutuhan pokok dipasaran masih belum terlaksana sesuai dengan target kinerja yang direncanakan karena keadaan alam yang berubah tak menentu yang menyebabkan dampak terhadap pertanian dan harga barang.
7. Belum optimalnya pengawasan peredaran produk rokok dipasaran tanpa dilekati pita cukai/ilegal.
8. Belum tercapai secara optimal mengenai penyelenggaraan fasilitasi, koordinasi dan evaluasi fungsi pengawasan pemerintah daerah terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta memfasilitasi penyelenggaraan rapat umum pemegang saham Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Melihat pada permasalahan di atas, dalam rangka meningkatkan kinerja Bagian Perekonomian dimasa mendatang, tantangan yang Hambatan dan persoalan diatas tentu saja berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah tahun 2016-2021. Bagian Perekonomian merupakan bagian dari pendukung terhadap pencapaian misi ke 2 (dua) yaitu Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian dan reformasi kelembagaan berbasis masyarakat dengan pemanfaatan potensi daerah. Tantangan yang dihadapi Bagian Perekonomian dalam beberapa tahun mendatang adalah:

- Koordinasi dengan UKM dan Koperasi perlu adanya wadah untuk menampung aspirasi/langkah-langkah yang perlu diambil dalam pemenuhan kesejahteraan masyarakat kecil
- Semakin strategisnya peran tahapan perencanaan sebagai konsekuensi tuntutan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- Perubahan kebijakan perencanaan dari money follow function menjadi money follow program;
- Meningkatkan tuntutan masyarakat untuk perbaikan proses perencanaan dan implementasinya.

Sedangkan peluang bagi Bagian Perekonomian dalam melaksanakan tugasannya adalah:

- Pemanfaatan teknologi informasi untuk perbaikan system layanan dan peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi;
- Terbitnya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai pedoman untuk meningkatkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan daerah;

- Memperluas jejaring dalam rangka penyediaan data dan informasi yang handal.

Bagian Perekonomian Kabupaten Lima Puluh Kota adalah bagian yang melakukan koordinasi dengan instansi/dinas teknis yang berhubungan dengan laju perekonomian yang ada. Untuk kedepan pengembangan terus dilakukan dengan sumber daya yang ada serta mampu menyediakan informasi dalam rangka pembangunan dalam bidang perekonomian sesuai dengan perundangan yang berlaku, kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Isu – isu strategis yang tengah dihadapi oleh Bagian Perekonomian saat ini dapat diuraikan sebagai berikut :

- Dinamisasi regulasi dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
- Kuantitas dan Kapasitas SDM Bagian Perekonomian yang masih perlu ditingkatkan;
- Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi;
- Masih belum maksimalnya prosedur standar operasional perencanaan untuk menganalisa kelayakan kegiatan;
- Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat OPD yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan sehingga berdampak pada kualitas produk rencana pembangunan tahunan;
- Belum terakomodirnya secara maksimal usulan-usulan yang bersifat bottom up.

7. Bagian Kesra

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bagian Kesra dirumuskan sebagai berikut :

1. Dilihat dari Visi Kab. Lima Puluh Kota yang “Islami” maka seharusnya program dan kegiatan yang dilaksanakan harus mencerminkan nuansa

islami, dengan demikian diharapkan tidak ada kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ajaran Islam.

2. Sejalan dengan IKU untuk meningkatkan aktifitas Masjid/ Musholla/ Surau/ MDA/ TPQ dengan indikatornya yaitu persentase Masjid/ Musholla/ Surau/ MDA/ TPQ yang dibantu Pemda melalui hibah, maka sudah seharusnya Pemerintah Daerah meningkatkan ketersediaan anggaran hibah untuk Masjid/ Musholla/ Surau/ MDA/ TPQ pada tahun 2021 agar IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai.
3. Kegiatan Baliak Basurau untuk lebih dipotimalkan dengan melibatkan seluruh stakeholders.
4. Perlu dilakukan standarisasi kurikulum untuk TPQ, MDTA dan Surau dalam bentuk silabus yang dikeluarkan oleh Kabupaten, sehingga program dan kegiatan Baliak Basurau dapat berjalan Optimal.
5. Diperlukan koordinasi yang lebih intensif dengan seluruh lembaga-lembaga keagamaan di Kab. Lima Puluh Kota, agar pelaksanaan kegiatan keagamaan dapat berjalan sebagaimana mestinya.
6. Berhubung saat ini anggaran Nagari yang relatif besar, maka diharapkan pada seluruh nagari di Kab. Lima Puluh Kota dapat mengalokasikan dana untuk kegiatan MUNA (Majelis Ulama Nagari).
7. Sudah selayaknya Pemerintah Kab. Lima Puluh Kota mempunyai **Islamic Centre** sebagai salah satu wadah untuk lembaga-lembaga keagamaan dalam rangka pencapaian visi dan misi Daerah.

8. Bagian Umum

Mengutamakan pelayanan prima dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi baik secara institusional oleh masing-masing pejabat struktural pada Bagian Umum dan Perlengkapan maupun secara personal oleh staf birokrasinya. Peningkatan disiplin kerja, tertib dalam hal pengelolaan administrasi dan pelayanan KHD / WKDH merupakan kewajiban yang telah menjadi bagian dari upaya perbaikan penyelenggaraan birokrasi tersebut.

Oleh karena itu Bagian Umum dan Perlengkapan senantiasa melakukan koordinasi, konsultasi, konfirmasi serta membangun jejaring internal dan eksternal demi terselenggaranya pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan yang efektif dan efisien yang tentunya tak lepas dari isu-isu penting penyelenggaraan tugas Bagian Umum dan Perlengkapan.

9. Bagian Keuangan

Peningkatan disiplin kerja, tertib dalam hal pengelolaan administrasi dan keuangan merupakan kewajiban yang telah menjadi bagian dari upaya perbaikan penyelenggaraan birokrasi tersebut. Oleh karena itu Bagian Keuangan senantiasa melakukan koordinasi, konsultasi, konfirmasi serta membangun jejaring internal dan eksternal demi terselenggaranya pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang efektif dan efisien yang tentunya tak lepas dari isu-isu penting penyelenggaraan tugas Bagian Keuangan seperti terselenggaranya administrasi dan penatausahaan keuangan di lingkup Sekretariat Daerah sehingga pengelolaan keuangan Daerah dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

10. Bagian Humas

Kinerja pelayanan Bagian Humas dan Protokoler pada tahun 2019 sudah cukup optimal. Hal ini terbukti dari dilakukannya beberapa upaya antara lain:

1. Pelaksanaan Peliputan Kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di dalam maupun diluar daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pelaksanaan keprotokoleran kegiatan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah maupun kegiatan-kegiatan di OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Melayani kerjasama dengan media cetak dan elektronik.
4. Pelaksanaan kegiatan pertemuan Bakohumas sebagai salah satu bentuk pelayanan terhadap stakeholders. Diharapkan setiap humas yang ada di OPD aktif memberikan informasi kegiatan OPD kepada Humas.
5. Aplikasi *e-kliping* untuk memudahkan penyimpanan kliping koran.

Namun demikian, upaya-upaya sebagaimana dimaksud diatas bukan berarti tanpa kelemahan, antara lain:

1. Belum memadainya peralatan dan perlengkapan peliputan yang ada pada

Bagian Humas.

2. Masih rendahnya pemahaman OPD terhadap pentingnya kegiatan Bakohumas yang dilaksanakan oleh Bagian Humas.
3. Banyaknya media cetak maupun online yang baru dan menuntut untuk bekerjasama dengan Bagian Humas.
4. Keterbatasan anggaran dimana permintaan publikasi oleh pimpinan melalui media cetak/elektronik tidak diimbangi dengan ketersediaan dana yang memadai.
5. Keterbatasan personal yang ahli pada Bagian Humas dan Protokoler.

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Bab ini berisikan uraian mengenai perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Disini dijelaskan bahwa tidak terdapat perbedaan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan OPD. Program, kegiatan, rumusan- rumusan serta besaran- besaran yang terdapat pada rancangan awal RKPD tidak terdapat perubahan. Karena program dan kegiatan yang dilaksanakan di Sekretariat Daerah bersifat Fasilitasi dan koordinasi yang rutin dilaksanakan.

Adapun hasil perbandingan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan yang tertuang dalam renja Sekretariat Daerah, sebagai berikut :

Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Tahun 2019

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		terlaksananya administrasi perkantoran	100%	7,556,792,000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		terlaksananya administrasi perkantoran	100%	7,556,792,000	Rutin OPD
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Setda	Tersedianya peralatan surat menyurat dan benda pos lainnya	12 Bulan	20,000,000	1 Penyediaan jasa surat menyurat	Setda	Tersedianya peralatan surat menyurat dan benda pos lainnya	12 Bulan	20,000,000	Rutin OPD

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu		
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Setda	Terpenuhi kebutuhan komunikasi, sumber daya air, listrik dan telepon sesuai dengan kebutuhan	11 Bulan	800,000,000	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Setda	Terpenuhi kebutuhan komunikasi, sumber daya air, listrik dan telepon sesuai dengan kebutuhan	11 Bulan	800,000,000	Rutin OPD
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Setda	Tersedianya dana kegiatan jasa kebersihan kantor	100%	300,000,000	3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Setda	Tersedianya dana kegiatan jasa kebersihan kantor	100%	300,000,000	Rutin OPD
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Setda	Tersedianya alat tulis kantor sesuai kebutuhan	12 Bulan	79,942,000	4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Setda	Tersedianya alat tulis kantor sesuai kebutuhan	12 Bulan	79,942,000	Rutin OPD
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Setda	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan sesuai kebutuhan	12 Bulan	90,000,000	5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Setda	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan sesuai kebutuhan	12 Bulan	90,000,000	Rutin OPD
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Setda	Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor dan rumah dinas	7 Bulan	90,000,000	6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Setda	Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor dan rumah dinas	7 Bulan	90,000,000	Rutin OPD
7	Penyediaan makanan dan minuman	Setda	Tersedianya makan minum KDH/WKDH, tamu dan rapat rapat	12 bulan	1,400,000,000	7	Penyediaan makanan dan minuman	Setda	Tersedianya makan minum KDH/WKDH, tamu dan rapat rapat	12 bulan	1,400,000,000	Rutin OPD
8	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Setda	Tersedianya rapat rapat dan konsultasi ke luar daerah sesuai kebutuhan	100%	3,265,000,000	8	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Setda	Tersedianya rapat rapat dan konsultasi ke luar daerah sesuai kebutuhan	100%	3,265,000,000	Rutin OPD
9	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran	Setda	Tersedianya jasa tenaga pendukung ADM/ teknis perkantoran setda	12 bulan	480,000,000	9	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran	Setda	Tersedianya jasa tenaga pendukung ADM/ teknis perkantoran setda	12 bulan	480,000,000	Rutin OPD
10	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Setda	terlaksananya jasa administrasi keuangan dengan tertib dan lancar	12 bulan	1,031,850,000	10	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Setda	terlaksananya jasa administrasi keuangan dengan tertib dan lancar	12 bulan	1,031,850,000	Rutin OPD
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Setda	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aperatur		4,922,000,000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Setda	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aperatur		4,922,000,000	Rutin OPD	
11	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Setda	Tersedianya Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	70%	600,000,000	11	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Setda	Tersedianya Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	70%	600,000,000	Rutin OPD
12	Pengadaan peralatan gedung	Setda	Tersedianya sarana untuk kebutuhan kelancaran pekerjaan kantor	85%	600,000,000	12	Pengadaan peralatan gedung	Setda	Tersedianya sarana untuk kebutuhan kelancaran pekerjaan kantor	85%	600,000,000	Rutin OPD
13	Pengadaan mebeleur	Setda	Tersedianya mebeleur kantor	100%	250,000,000	13	Pengadaan mebeleur	Setda	Tersedianya mebeleur kantor	100%	250,000,000	Rutin OPD
14	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Setda	Terlaksanya pemerintahan rutin/ berkala rumah dinas	60%	450,000,000	14	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Setda	Terlaksanya pemerintahan rutin/ berkala rumah dinas	60%	450,000,000	Rutin OPD

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu		
15	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Setda	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	50%	402,000,000	15	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Setda	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	50%	402,000,000	Rutin OPD
16	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Setda	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	6 Bulan	770,000,000	16	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Setda	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	6 Bulan	770,000,000	Rutin OPD
17	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Setda	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional	6 Bulan	1,100,000,000	17	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Setda	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional	6 Bulan	1,100,000,000	Rutin OPD
18	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Setda	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-	250,000,000	18	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Setda	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-	250,000,000	Rutin OPD
19	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Setda	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Rehab sedang berat rumah dinas di kompleks rumah dinas pemda di payakumbuh	500,000,000	19	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Setda	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Rehab sedang berat rumah dinas di kompleks rumah dinas pemda di payakumbuh	500,000,000	Rutin OPD
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Setda	Terlaksananya program peningkatan disiplin aparatur		550,000,000	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Setda	Terlaksananya program peningkatan disiplin aparatur		550,000,000	Rutin OPD	
20	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Setda	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas serta kelengkapannya	124 stel	550,000,000	20	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Setda	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas serta kelengkapannya	124 stel	550,000,000	Rutin OPD
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Setda	Terlaksananya program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		324,000,000	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Setda	Terlaksananya program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		324,000,000	Rutin OPD	
21	Pendidikan dan pelatihan formal	Setda	Terlaksananya Pendidikan Formal Bagi PNS daerah	80%	100,000,000	21	Pendidikan dan pelatihan formal	Setda	Terlaksananya Pendidikan Formal Bagi PNS daerah	80%	100,000,000	Rutin OPD
22	Bimtek Teknis Keprotokoleraan	Setda	Terselenggaranya kegiatan-kegiatan Kada / Wakil Kada sesuai dengan aturan dan tata keprotokoleraan yang berlaku	90%	84,000,000	22	Bimtek Teknis Keprotokoleraan	Setda	Terselenggaranya kegiatan-kegiatan Kada / Wakil Kada sesuai dengan aturan dan tata keprotokoleraan yang berlaku	90%	84,000,000	Rutin OPD

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Setda	Terwujudnya laporan keuangan sekretariat daerah yang akuntabel		198,150,000	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Setda	Terwujudnya laporan keuangan sekretariat daerah yang akuntabel		198,150,000	Rutin OPD
23	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Setda	meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	nilai BB pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	130,000,000	23 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Setda	meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	nilai BB pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	175,688,000	Adanya penambahan pagu untuk mencapai target IKU Kepala OPD
24	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Setda	Terwujudnya laporan keuangan semesteran sekretariat daerah	1 dokumen	33,136,000	24 Penyusunan laporan keuangan semesteran	Setda	Terwujudnya laporan keuangan semesteran sekretariat daerah	1 dokumen	33,136,000	Rutin OPD
25	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Setda	Terwujudnya Laporan Keuangan Sekretariat Daerah yang dapat dipertanggung jawabkan	1 dokumen	35,014,000	25 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Setda	Terwujudnya Laporan Keuangan Sekretariat Daerah yang dapat dipertanggung jawabkan	1 dokumen	35,014,000	Rutin OPD
	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	Setda	Terlaksananya peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	100%	1,524,120,000	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	Setda	Terlaksananya peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	100%	1,524,120,000	Rutin OPD
1	Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat	Setda	Terlaksananya dialog/audiensi Kepala/Wakil Kepala Daerah dengan tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan	400 orang	40,000,000	1 Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat	Setda	Terlaksananya dialog/audiensi Kepala/Wakil Kepala Daerah dengan tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan	400 orang	40,000,000	Rutin OPD
2	Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Departemen / Lembaga Non Departemen	Setda	Terlaksananya kunjungan kerja pejabat negara /Pemerintahan non Departemen/ Luar Negeri	12 bulan	450,000,000	2 Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Departemen / Lembaga Non Departemen	Setda	Terlaksananya kunjungan kerja pejabat negara /Pemerintahan non Departemen/ Luar Negeri	12 bulan	450,000,000	Rutin OPD
3	Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah	Setda	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah dan rapat-rapat koordinasi camat se-Kabupaten Lima Puluh Kota dengan lancar	12 kali	50,000,000	3 Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah	Setda	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah dan rapat-rapat koordinasi camat se-Kabupaten Lima Puluh Kota dengan lancar	12 kali	50,000,000	Rutin OPD
4	Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah	Setda	Terselenggaranya kegiatan KDH/WKDH sesuai dengan aturan dan tata keprotokololan yang berlaku	12 Bulan	200,000,000	4 Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah	Setda	Terselenggaranya kegiatan KDH/WKDH sesuai dengan aturan dan tata keprotokololan yang berlaku	12 Bulan	200,000,000	Rutin OPD

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu		
5	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	Setda	(1). Terikutinya rapat koordinasi Kepala Daerah, rakor Tata Pemerintahan, koordinasi dengan pusat dan tersedianya bahan rapat koordinasi. (2). Terikutinya program dan kegiatan APKASI	(1). 6 kali, 6 kali, 4 kali, dan 28 dokumen. (2). 1 kali	199,914,000	5	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	Setda	(1). Terikutinya rapat koordinasi Kepala Daerah, rakor Tata Pemerintahan, koordinasi dengan pusat dan tersedianya bahan rapat koordinasi. (2). Terikutinya program dan kegiatan APKASI	(1). 6 kali, 6 kali, 4 kali, dan 28 dokumen. (2). 1 kali	199,914,000	Rutin OPD
6	Peningkatan Kapasitas Kepala Daerah / KDH/WKDH (Lemhanas)	Setda	Terlaksananya Lemhanas Pimpinan daerah	6 orang	384,206,000	6	Peningkatan Kapasitas Kepala Daerah / KDH/WKDH (Lemhanas)	Setda	Terlaksananya Lemhanas Pimpinan daerah	6 orang	384,206,000	Rutin OPD
7	Layanan Keprotokolan Kunjungan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Setda	Terselenggaranya kegiatan-kegiatan Kada / Wakil Kada sesuai dengan aturan dan tata keprotokolan yang berlaku	90%	224,000,000	7	Layanan Keprotokolan Kunjungan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Setda	Terselenggaranya kegiatan-kegiatan Kada / Wakil Kada sesuai dengan aturan dan tata keprotokolan yang berlaku	90%	224,000,000	Rutin OPD
	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Setda		100%	426,505,000	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Setda		100%	426,505,000		IKU Kepala OPD
8	Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah	Setda	ditetapkannya tapal batas wilayah administrasi pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yang jelas	(1) 6kali, 2kali kepusat (2) 6kali (3) 13 Kecamatan (4) 4kali ke Pemerintah Provinsi dan 4kali ke Pemerintah Pusat.	24,196,500	8	Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah	Setda	ditetapkannya tapal batas wilayah administrasi pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yang jelas	(1) 6kali, 2kali kepusat (2) 6kali (3) 13 Kecamatan (4) 4kali ke Pemerintah Provinsi dan 4kali ke Pemerintah Pusat.	24,196,500	IKU Kepala OPD
9	Penyusunan Format Standar Administrasi Pengadaan Barang / Jasa	Setda			44,498,000	9	Penyusunan Format Standar Administrasi Pengadaan Barang / Jasa	Setda			44,498,000	IKU Kepala OPD
10	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang/Jasa	Setda	Terlaksananya SOP UKPBJ yang sesuai dengan Perpres 16 Tahun 2018 tentang PBJP, Terlaksananya pembinaan PBJ pada OPD lain di Nagari, Terlaksananya konsultasi dengan LKPP tentang Format Standar sesuai dengan Perpres 16 Tahun 2018 tentang PBJP, Tersedianya peraturan perundang-undangan yang	2 format	341,026,200	10	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang/Jasa	Setda	Terlaksananya SOP UKPBJ yang sesuai dengan Perpres 16 Tahun 2018 tentang PBJP, Terlaksananya pembinaan PBJ pada OPD lain di Nagari, Terlaksananya konsultasi dengan LKPP tentang Format Standar sesuai dengan Perpres 16 Tahun 2018 tentang PBJP, Tersedianya peraturan perundang-undangan yang	2 format	341,026,200	IKU Kepala OPD

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu	
			terkait dengan PBJ.					terkait dengan PBJ.			
	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Setda	Terlaksananya proses pemilihan penyedia barang dan jasa pada UKPBJ dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui LPSE, Tersedianya laporan mengenai proses dan hasil	90%	910,031,075	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Setda	Terlaksananya proses pemilihan penyedia barang dan jasa pada UKPBJ dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui LPSE, Tersedianya laporan mengenai proses dan hasil	90%	910,031,075	IKU Kepala OPD
12	Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan	Setda	Terlaksananya koordinasi permasalahan perundangan undangan	100 %	250,000,000	12 Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan	Setda	Terlaksananya koordinasi permasalahan perundangan undangan	100%	250,000,000	IKU Kepala OPD
13	Penyusunan Rencana Kerja Peraturan Perundang-Undangan	Setda	Jumlah Kasus yang difasilitasi penyelesaiannya	8 kasus	134,727,750	13 Penyusunan Rencana Kerja Peraturan Perundang-Undangan	Setda	Jumlah Kasus yang difasilitasi penyelesaiannya	8 kasus	134,727,750	IKU Kepala OPD
14	Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Setda	Jumlah peraturan Kepala Daerah yang ditetapkan	25 Kali Pembahasan Peraturan Kepala Daerah	109,029,200	14 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Setda	Jumlah peraturan Kepala Daerah yang ditetapkan	25 Kali Pembahasan Peraturan Kepala Daerah	109,029,200	IKU Kepala OPD
15	Publikasi Peraturan Perundang-Undangan	Setda	Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan	10 Jumlah Rancangan Perda yang Dikaji	94,325,100	15 Publikasi Peraturan Perundang-Undangan	Setda	Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan	10 Jumlah Rancangan Perda yang Dikaji	94,325,100	IKU Kepala OPD
16	Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	Setda	Jumlah buku peraturan perundang-undangan yang telah dipublikasikan	80 buku peraturan perundang-undangan yang telah dipublikasikan	164,847,125	16 Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	Setda	Jumlah buku peraturan perundang-undangan yang telah dipublikasikan	80 buku peraturan perundang-undangan yang telah dipublikasikan	164,847,125	IKU Kepala OPD

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu		
17	Evaluasi dan Pengawasan Produk Hukum Nagari	Setda	Jumlah Rancangan Perda yang dikaji	10 Jumlah Rancangan Perda yang Dikaji	87,686,600	17	Evaluasi dan Pengawasan Produk Hukum Nagari	Setda	Jumlah Rancangan Perda yang dikaji	10 Jumlah Rancangan Perda yang Dikaji	87,686,600	IKU Kepala OPD
18	Diseminasi Aksi Nasional Hak Azazi Manusia (HAM)	Setda	Jumlah peraturan nagari yang dievaluasi	125 peraturan nagari yang dievaluasi	69,415,300	18	Diseminasi Aksi Nasional Hak Azazi Manusia (HAM)	Setda	Jumlah peraturan nagari yang dievaluasi	125 peraturan nagari yang dievaluasi	69,415,300	IKU Kepala OPD
	Program Reformasi Birokrasi	Setda	Jumlah peraturan perundang-undangan yang telah disosialisasikan	1 Peraturan Perundang-Undangan	310,000,000	Program Reformasi Birokrasi	Setda	Jumlah peraturan perundang-undangan yang telah disosialisasikan	1 Peraturan Perundang-Undangan	420,430,000	IKU Kepala OPD	
20	Penetapan Standar Pelayanan Publik	Setda	OPD yang telah menyusun standar pelayanan dan SOP	100%	40,000,000	20	Penetapan Standar Pelayanan Publik	Setda	OPD yang telah menyusun standar pelayanan dan SOP	100%	111,212,000	Adanya penambahan pagu untuk mencapai target IKU Kepala OPD
21	Kegiatan Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi	Setda	Tersosialisasikan nya road map reformasi birokrasi	Seluruh OPD	80,000,000	21	Kegiatan Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi	Setda	Tersosialisasikan nya road map reformasi birokrasi	Seluruh OPD	101,660,000	Adanya penambahan pagu untuk mencapai target IKU Kepala OPD
	Penyusunan Pedoman Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	Setda	Tersusunnya pedoman ketatalaksanaan perangkat daerah	100%	40,000,000		Penyusunan Pedoman Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	Setda	Tersusunnya pedoman ketatalaksanaan perangkat daerah	100%	61,240,000	Adanya penambahan pagu untuk mencapai target IKU Kepala OPD
22	Resrukturisasi / Penataan Tugas dan Fungsi SKPD	Setda	Tersusunnya Ranperda perubahan OPD dan Ranperbup penjabaran perubahan OPD	1 Perbup	150,000,000	22	Resrukturisasi / Penataan Tugas dan Fungsi SKPD	Setda	Tersusunnya Ranperda perubahan OPD dan Ranperbup penjabaran perubahan OPD	1 Perbup	146,318,000	Penyesuaian terhadap kebutuhan anggaran
	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Setda	Ranperda(perda) perubahan opd dan Ranperbup(Perbup) penjabaran perubahan opd	1 perda dan 9 perbup	935,000,000	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Setda	Ranperda(perda) perubahan opd dan Ranperbup(Perbup) penjabaran perubahan opd	1 perda dan 9 perbup	935,000,000	IKU Kepala OPD	
23	Fasilitasi/Pembentukan Perkuatan Kerjasama Antar Daerah pada Bidang Ekonomi	Setda	Terbinanya hubungan baik antara Pemerintah daerah dengan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan melalui komunikasi yang efektif	100%	160,000,000	23	Fasilitasi/Pembentukan Perkuatan Kerjasama Antar Daerah pada Bidang Ekonomi	Setda	Terbinanya hubungan baik antara Pemerintah daerah dengan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan melalui komunikasi yang efektif	100%	160,000,000	IKU Kepala OPD
24	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Dearah	Setda	Tercapainya kesepakatan kerjasama antar daerah dengan lembaga pemerintah, badan maupun pihak ketiga dalam meningkatkan	4 buah MoU/ Moa	155,000,000	24	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Dearah	Setda	Tercapainya kesepakatan kerjasama antar daerah dengan lembaga pemerintah, badan maupun pihak ketiga dalam meningkatkan	4 buah MoU/Moa	155,000,000	IKU Kepala OPD

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu	
			sektor ekonomi					sektor ekonomi			
25	Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga	Setda	Tercapainya kesepakatan kerjasama antar lembaga pemerintah pusat, provinsi maupun daerah	100%	200,000,000	25 Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga	Setda	Tercapainya kesepakatan kerjasama antar lembaga pemerintah pusat, provinsi maupun daerah	100%	200,000,000	IKU Kepala OPD
26	Pendataan Perantau Kabupaten Lima Puluh Kota	Setda	Tercapainya kesepakatan atas dasar kerjasama antar daerah dengan lembaga pemerintah baik pemerintah badan maupun pihak ketiga	4 buah MoU/MoA	70,000,000	26 Pendataan Perantau Kabupaten Lima Puluh Kota	Setda	Tercapainya kesepakatan atas dasar kerjasama antar daerah dengan lembaga pemerintah baik pemerintah badan maupun pihak ketiga	4 buah MoU/MoA	70,000,000	IKU Kepala OPD
27	Pembentukan dan Pembinaan Nagari Binaan Kerjasama Rantau	Setda	Terlaksananya penguatan kelembagaan kecamatan dan nagari dalam perdataan perantau	100%	150,000,000	27 Pembentukan dan Pembinaan Nagari Binaan Kerjasama Rantau	Setda	Terlaksananya penguatan kelembagaan kecamatan dan nagari dalam perdataan perantau	100%	150,000,000	IKU Kepala OPD
28	Pembuatan Jaringan Komunikasi Pemerintah Daerah dengan Perantau	Setda	Terlaksananya pembentukan nagari binaan kerjasama rantau	100%	200,000,000	28 Pembuatan Jaringan Komunikasi Pemerintah Daerah dengan Perantau	Setda	Terlaksananya pembentukan nagari binaan kerjasama rantau	100%	200,000,000	IKU Kepala OPD
	Program Peningkatan Pemahaman Keagamaan Masyarakat	Setda	Meningkatnya Pemahaman keagamaan masyarakat	100 %	1,412,945,000	Program Peningkatan Pemahaman Keagamaan Masyarakat	Setda	Meningkatnya Pemahaman keagamaan masyarakat	100%	1,412,945,000	IKU Kepala OPD
28	Penyelenggaraan even-even keagamaan	Setda	Terikutinya even MTQ Nasional ke XXXVIII Tingkat Provinsi Sumatera Barat	1 even	964,650,000	28. Penyelenggaraan even-even keagamaan	Setda	Terikutinya even MTQ Nasional ke XXXVIII Tingkat Provinsi Sumatera Barat	1 even	964,650,000	IKU Kepala OPD
29	Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)	Setda	Terlaksananya Peringatan Hari Besar Islam di Kab. Lima Puluh Kota	5 kali	90,000,000	29. Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)	Setda	Terlaksananya Peringatan Hari Besar Islam di Kab. Lima Puluh Kota	5 kali	90,000,000	IKU Kepala OPD
30	Peningkatan Manajemen Organisasi dan Kompoetensi Pembimbing Lembaga Didikan Subuh (LDS)	Setda	Terlaksananya pembinaan didikan subuh	13 LDS	83,175,000	30. Peningkatan Manajemen Organisasi dan Kompoetensi Pembimbing Lembaga Didikan Subuh (LDS)	Setda	Terlaksananya pembinaan didikan subuh	13 LDS	83,175,000	IKU Kepala OPD
31	Safari Ramadhan	Setda	Terlaksananya kunjungan Tim Safari Ramadhan Kabupaten ke Masjid di seluruh kecamatan	79 masjid	225,120,000	31. Safari Ramadhan	Setda	Terlaksananya kunjungan Tim Safari Ramadhan Kabupaten ke Masjid di seluruh kecamatan	79 masjid	225,120,000	IKU Kepala OPD

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu	
	34 . peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial	Setda	Terlaksananya wirid pengajian dan senam pagi	21 kali wirid dan 21 kali senam	50,000,000	34. peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial	Setda	Terlaksananya wirid pengajian dan senam pagi	21 kali wirid dan 21 kali senam	50,000,000	IKU Kepala OPD
	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Setda		100%	669,348,750	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Setda		100%	669,348,750	IKU Kepala OPD
	1 Penamaan Rupa Bumi	Setda	(1). 6 kecamatan, 38 nagari dan 1 dokumen. (2). Penyampaian data rupabumi ke pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.	100%	96,932,000	1 Penamaan Rupa Bumi	Setda	(1). 6 kecamatan, 38 nagari dan 1 dokumen. (2). Penyampaian data rupabumi ke pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.	100%	96,932,000	IKU Kepala OPD
	2 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Setda	Terlaksananya peningkatan perencanaan pembangunan daerah	100%	19,656,250	2 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Setda	Terlaksananya peningkatan perencanaan pembangunan daerah	100%	19,656,250	IKU Kepala OPD
	3 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Setda	(1). Terlaksananya evaluasi pertanggungjawaban kinerja kepala daerah kepada DPRD (LKPI Tahun 2018).	(1). Buku LKPJ dan Nota LKPI tahun 2018	276,777,000	3 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Setda	(1). Terlaksananya evaluasi pertanggungjawaban kinerja kepala daerah kepada DPRD (LKPI Tahun 2018).	(1). Buku LKPJ dan Nota LKPI tahun 2018	276,777,000	IKU Kepala OPD
	4 Penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang pedoman pelaksanaan program dan kegiatan APBD	Setda	Tersedianya peraturan kepala daerah tentang pedoman pelaksanaan program dan kegiatan APBD	1 perbup	58,094,500	4 Penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang pedoman pelaksanaan program dan kegiatan APBD	Setda	Tersedianya peraturan kepala daerah tentang pedoman pelaksanaan program dan kegiatan APBD	1 perbup	58,094,500	IKU Kepala OPD
	5 Penyusunan format standar administrasi pengadaan barang dan jasa	Setda	Tersedianya format-format yang dibutuhkan dalam pengadaan barang dan jasa	2 format	230.828.000	5 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pengadaan Barang/Jasa	Setda	Laporan triwulan Monitoring Pengadaan Barang dan Jasa	4 laporan	50,838,000	Penyesuaian terhadap kebutuhan anggaran
	6 Pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa	Setda	Persentase terlaksananya pemilihan penyedia di ULP sesuai dengan peraturan perundang-undangan	97%	501.492.000	6 Penilaian dan Penyelesaian Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa	Setda	Terfasilitasinya permasalahan dalam pengadaan barang dan jasa	10 masalah	32,063,000	Penyesuaian terhadap kebutuhan anggaran

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu			
	7	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengadaan barang/jasa	Setda	Laporan triwulan monitoring pengadaan barang dan jasa	4 laporan	67.582.000	7	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan APBD	Setda	Laporan Bulanan Pelaksanaan Program dan Kegiatan	9 Laporan	80,472,000	IKU Kepala OPD Penyesuaian terhadap kebutuhan anggaran
	Program Pengembangan Nilai Budaya		Setda			2,757,055,000	Program Pengembangan Nilai Budaya		Setda			2,757,055,000	IKU Kepala OPD
	1	Peningkatan Nilai-nilai budaya dan keagamaan	Setda	Terlaksananya kegiatan Baliak Basurau	79 Nagari	2,384,095,000	1	Peningkatan Nilai-nilai budaya dan keagamaan	Setda	Terlaksananya kegiatan Baliak Basurau	79 Nagari	2,384,095,000	IKU Kepala OPD
	2	Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya	Setda	Terfasilitasinya pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji Kab. Lima Puluh Kota	1 kali pemberangkatan dan 1 kali pemulangan	372,960,000	2	Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya	Setda	Terfasilitasinya pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji Kab. Lima Puluh Kota	1 kali pemberangkatan dan 1 kali pemulangan	372,960,000	IKU Kepala OPD
	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur		Setda			137,045,000	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur		Setda			137,045,000	IKU Kepala OPD
	1	Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah	Setda	Tersedianya aparatur yang memahami tugas teknis pemerintahan	100%	61,629,000	1	Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah	Setda	Tersedianya aparatur yang memahami tugas teknis pemerintahan	100%	61,629,000	IKU Kepala OPD
	2	Pelatihan, Bimtek dan Workshop ULP	Setda	Bimtek/ diklat peningkatan kompetensi yang diikuti personil UKPBJ	2 Bimtek/ diklat	98.573.000	2	Pelatihan, Bimtek dan Workshop ULP	Setda	Bimtek/ diklat peningkatan kompetensi yang diikuti personil UKPBJ	2 Bimtek/ diklat	185.573.000	IKU Kepala OPD Adanya penambahan pagu untuk mencapai target IKU Kepala OPD
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		Setda			295,147,400	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		Setda			295,147,400	IKU Kepala OPD
	3	Pemberian Penghargaan bagi Camat Berprestasi	Setda	Terlaksananya penilaian camat berprestasi tingkat Kab. Lima Puluh Kota	1 kali penyelenggaraan, 13 camat dan ditetapkan 3 camat terbaik tingkat Kab. Lima Puluh Kota	49,703,000	3	Pemberian Penghargaan bagi Camat Berprestasi	Setda	Terlaksananya penilaian camat berprestasi tingkat Kab. Lima Puluh Kota	1 kali penyelenggaraan, 13 camat dan ditetapkan 3 camat terbaik tingkat Kab. Lima Puluh Kota	49,703,000	IKU Kepala OPD

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu		
4	Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS	Setda	Dokumen Analisis Jabatan	6 SKPD	150,000,000	4	Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS	Setda	Tersedianya acuan untuk pengisian jabatan dan pengembanaan SDM Aparatur	6 SKPD	153,252,000	IKU Kepala OPD Adanya penambahan pagu untuk mencapai target IKU Kepala OPD
5	Penyusunan Evaluasi Jabatan	Setda	Meningkatnya kemampuan aparatur dalam menyusun evaluasi jabatan	100%	70,000,000	5	Penyusunan Analisis Jabatan	Setda	Meningkatnya kemampuan aparatur dalam menyusun evaluasi jabatan	100%	130,000,000	IKU Kepala OPD Adanya penambahan pagu untuk mencapai target IKU Kepala OPD
	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Setda			128,975,400	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Setda				128,975,400	IKU Kepala OPD
6	Pendidikan dan Pelatihan PATEN bagi aparatur kecamatan	Setda			65,267,450	6	Pendidikan dan Pelatihan PATEN bagi aparatur kecamatan	Setda			65,267,450	IKU Kepala OPD
7	Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	Setda	Terciptanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur kecamatan dalam penyelenggaraan PATEN	40 aparat ur kecamatan	60,667,950	7	Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	Setda	Terciptanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur kecamatan dalam penyelenggaraan PATEN	40 aparat ur kecamatan	60,667,950	IKU Kepala OPD
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Setda	Persentase koordinasi pelaksanaan event pameran yang menunjang perekonomian daerah	95%	346,448,000	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Setda	Persentase koordinasi pelaksanaan event pameran yang menunjang perekonomian daerah	95%		346,448,000	IKU Kepala OPD
1	Kegiatan fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi	Setda	Jumlah event pameran yang diikuti pemkab dan koordinasi dengan SKPD terkait	6 event	316,930,000	1	Kegiatan fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi	Setda	Jumlah event pameran yang diikuti pemkab dan koordinasi dengan SKPD terkait	6 event	316,930,000	IKU Kepala OPD
2	Kegiatan Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD	Setda	Terwujudnya koordinasi dengan pihak/instansi terkait dalam peningkatan usaha bagi koperasi anggota dan pengurus KP-RI	30 PKP RI	29,518,000	2	Kegiatan Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD	Setda	Terwujudnya koordinasi dengan pihak/instansi terkait dalam peningkatan usaha bagi koperasi anggota dan pengurus KP-RI	30 PKP RI	29,518,000	IKU Kepala OPD
		Setda	jumlah sosialisasi yang dilaksanakan bagi pengurus/anggota PKP-RI	1 kali sosialisasi				Setda	jumlah sosialisasi yang dilaksanakan bagi pengurus/anggota PKP-RI	1 kali sosialisasi		
	Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM	Setda	Persentase koordinasi kegiatan dana bergulir sesuai aturan	85%	95,250,000	Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM	Setda	Persentase koordinasi kegiatan dana bergulir sesuai aturan	85%		95,250,000	IKU Kepala OPD

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu	
	3 Kegiatan koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk usaha kecil menengah dan koperasi	Setda	Jumlah laporan dalam rangka koordinasi pemantauan, pemanfaatan fasilitas dan perkuatan modal dana bergulir dari pemerintah kepada UKM dan koperasi atau LKM	2 Laporan	95,250,000	3 Kegiatan koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk usaha kecil menengah dan koperasi	Setda	Jumlah laporan dalam rangka koordinasi pemantauan, pemanfaatan fasilitas dan perkuatan modal dana bergulir dari pemerintah kepada UKM dan koperasi atau LKM	2 Laporan	95,250,000	IKU Kepala OPD
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Setda	Persentase evaluasi dan pelaporan	85%	32,680,000	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Setda			32,680,000	IKU Kepala OPD
	1 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Setda	Jumlah laporan dalam pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan rapat-rapat, monitoring permasalahan SDA	2 Laporan	32,680,000	1 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Setda	Jumlah laporan dalam pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan rapat-rapat, monitoring permasalahan SDA	2 Laporan	32,680,000	IKU Kepala OPD
	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang pertambangan	Setda	Persentase permasalahan migas yang dikoordinasikan	90%	44,685,000	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang pertambangan	Setda	Persentase permasalahan migas yang dikoordinasikan	90%	44,685,000	IKU Kepala OPD
	1 kegiatan koordinasi dan pendataan ttg hasil produksi dibidang pertambangan	Setda	Jumlah laporan yang dilaksanakan dalam koordinasi, monitoring pengendalian dan evaluasi terhadap pengelola dan pemanfaat minyak bumi dan energi	2 Laporan	44,685,000	1 kegiatan koordinasi dan pendataan ttg hasil produksi dibidang pertambangan	Setda	Jumlah laporan yang dilaksanakan dalam koordinasi, monitoring pengendalian dan evaluasi terhadap pengelola dan pemanfaat minyak bumi dan energi	2 Laporan	44,685,000	IKU Kepala OPD
	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	Setda	Persentase koordinasi kegiatan DBH-CHT dan pengawasan distribusi pupuk dan pestisida bersubsidi	90%	474,272,000	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Setda	Persentase koordinasi kegiatan DBH-CHT dan pengawasan distribusi pupuk dan pestisida bersubsidi	90%	474,272,000	IKU Kepala OPD
	1 Kegiatan Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Setda	(1) jumlah laporan bulanan dalam penggunaan dana DBHCHT	2 Laporan	374,272,000	1 Kegiatan Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Setda	jumlah laporan bulanan dalam penggunaan dana DBHCHT	2 Laporan	374,272,000	IKU Kepala OPD
			(2) Jumlah pelaksanaan sosialisasi, kepada masyarakat, instansi terkait mengenai ketentuan dibidang cukai dan pengawasan terhadap rokok tanpa cukai/ilegal	1 kali Sosialisasi				(2) Jumlah pelaksanaan sosialisasi, kepada masyarakat, instansi terkait mengenai ketentuan dibidang cukai dan pengawasan terhadap rokok tanpa cukai/ilegal	1 kali Sosialisasi		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu	
			(3) jumlah pelaksanaan talkshow radio dalam rangka pemberitahuan kepada masyarakat ttg aturan cukai tembakau	1 kali Talkshow				(3) jumlah pelaksanaan talkshow radio dalam rangka pemberitahuan kepada masyarakat ttg aturan cukai tembakau	1 kali Talkshow		
			(4) jumlah laporan yang dilaksanakan dalam rangka pengawasan terhadap peredaran pupuk dan pestisida bersubsidi	2 Laporan	100,000,000			(4) jumlah laporan yang dilaksanakan dalam rangka pengawasan terhadap peredaran pupuk dan pestisida bersubsidi	2 Laporan	100,000,000	
	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Setda	Persentase kegiatan TPID, TPAKD dan TPDD yang dikoordinasikan	90%	110,936,000	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Setda	Persentase kegiatan TPID, TPAKD dan TPDD yang dikoordinasikan		160,796,000	IKU Kepala OPD Adanya penambahan pagu untuk mencapai target IKU Kepala OPD
	2 Kegiatan peningkatan system dan jaringan informasi perdagangan	Setda	Jumlah laporan dalam rangka pemantauan harga komoditi yang beredar	Setda	166,404,000	2 Kegiatan peningkatan system dan jaringan informasi perdagangan	Setda	Jumlah laporan dalam rangka pemantauan harga komoditi yang beredar	Setda	110,936,000	IKU Kepala OPD Adanya penambahan pagu untuk mencapai target IKU Kepala OPD
	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/ INFORMASI/ STATISTIK DAERAH	Setda	Persentase data potensi ekonomi daerah yang diperbaharui dalam buku potensi ekonomi daerah	90%	37,500,000	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/ INFORMASI/ STATISTIK DAERAH	Setda	Persentase data potensi ekonomi daerah yang diperbaharui dalam buku potensi ekonomi daerah	90%	37,500,000	IKU Kepala OPD
	1 Kegiatan pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah	Setda	Jumlah buku potensi ekonomi daerah yang dicetak	70 buku	37,500,000	1 Kegiatan pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah	Setda	Jumlah buku potensi ekonomi daerah yang dicetak	70 buku	37,500,000	IKU Kepala OPD
	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI	Setda	Persentase koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi perusahaan daerah dan BPR/bank nagari sesuai peraturan perundang-undangan	90%	97,500,000	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI	Setda	Persentase koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi perusahaan daerah dan BPR/bank nagari sesuai peraturan perundang-undangan	90%	97,500,000	IKU Kepala OPD
	1 Kegiatan koordinasi antar lembaga dlm pengendalian investasi PMDN/ PMA	Setda	Jumlah koordinasi dan pengawasan terhadap BUMD, BUMN dan Perusahaan Swasta	6 BPR 1 Perusahaan Daerah	97,500,000	1 Kegiatan koordinasi antar lembaga dlm pengendalian investasi PMDN/ PMA	Setda	Terlaksananya koordinasi dan pengawasan BUMD, BUMN dan perusahaan swasta	6 BPR 1 Perusahaan Daerah	97,500,000	IKU Kepala OPD
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN	Setda	Persentase peningkatan koordinasi kegiatan pariwisata dan	90%	42,382,000	Program pengembangan kemitraan	Setda	Persentase peningkatan koordinasi kegiatan pariwisata dan	90%	42,382,000	IKU Kepala OPD

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu		
			ekonomi kreatif					ekonomi kreatif				
1	Kegiatan pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata	Setda	Jumlah laporan dalam rangka koordinasi, konsultasi dan rapat-rapat kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif	1 Laporan	42,382,000	1	Kegiatan pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata	Setda	Jumlah laporan dalam rangka koordinasi, konsultasi dan rapat-rapat kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif	1 Laporan	42,382,000	IKU Kepala OPD
	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	Setda	Persentase peningkatan jaringan komunikasi dan informasi antar OPD di Lingkungan Pemkab. Lima Puluh Kota	100%	147,094,200	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	Setda	Persentase peningkatan jaringan komunikasi dan informasi antar OPD di Lingkungan Pemkab. Lima Puluh Kota	100%	137,094,200	IKU Kepala OPD Penyesuaian terhadap kebutuhan anggaran	
1	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Setda	Jumlah pelaksanaan kegiatan Pertemuan Bakohumas Kabupaten Lima Puluh Kota	100%	147,094,200	1	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Setda	Terlaksananya Sosialisasi Bakohumas	100%	137,094,200	IKU Kepala OPD Penyesuaian terhadap kebutuhan anggaran
	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA	Setda	Persentase tersebarluasnya kebijakan dan informasi pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota	100%	1,622,305,850	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA	Setda	Persentase tersebarluasnya kebijakan dan informasi pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota	100%	1,500,305,850	IKU Kepala OPD Penyesuaian terhadap kebutuhan anggaran	
2	Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Setda	Terpantainya pemberitaan daerah di media cetak yang beredar di Lima Puluh Kota	100%	793,315,600	2	Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Setda	Tersedianya media cetak harian dan mingguan,	100%	731,315,600	IKU Kepala OPD Penyesuaian terhadap kebutuhan anggaran
3	Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah	Setda	Tersebarinya informasi pembangunan daerah dan kebijakan daerah melalui media cetak/online serta terdokumentasikan ke Kepala daerah	100%	512,985,000	3	Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah	Setda	Terbitnya Tabloid Sinamar	100%	472,985,000	IKU Kepala OPD Penyesuaian terhadap kebutuhan anggaran
4	Kegiatan Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	Setda	Tersebarinya informasi pembangunan daerah dan kebijakan daerah melalui media cetak/online serta terdokumentasikan ke Kepala daerah	100%	316,005,250	4	Kegiatan Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	Setda	Terlaksananya kegiatan penyebaran informasi melalui spanduk/baliho penyampaian informasi	100%	296,005,250	IKU Kepala OPD Penyesuaian terhadap kebutuhan anggaran
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Setda	Meningkatnya pemberdayaan lembaga sosial kemasyarakatan		130,000,000	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Setda	Meningkatnya pemberdayaan lembaga sosial kemasyarakatan		130,000,000	IKU Kepala OPD	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu	
1	Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	Setda	Terlaksananya koordinasi dengan stakeholders yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pada Bagian Kesra	12 bulan	50,000,000	1	Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	Terlaksananya koordinasi dengan stakeholders yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pada Bagian Kesra	12 bulan	50,000,000	IKU Kepala OPD
2	Pelaksanaan pembinaan dan Lomba Lomba UKS	Setda	Terlaksananya pembinaan dan lomba-lomba UKS di Kab. Lima Puluh Kota	56 sekolah	80,000,000	2	Pelaksanaan pembinaan dan Lomba Lomba UKS	Terlaksananya pembinaan dan lomba-lomba UKS di Kab. Lima Puluh Kota	56 sekolah	80,000,000	IKU Kepala OPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan Pelayanan Propinsi, LSM, Asosiasi- asosiasi, Perguruan tinggi maupun Perangkat Daerah lainnya melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Tabel T-C.32

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1.	N I H I L				

Pada umumnya dalam menyusun Renja, Sekretariat Daerah tidak dapat menampung program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat, karena program dan kegiatan teknis telah diserahkan kepada OPD terkait sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah bersifat Administrasi, Fasilitas dan Koordinasi.

Namun beberapa usulan masyarakat yang dapat ditampung pada bagian Kesra. Kegiatan-kegiatan yang diusulkan masyarakat adalah optimalisasi pelaksanaan kegiatan Baliak Basurau yang rutin dilaksanakan yang dampaknya cukup bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Pesan yang diambil dari masyarakat adalah agar kegiatan tersebut pada kegiatan Bagian Kesra dapat dijalankan dengan tertib, terarah, efektif dan efisien.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015 – 2019 telah ditetapkan Visi Kementerian Dalam Negeri yaitu: “Kementerian Dalam Negeri mampu menjadi poros jalannya pemerintahan dan politik dalam negeri, meningkatkan pelayanan publik, menegakkan demokrasi dan menjaga integrasi bangsa”. Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.
6. Mendorong terwujudnya tertib dan kepastian hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Menelaah Misi Kementerian Dalam Negeri dimaksud ditataran pemerintahan daerah, Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota juga memiliki peranan dalam membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tertuang dalam fungsinya sebagai Penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah; Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Nagari; Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah; Pembinaan administrasi dan Aparatur pemerintahan Daerah. Maka ditetapkan beberapa program dan kegiatan yang mendukung misi tersebut, diantaranya :

1. Program Reformasi Birokrasi, dengan Kegiatan- kegiatan : Penyusunan Road Map Reformasi birokrasi. Program ini memfasilitasi program nasional dengan tujuan dan sasaran untuk meningkatkan keselarasan dokumen road map reformasi birokrasi dengan RPJMD. Kegiatan Restrukturisasi/ penataan Tugas dan Fungsi OPD serta Penyusunan Aplikasi *e-kelembagaan* Perangkat Daerah yang mendukung terwujudnya peningkatan kualitas IKM dan Indeks Reformasi Birokrasi, serta Pelaksanaan PATEN untuk pelayanan Publik di tingkat
2. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah dan Program Penataan Otonomi Daerah, dengan Kegiatan- kegiatan diantaranya : Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya, fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi. Kegiatan- kegiatan dimaksud dilaksanakan dengan beberapa sasaran, yaitu : Peningkatan nilai EKPPD Kab. Lima Puluh Kota di tingkat Nasional, koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat dan Kementerian/ Lembaga
3. Beberapa Program dibidang peningkatan kerjasama daerah, Peningkatan Promosi Daerah di event- event tingkat Propinsi dan Nasional, Program Pengembangan kemitraan di bidang Pariwisata, dan lain- lain.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan ini merupakan kebutuhan daerah yang diperoleh dari berbagai masukan, baik yang berasal dari masyarakat

dan *stakeholder* maupun untuk mengadopsi dan memfasilitasi program- program nasional yang dilaksanakan di Kabupaten Lima Puluh Kota Sesuai dengan Peraturan Dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2016-, dimana dalam RPJMD tersebut telah ditetapkan Visi dan Misi untuk jangka waktu 5 tahun mendatang. Adapun Visi tersebut adalah :

**Terwujudnya Kabupaten Lima Puluh Kota Sejahtera dan Dinamis
“Yang Mantap” Berlandaskan Iman dan Taqwa.**

Pada Visi Kabupaten tersebut terdapat 4 (empat) kata kunci yaitu Sejahtera, Dinamis, “Mantap”, serta Iman dan Taqwa. **Sejahtera** adalah merupakan refleksi dari berkurangnya masyarakat miskin, meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat, meningkatnya kualitas hidup dan lingkungan, serta terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. **Dinamis** adalah gambaran suatu sikap yang responsif terhadap perubahan dan pembaharuan. **Mantap** adalah akronim dari Maju, Amanah, Bermartabat, dan Berpendidikan yang merupakan satu kesatuan kalimat yang menggambarkan sikap pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mandiri, terbuka, bisa dipercaya, dan punya harga diri dengan nilai-nilai keterpelajaran. Sedangkan **Iman dan Taqwa** merupakan persyaratan mutlak untuk dapat terwujudnya kehidupan agamais, serta untuk menjadikan masyarakat yang saleh dan taat pada tuntunan ajaran agama yang diyakini.

Upaya untuk mewujudkan visi menjadi daerah yang sejahtera dan dinamis yang ‘mantap berlandaskan iman dan taqwa yang telah dirumuskan diatas adalah melalui 6 Misi Pembangunan Daerah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, beradat dan berbudaya.
2. Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian dan reformasi kelembagaan berbasis masyarakat dengan pemanfaatan potensi daerah.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.

5. Memperkuat kelembagaan nagari untuk melaksanakan pembangunan berbasis jorong.
6. Meningkatkan infrastruktur untuk percepatan pembangunan dan daerah basis perjuangan.

Untuk terwujudnya visi dan misi tersebut di atas maka dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah 5 tahun ke depan. Sesuai dengan tugas dan kewenangan pada Bagian Kesra yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, yang menjadi tanggungjawab Bagian Kesra untuk menjabarkan misi ke dalam bentuk program dan kegiatan adalah pada misi pertama yaitu meningkatkan kualitas kehidupan beragama, beradat dan berbudaya. Adapun tujuan dan sasaran pada misi pertama ini adalah :

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas dan berkarakter dengan etos kerja tinggi dalam semangat kegotoroyongan, dengan sasaran-sasaran pembangunan sebagai berikut:
 - 1.1 Meningkatnya SDM yang cerdas, berkarakter, berintegritas dengan etos kerja tinggi dalam semangat kegotoroyongan.
2. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat, dengan sasaran-sasaran pembangunan sebagai berikut:
 - 2.1 Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat.
 - 2.2 Meningkatnya peran dan kualitas lembaga keagamaan dalam tata kehidupan masyarakat.
3. Penguatan peran lembaga adat dan pemangku adat dalam tata kehidupan masyarakat, dengan sasaran-sasaran pembangunan sebagai berikut:
 - 3.1 Meningkatnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai adat dalam kehidupan masyarakat.
4. Pengembangan dan pelestarian budaya, seni tradisional, dan situs cagar budaya, dengan sasaran-sasaran pembangunan sebagai berikut:
 - 4.1 Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam pelestarian budaya dan seni tradisional.

- 4.2 Meningkatnya sarana dan prasarana untuk pengembangan dan pelestarian budaya dan seni tradisional.

Selanjutnya juga telah ditetapkan beberapa kebijakan umum daerah, dimana yang terkait dengan misi pertama adalah Pemantapan upaya peningkatan pemahaman dan pelaksanaan nilai adat, budaya, pendidikan moral dan akhlak, revitalisasi budaya Minangkabau dalam kehidupan masyarakat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

Secara Umum tujuan yang ingin dicapai Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan visi dan misi Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan koordinasi perumusan kebijakan umum penyelenggaraan pemerintah daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat
2. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan aparatur pemerintah daerah dan pemerintah nagari yang bersih dan berwibawa
3. Meningkatkan kualitas koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintah secara internal dan eksternal
4. Meningkatkan kualitas pengendalian program dengan memanfaatkan sistem informasi
5. Mewujudkan pemahaman dan pengamalan *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*.

Secara khusus tujuan dan sasaran Renja ini dapat dilihat tujuan dan sasaran dari masing-masing bagian di lingkungan Sekretariat Daerah sebagai berikut :

1. Bagian PUM

A. Tujuan

Rencana Kerja Bagian Tata Pemerintahan Umum (TAPUM) bertujuan agar terselenggaranya penyusunan kebijakan dan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, serta pengkoordinasian lembaga dan perangkat daerah dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang kuat dan dinamis selaku pelaku pembangunan

sesuai dengan ketentuan pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

B. Sasaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai yaitu :

1. Peningkatan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Peningkatan harmonisasi hubungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan tokoh masyarakat, organisasi sosial kemasyarakatan.
3. Tertatanya pemerintahan dan sesuai dengan peruntukannya di seluruh daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota.
4. Peningkatan pemahaman kapasitas aparatur kecamatan se Kabupaten Lima Puluh Kota.
5. Peningkatan kualitas pelayanan publik di seluruh kecamatan se Kabupaten Lima Puluh Kota.
6. Terlaksananya evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah Pada aparatur Pemerintahan Kecamatan se Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Bagian Hukum

Renstra Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 2016-2021 yang merupakan Rencana strategis yang mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah mengarahkan Sumber Daya Daerah Khususnya Bagian Hukum pada Tugas dan fungsinya. Adapun tujuan Pembuatan Renja Bagian Hukum Sekretariat Daerah adalah untuk mengarahkan setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2020 sesuai dengan yang direncanakan dan tidak keluar dari fungsi Bagian Hukum.

Sasaran yang ingin dicapai untuk mewujudkan Manajemen Pemerintahan (Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Pelaporan) secara terintegrasi dan tepat waktu dengan basic data yang terkini dan akurat.

3. Bagian Organisasi

Bagian Organisasi merupakan bagian di lingkup Sekretariat Daerah yang bertugas untuk pengkoordinasian di bidang kelembagaan, analisa jabatan, analisa beban kerja, tatalaksana dan pengembangan kinerja. Maka tujuan Rencana Kerja Bagian Organisasi pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya penguatan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah
2. Terwujudnya kelembagaan yang efektif dan efisien
3. Terwujudnya kompetensi aparatur
4. Terwujudnya ketatalaksanaan yang baik dan teratur

Sasaran Renja Bagian Organisasi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas penyusunan LKiJP dan PK Pemda Kab. Lima Puluh Kota yang terukur dan tepat waktu
2. Meningkatnya penyusunan OPD, Tugas Pokok dan Fungsi yang efektif dan efisien
3. Meningkatnya kualitas penyusunan Tugas pokok dan fungsi pejabat struktural SKPD
4. Meningkatnya koordinasi penerapan SOP dan Standar Pelayanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
5. Meningkatnya kualitas penyusunan Analisis Jabatan, Analisa Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan
6. Meningkatnya kualitas ketatalaksanaan pada lingkup Ppemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

4. Bagian Kerjasama

Rencana Kerja Bagian Kerjasama disusun dengan tujuan Terwujudnya Penyelenggaraan Kerjasama Daerah dan Pembentukan Jaringan Komunikasi dan Rantau dengan Optimal sesuai dengan ketentuan pada peraturan dan perundang–undangan yang berlaku.

Adapun sasaran yang ingin dicapai yaitu :

1. Meningkatkan kualitas perumusan bahan kebijakan dan fasilitasi penyelenggaraan urusan Kerjasama Antar Daerah ;

2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Kerjasama baik antar pemerintah daerah, antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga maupun antara daerah dengan rantau melalui pembentukan jaringan komunikasi dan rantau ;
3. Meningkatkan kualitas perumusan bahan kebijakan dan fasilitasi Ranah dan Rantau.

5. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Bagian Pengadaan Barang/Jasa adalah yang berkaitan dengan proses perwujudan koordinasi pemerintahan dan otonomi daerah yang berkualitas, sehingga bisa mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkualitas.

Tujuan dan sasaran renja Bagian Pengadaan Barang/Jasa

Tujuan dari renja Bagian Pengadaan Barang/Jasa adalah menjaga konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan apa yang telah direncanakan di dalam rencana strategis bagian pengadaan barang/jasa. Sasaran yang ingin di capai adalah meningkatnya kapasitas dan manajemen ASN

6. Bagian Perekonomian

Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah adalah suatu tahapan yang penting dalam penyusunan Renstra yang menggambarkan tujuan dan sasaran jangka menengah dari Perangkat Daerah. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Dalam merumuskan tujuan harus mempertimbangan beberapa faktor diantaranya yaitu realistis dan dapat dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Berikut ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam perumusan tujuan pembangunan :

1. Diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi yang telah ditetapkan pada RPJMD. Untuk mewujudkan suatu misi, dapat dicapai melalui beberapa tujuan.

2. Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah.
3. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Berdasarkan penjelasan diatas maka tujuan dan sasaran jangka menengah Bagian Perekonomian pada tahun 2016-2021 memiliki 1 (satu) tujuan, 4 (empat) sasaran dan 11 (sebelas) indikator kinerja sebagaimana diuraikan di bawah ini.

1. Tujuan pertama adalah Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi perekonomian daerah

1. Sasaran pertama adalah Meningkatnya barang pokok yang dipantau harganya dalam tahun-n
 - Persentase pemantauan dalam pengendalian inflasi daerah
2. Sasaran Kedua adalah Meningkatnya jumlah UMK dan koperasi di kab.LPK
 - Persentase UKM dan Koperasi yang aktif
3. Sasaran Ketiga adalah Meningkatnya pengawasan dalam pengendalian pupuk dan pestisida bersubsidi
 - Persentase pupuk dan pestisida yang beredar

Tabel
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bagian Perekonomian Setda Tahun 2020

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi perekonomian daerah	Meningkatnya barang pokok yang dipantau harganya dalam tahun-n	Persentase pemantauan dalam pengendalian inflasi daerah	80%

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN
1	2	3	4	5
		Meningkatnya jumlah UMK dan koperasi di kab.LPK	Persentase UMK dan Koperasi yang aktif	80%
		Meningkatnya pengawasan dalam pengendalian pupuk dan pestisida bersubsidi	Persentase pupuk dan pestisida yang beredar	80%

7. Bagian Kesra

Renstra Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 2016-2021 yang merupakan Rencana strategis yang mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah mengarahkan Sumber Daya Daerah Khususnya Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Tugas dan fungsinya. Adapun tujuan Pembuatan Renja Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah adalah untuk mengarahkan setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2020 sesuai dengan yang direncanakan dan tidak keluar dari fungsi Bagian Kesejahteraan Rakyat.

Sasaran yang ingin dicapai untuk mewujudkan Manajemen Pemerintahan (Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Pelaporan) secara terintegrasi dan tepat waktu dengan basik data yang terkini dan akurat.

8. Bagian Umum

Berdasarkan tugas dan fungsinya Bagian Umum dan Perlengkapan telah menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam beberapa indikator kinerja dengan target sebagai berikut:

Tabel 3.2 Indikator Kinerja dan Target Pencapaian Renja 2020

No	Indikator kinerja	Target
1.	Persentase sarana dan prasarana KDH/ WKDH dalam kondisi baik	95 %
2.	Persentase ASN yang difasilitasi administrasi kepegawaiannya	95 %

3.	Persentase kegiatan KDH / WKDH yang terfasilitasi oleh protokoler	95 %
----	---	------

Sasaran dari rencana kerja yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatnya sarana dan prasarana KDH / WKDH dalam keadaan baik
2. Terlaksananya pelayanan administrasi kepegawaian ASN Sekretariat Daerah secara baik
3. Meningkatnya kegiatan KDH / WKDH yang dapat difasilitasi oleh protokoler.

9. Bagian Keuangan

Berdasarkan misi pembangunan tersebut, walaupun secara umum Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota terlibat dalam keseluruhan misi akan tetapi lebih spesifiknya keterlibatan Bagian Keuangan adalah pada misi Peningkatan penatausahaan keuangan mendukung tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah dalam pemerintahan

10. Bagian Humas

Tujuan strategis Bagian Humas dan Protokoler Setda Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut : “Mewujudkan dan memantapkan sistem administrasi kebijakan publik melalui kelembagaan Humas dan Protokol yang berkualitas serta penyelenggaraan keprotokoleran kada / wakil kada didukung dengan penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui kerja sama dengan media cetak dan elektronik, dokumentasi serta sandi dan telekomunikasi”.

Guna mencapai tujuan tersebut ditetapkan pula sasaran yang ingin dicapai adalah peningkatkan kualitas aparatur pegawai serta kerjasama hubungan kemitraan yang harmonis antara perangkat daerah, pers dan masyarakat dalam mensukseskan berbagai kebijakan program dan kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Sekretariat Daerah yang dimuat dalam Rencana Kerja tahun 2021 dimaksudkan untuk mendukung visi dan misi Bupati,

sementara nomenklatur program dan kegiatan mengacu kepada Permendagri No. 13 tahun 2006 dan Permendagri No. 59 tahun 2010 serta Permendagri No. 21 tahun 2011.

Faktor utama yang menjadi pertimbangan dalam hal penetapan Program/Kegiatan pada Rencana Kerja Sekretariat Daerah adalah terkait dengan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Tahun 2016-2021 dimana sesuai dengan fungsi dan tugas Sekretariat Daerah erat kaitannya dengan pencapaian misi ke-4, yaitu “Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik”.

Tabel. 3.3
Rekapitulasi Program dan Kegiatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa kebersihan kantor 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor 5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 7. Penyediaan makanan dan minuman 8. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 9. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran 10. Penyediaan jasa administrasi keuangan
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 2. Pengadaan peralatan gedung 3. Pengadaan mebeleur 4. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 5. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 6. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 7. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 8. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 9. Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan dan pelatihan formal 2. Bimtek Teknis Keprotokoleran 3. Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan

NO	PROGRAM	KEGIATAN
	Daya Aparatur	fungsi bagi PNS daerah 4. Pelatihan, Bimtek dan Workshop ULP
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2. Penyusunan laporan keuangan semesteran 3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
6.	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	1. Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat 2. Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Departemen / Lembaga Non Departemen 3. Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah 4. Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah 5. Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya 6. Peningkatan Kapasitas Kepala Daerah / KDH/WKDH (Lemhanas) 7. Layanan Keprotokolan Kunjungan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah
7.	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	1. Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah 2. Penyusunan Format Standar Administrasi Pengadaan Barang / Jasa 3. Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang/Jasa
8.	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	1. Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan 2. Penyusunan Rencana Kerja Peraturan Perundang-Undangan 3. Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 4. Publikasi Peraturan Perundang-Undangan 5. Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan 6. Evaluasi dan Pengawasan Produk Hukum Nagari 7. Diseminasi Aksi Nasional Hak Azasi Manusia (HAM)
9.	Program Reformasi Birokrasi	1. Penetapan Standar Pelayanan Publik 2. Kegiatan Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi 3. Penyusunan Pedoman Ketatalaksanaan Perangkat Daerah 4. Resrukturisasi / Penataan Tugas dan Fungsi SKPD

NO	PROGRAM	KEGIATAN
10.	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi/Pembentukan Perkuatan Kerjasama Antar Daerah pada Bidang Ekonomi 2. Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Dearah 3. Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga 4. Pendataan Perantau Kabupaten Lima Puluh Kota 5. Pembentukan dan Pembinaan Nagari Binaan Kerjasama Rantau 6. Pembuatan Jaringan Komunikasi Pemerintah Daerah dengan Perantau
11.	Program Peningkatan Pemahaman Keagamaan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan even-even keagamaan 2. Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) 3. Peningkatan Manajemen Organisasi dan Kompetensi Pembimbing Lembaga Didikan Subuh (LDS) 4. Safari Ramadhan 5. peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial
12.	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penamaan Rupa Bumi 2. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 3. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 4. Penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang penyelenggaraan dan pengaturan sistem pengendalian intern 5. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pengadaan Barang/Jasa 6. Penilaian dan Penyelesaian Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa 7. Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan APBD
13.	Program Pengembangan Nilai Budaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Nilai- nilai budaya dan keagamaan 2. Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya
14.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian Penghargaan bagi Camat Berprestasi 2. Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS 3. Penyusunan Analisis Jabatan
15.	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemdidikan dan Pelatihan PATEN bagi aparatur kecamatan 2. Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik
16.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi 2. Kegiatan Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD

NO	PROGRAM	KEGIATAN
	Kecil Menengah	
17.	Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM	1. Kegiatan koordinasi pemanfaatan fasilitasi pemerintah untuk usaha kecil menengah dan koperasi
18.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	1. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
19.	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang pertambangan	1. kegiatan koordinasi dan pendataan ttg hasil produksi dibidang pertambangan
20.	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	1. Kegiatan Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa
21.	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	1. Kegiatan peningkatan system dan jaringan informasi perdagangan
22.	Program pengembangan data/ informasi/ statistik daerah	1. Kegiatan pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah
23.	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	1. Kegiatan koordinasi antar lembaga dlm pengendalian investasi PMDN/ PMA
24.	Program pengembangan kemitraan	1. Kegiatan pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata
25.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
26.	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	1. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah 2. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah 3. Kegiatan Penyebarluasan Informasi yang

NO	PROGRAM	KEGIATAN
		bersifat penyuluhan bagi masyarakat
27.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat 2. Pelaksanaan pembinaan dan Lomba Lomba UKS
JML	27 Program	88 Kegiatan

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Sekretariat Daerah melaksanakan 27 Program dan 88 Kegiatan pada tahun 2021 yang dilaksanakan oleh 10 bagian di lingkup Sekretariat Daerah.

Sehubungan dengan perubahan nomenklatur pada Sekretariat Daerah dengan adanya Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Sekretariat Daerah, maka beberapa program dan Kegiatan yang pindah antar bagian; yaitu Kegiatan Bimbingan Teknis Keprotokolan dan Layanan Keprotokolan pindah ke Bagian Humas dan Protokoler yang sebelumnya ada di bagian Umum dan Perlengkapan, begitu juga kegiatan pada Kasubag administrasi Pembangunan pindah ke bagian Kerjasama, karena sub bagian dimaksud bergabung ke Bagian Kerjasama yang nomenklturnya berubah menjadi Bagian Kerjasama dan Administrasi pembangunan.

Dengan diterbitkannya Permendagri No 90 Tahun 2019 sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa penggolongan / pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju single codebase untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja keuangan.

Klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri No 90 Tahun 2019 merupakan perwujudan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang

didesentralisasikan sehingga pemanfaatannya akan sangat mendukung proses penyelenggaraan perencanaan dan penganggaran pemerintah, menindaklanjuti hal tersebut Sekretariat Daerah telah melakukan pemetaan terhadap Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2021, seperti table dibawah ini :

Tabel. 3.4
Rekapitulasi Program dan Kegiatan
Sesuai Permendagri No. 90 tahun 2019

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
SEKRETARIAT DAERAH			
I. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1. Administrasi Tata Pemerintahan	1 Penataan Administrasi Pemerintahan	
		2 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	
		3 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	
	2. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	4 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	
		5 Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	
			6 Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat
		3. Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah	7 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
			8 Fasilitasi Bantuan Hukum
		9 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	
		4. Fasilitasi Kerjasama Daerah	10 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		11 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri
	5. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	12 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
		13 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
		14 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil
	6. Administrasi Pembangunan	15 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
		16 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
	7. Pengadaan Barang dan Jasa	17 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
		18 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
	8. Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam	19 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan
		20 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
		21 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
II. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	9. Pelaksanaan Administrasi Umum	22 Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian
	10. Penataan Organisasi	23 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
		24 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
		25 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
	11. Protokol dan Komunikasi Pimpinan	26 Fasilitasi Keprotokolan
		27 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		28 Pendokumentasian Tugas Pimpinan
	12. Perencanaan dan Keuangan	29 Pengelolaan Keuangan
III. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	13. Administrasi Keuangan	30 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		31 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		32 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran
		33 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
	14. Administrasi Umum	34 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		35 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		36 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
		37 Penyediaan Alat Tulis Kantor
		38 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		39 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor
		40 Penyediaan Makanan dan Minuman
		41 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah
		42 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
		43 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan / Dinas
44 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		
45 Pengadaan Mebeleur		
46 Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan		
		47 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		48 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan
		49 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
		50 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
		51 Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Jabatan
		52 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
	15. Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	53 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
		54 Pendidikan dan Pelatihan Formal
		55 Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan
		56 Bimbingan Teknis Peraturan perundang- undangan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 RENCANA KERJA

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan serta mewujudkan efisiensi dan efektivitas alokasi anggaran yang berbasis kinerja. Sekretariat Daerah yang merupakan OPD dengan tugas menyelenggarakan penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif terhadap OPD dan seluruh perangkat daerah.

Dengan demikian Sekretariat Daerah mempunyai rencana kerja dan sasaran yang akan dicapai pada tahun 2021, dan Prakiraan Maju Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 yang diambil dari aplikasi e-Planning pusakoplan yang memuat Program dan Kegiatan, sebagaimana terlampir. Juga dilampirkan Tabel Rencana Program dan Kegiatan menurut Permendagri No 90 Tahun 2019 merupakan perwujudan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang didesentralisasikan sehingga pemanfaatannya akan sangat mendukung proses penyelenggaraan perencanaan dan penganggaran pemerintah, menindaklanjuti hal tersebut Sekretariat Daerah telah melakukan pemetaan terhadap Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2021.

4.2 PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Seluruh pendanaan kegiatan masing- masing bagian di Sekretariat Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Lima Puluh Kota tahun 2021, yang dapat dilihat pada Lampiran Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Tabel Rencana Program dan Kegiatan menurut Permendagri No 90 Tahun 2019 pada dokumen Rencana Kerja (Renja) tahun 2021 Sekretariat Daerah ini.

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

NAMA PERANGKAT DAERAH : SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN UMUM)

Lembar 1 dari 3

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Pemahaman Kapasitas Aparatur Pemerintahan		100%	61,223,000.00				62,447,460.00
0.00.00.05.08	Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah	Jumlah OPD yang mengikuti Blmtek Penyusunan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		40 OPD	61,223,000.00			40 OPD	62,447,460.00
	Jumlah OPD yang mengikuti Blmtek Penyusunan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	40 OPD	61,223,000.00	APBDKAB	IKU OPD		62,447,460.00
3.00.01.20.	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase peningkatan nilai akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah		100%	338,367,050.00				345,134,391.00
3.00.01.20.32	Penamaan Rupa Bumi	Jumlah dokumen data penamaan rupabumi 7 kecamatan (unsur budaya)		1 dokumen	96,349,300.00			1 dokumen	98,276,286.00
	Jumlah Dokumen Data Penamaan Rupabumi 7 Kecamatan (Unsur Budaya)		Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	1 Dokumen	96,349,300.00	APBDKAB	IKU OPD		98,276,286.00
3.00.01.20.37	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah			null	38,575,750.00				39,347,265.00
	Jumlah Buku Administrasi Kecamatan yang dicetak sesuai dengan aturan		Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	260 Buku	38,575,750.00	APBDKAB	IKU OPD		39,347,265.00
3.00.01.20.38	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah		180 buku	203,442,000.00			180 buku	207,510,840.00
	Jumlah Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	180 Buku	203,442,000.00	APBDKAB	IKU OPD		207,510,840.00
3.00.04.31.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Cakupan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah pada Aparatur Pemerintahan Kecamatan		100%	97,606,000.00				99,558,120.00

NAMA PERANGKAT DAERAH : SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN UMUM)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3.00.04.31.17	Pemberian penghargaan bagi camat berprestasi			3 Camat Terbaik	97,606,000.00			1 Dokumen	99,558,120.00
	Peringkat Penilaian Kompetensi Camat Tk. Kab. Lima Puluh Kota		Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	3 Camat Terbaik	97,606,000.00	APBDKAB	IKU OPD		99,558,120.00
4.00.01.16.	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	Tingkat Kelancaran Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		100%	621,644,600.00				634,077,492.00
4.00.01.16.01	Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat	Jumlah Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		1 Dokumen	194,988,000.00			1 Dokumen	198,887,760.00
	Jumlah Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	1 Dokumen	194,988,000.00	APBDKAB	IKU OPD		198,887,760.00
4.00.01.16.04	Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah	Jumlah Pelaksanaan rapat koordinasi pemerintah daerah dan rapat koordinasi camat se Kabupaten Lima Puluh Kota		12 kegiatan	130,126,000.00			12 kegiatan	132,728,520.00
	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah dan Rapat Koordinasi Camat se Kabupaten Lima Puluh Kota		Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	12 Kegiatan	130,126,000.00	APBDKAB	IKU OPD		132,728,520.00
4.00.01.16.06	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	Persentase Fasilitasi pelaksanaan kegiatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah		100%	296,530,600.00			100%	302,461,212.00
	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah		Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	100 %	296,530,600.00	APBDKAB	IKU OPD		302,461,212.00
4.00.01.23.	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Persentase Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan		100%	92,054,700.00				93,895,794.00
4.00.01.23.01	Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PATEN		13 Dokumen	28,477,300.00			40 OPD	29,046,846.00
	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PATEN		Sekretariat Daerah Kabupaten Lima	13 Dokumen	28,477,300.00	APBDKAB	IKU OPD		29,046,846.00

NAMA PERANGKAT DAERAH : SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN UMUM)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			Puluh Kota						
4.00.01.23.05	Pendidikan dan Pelatihan PATEN bagi Aparatur Kecamatan	Jumlah Kecamatan yang mengikuti Bimtek Pelaksanaan PATEN		13 Dokumen	63,577,400.00			13 Dokumen	64,848,948.00
	Jumlah Kecamatan yang mengikuti Bimtek Pelaksanaan PATEN		Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	13 Dokumen	63,577,400.00	APBDKAB	IKU OPD		64,848,948.00
4.00.01.26.	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase dokumen ketatalaksanaan yang disusun		85%	150,260,800.00				153,266,016.00
4.00.01.26.07	Koordinasi Penyusunan dan Penerapan SPM	Persentase OPD yang melaksanakan SPM		90%	150,260,800.00			12 Kali	153,266,016.00
	Persentase OPD yang melaksanakan SPM		Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	90 %	150,260,800.00	APBDKAB	IKU OPD		153,266,016.00
4.00.01.27.	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Cakupan Penataan Pemerintahan dan Daerah Sesuai dengan Peruntukan		100%	61,520,000.00				62,750,400.00
4.00.01.27.03	Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Penataan Tapal Batas		12 Kali	61,520,000.00			12 Kali	62,750,400.00
	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Penataan Tapal Batas		Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	12 Kali	61,520,000.00	APBDKAB	IKU OPD		62,750,400.00
Total					1,422,676,150.00				1,451,129,673.00

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

NAMA PERANGKAT DAERAH : SETDA (BAGIAN HUKUM)

Lembar 1 dari 2

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4.00.01.26.	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah produk hukum yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah		100 %	989,138,200.00				1,008,920,964.00
4.00.01.26.01	Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan	Jumlah Kasus yang difasilitasi penyelesaiannya.		3 kasus	256,573,200.00			4 kasus.	261,704,664.00
	Jumlah kasus yang difasilitasi penyelesaiannya		Kabupaten Lima Puluh Kota	3 Kasus	256,573,200.00	APBDKAB	IKU OPD		261,704,664.00
4.00.01.26.02	Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	Jumlah Rancangan Peraturan Kepala Daerah.		30 perbub	134,931,000.00			40 Peraturan Bupati dan 140 Keputusan Bupati.	137,629,620.00
	Jumlah rancangan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang dikaji sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi agar tidak bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi		Kabupaten Lima Puluh Kota	30 Perbub	134,931,000.00	APBDKAB	IKU OPD		137,629,620.00
4.00.01.26.03	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah Yang dilegislati		16 Rancangan	125,523,000.00			16 Rancangan Peraturan Daerah	128,033,460.00
	Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah yang dilegislati		Kabupaten Lima Puluh Kota	15 Perda	125,523,000.00	APBDKAB	IKU OPD		128,033,460.00
4.00.01.26.04	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Nagari dan Aparatur Pemerintah yang diberikan Penyuluhan Hukum		325 Aparatur	206,573,000.00			350 Aparatur Pemerintah	210,704,460.00
	Jumlah Nagari dan Aparatur Pemerintah yang diberikan Penyuluhan Hukum		Kabupaten Lima Puluh Kota	400 Aparatur Pemerintahan	206,573,000.00	APBDKAB	IKU OPD		210,704,460.00
4.00.01.26.05	Publikasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Produk Hukum Yang Dipublikasikan		1 Aplikasi dan	90,867,000.00			2 Aplikasi dan 80	92,684,340.00

NAMA PERANGKAT DAERAH : SETDA (BAGIAN HUKUM)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
								Buku Peraturan Perundang-Undangan	
	Jumlah Produk Hukum yang diplubikasikan		Kabupaten Lima Puluh Kota	1 Aplikasi	90,867,000.00	APBDKAB	IKU OPD		92,684,340.00
4.00.01.26.17	Evaluasi dan pengawasan produk hukum nagari	Jumlah Rancangan Peraturan Nagari yang dievaluasi		90 Rancangan	84,871,000.00			90 Rancangan Peraturan Nagari yang Dievaluasi	86,568,420.00
	Jumlah rancangan peraturan nagari yang dievaluasi		Kabupaten Lima Puluh Kota	90 Pernag	84,871,000.00	APBDKAB	IKU OPD		86,568,420.00
4.00.01.26.18	Diseminasi Aksi Nasional Hak Azasi Manusia (HAM)	Jumlah Aparatur Pemerintah dan Masyarakat yang mengikuti Diseminasi		60 Aparatur Pemerinta	89,800,000.00			60 Aparatur Pemerintah dan Masyarakat	91,596,000.00
	Jumlah Aparatur Pemerintah dan masyarakat yang mengikuti Diseminasi		Kabupaten Lima Puluh Kota	60 Aparatur Pemerintahan	89,800,000.00	APBDKAB	IKU OPD		91,596,000.00
Total					989,138,200.00				1,008,920,964.00

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

NAMA PERANGKAT DAERAH : SETDA (BAGIAN ORGANISASI)

Lembar 1 dari 2

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
0.00.00.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai komponen Akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah		Nilai BB	153,191,500.00				156,255,330.00
0.00.00.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Nilai LKjIP dan PK Kabupaten Lima Puluh Kota		2 Dokumen	153,191,500.00			2 Dokumen	156,255,330.00
	Nilai LKjIP dan PK Kabupaten Lima Puluh Kota		Kabupaten Lima Puluh Kota	2 Dokumen	153,191,500.00	APBDKAB	Prioritas Daerah		156,255,330.00
3.00.04.31.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase OPD yang memiliki dokumen analisis jabatan dan evaluasi jabatan		100%	203,446,000.00				207,514,920.00
3.00.04.31.06	Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS	jumlah dokumen analisis jabatan		100%	95,894,000.00			100%	97,811,880.00
	Jumlah Dokumen Analisis Jabatan OPD yang disusun		Kabupaten Lima Puluh Kota	16 Dokumen	95,894,000.00	APBDKAB	IKU OPD		97,811,880.00
3.00.04.31.18	Penyusunan Evaluasi Jabatan	Meningkatnya kemampuan aparatur dalam menyusun evaluasi jabatan		100%	107,552,000.00			100%	109,703,040.00
	Jumlah Dokumen Evaluasi Jabatan yang disusun		Kabupaten Lima Puluh Kota	1 Dokumen	107,552,000.00	APBDKAB	IKU OPD		109,703,040.00
4.00.01.35.	Program Reformasi Birokrasi	Persentase Peraturan perundang-undangan yang telah disosialisasikan		100%	251,606,000.00				256,674,840.00
4.00.01.35.01	Resrukturisasi / Penataan Tugas dan Fungsi SKPD	Ranperda/Perda perubahan OPD dan Ranperbup/Perbup penjabaran perubahan OPD		2 Dokumen	82,514,000.00			100%	84,164,280.00
	Ranperda/Perda OPD dan Ranperbup/Perbup Tupoksi OPD		Kabupaten Lima Puluh Kota	2 Dokumen	82,514,000.00	APBDKAB	IKU OPD		84,164,280.00
4.00.01.35.02	Penetapan Standar Pelayanan Publik	OPD yang telah menyusun Standar Pelayan dan SOP		80%	72,948,000.00			90%	74,443,680.00
	Monitoring ke OPD yang menerapkan Standar Pelayanan Publik, Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur		Kabupaten Lima Puluh Kota	3 Dokumen	72,948,000.00	APBDKAB	IKU OPD		74,443,680.00
4.00.01.35.06	Kegiatan Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi	Tersosialisasikannya Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota		100%	57,665,000.00			90%	58,818,300.00

NAMA PERANGKAT DAERAH : SETDA (BAGIAN ORGANISASI)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Sosialisasi dan monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi		Kabupaten Lima Puluh Kota	1 Dokumen	57,665,000.00	APBDKAB	IKU OPD		58,818,300.00
4.00.01.35.07	Penyusunan Pedoman Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	Dokumen Pedoman Ketatalaksanaan Perangkat Daerah		1 Dokumen	38,479,000.00			100%	39,248,580.00
	Ranperbup/Perbup ketatalaksanaan		Kabupaten Lima Puluh Kota	1 Perbup	38,479,000.00	APBDKAB	IKU OPD		39,248,580.00
Total					608,243,500.00				620,445,090.00

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

NAMA PERANGKAT DAERAH : SETDA (BAGIAN KERJASAMA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN)

Lembar 1 dari 2

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3.00.01.20.	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase OPD dengan realisasi anggaran diatas 80%		92%	97,735,500.00				100,667,565.00
3.00.01.20.09	Penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang penyelenggaraan dan pengaturan sistem pengendalian intern	Terlaksananya penyusunan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan APBD tahun 2022		1 Perbup	52,249,000.00			1 Perbup	53,816,470.00
	Terlaksananya penyusunan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan APBD tahun 2022		Kantor Bupati Lima Puluh Kota	1 Perbup	52,249,000.00	APBDKAB	IKU OPD		53,816,470.00
3.00.01.20.36	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan APBD	Rekapitulasi capaian kemajuan program/kegiatan SKPD per-bulan		96 buku	45,486,500.00			96 buku	46,851,095.00
	Rekapitulasi capaian kemajuan program/kegiatan SKPD per-bulan		Kantor Bupati Lima Puluh Kota	96 Buku	45,486,500.00	APBDKAB	IKU OPD		46,851,095.00
4.00.01.25.	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Persentase Kerjasama yang Terfasilitasi		88%	644,610,000.00				663,214,420.00
4.00.01.25.02	Fasilitasi/pembentukan perkuatan kerjasama antar daerah pada bidang ekonomi	Jumlah kerjasama antar daerah yang difasilitasi		10 MoA	150,770,000.00			10 MoA	155,293,100.00
	Jumlah kerjasama antar daerah yang difasilitasi		Kabupaten Lima Puluh Kota	10 MoA	150,770,000.00	APBDKAB	IKU OPD		155,293,100.00
4.00.01.25.05	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	Jumlah kesepakatan bersama yang difasilitasi		4 MoU	84,480,000.00			4 MoU	87,014,400.00
	Persentase kerjasama yang terfasilitasi		Kantor Bupati Lima Puluh Kota	4 MoU	84,480,000.00	APBDKAB	IKU OPD		87,014,400.00
4.00.01.25.06	Fasilitasi/pembentukan kerjasama dengan dunia usaha/lembaga	Jumlah kerjasama dengan pihak ketiga yang difasilitasi		6 MoA	135,972,000.00			8 MoA	140,051,160.00
	Jumlah kerjasama dengan pihak ketiga yang difasilitasi		Kantor Bupati Lima Puluh Kota	6 MoA	135,972,000.00	APBDKAB	IKU OPD		140,051,160.00
4.00.01.25.07	Pendataan Perantau Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah nagari yang di koordinir untuk mendata perantau		25 Nagari	100,000,000.00			34 Nagari	103,000,000.00
	Jumlah nagari yang di koordinir untuk mendata		Kantor Bupati Lima Puluh Kota	25 Nagari	100,000,000.00	APBDKAB	IKU OPD		103,000,000.00

NAMA PERANGKAT DAERAH : SETDA (BAGIAN KERJASAMA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN)

Lembar 2 dari 2

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	perantau								
4.00.01.25.08	Pembentukan dan Pembinaan Nagari Binaan Kerjasama Rantau	Jumlah nagari binaan yang difasilitasi dalam peningkatan kerjasama dengan perantau		8 Nagari	73,388,000.00			15 Nagari	74,855,760.00
	Jumlah nagari binaan yang difasilitasi dalam peningkatan kerjasama dengan perantau		Kantor Bupati Lima Puluh Kota	8 Nagari	73,388,000.00	APBDKAB	IKU OPD		74,855,760.00
4.00.01.25.09	Pembuatan Jaringan Komunikasi Pemerintah Daerah dengan Perantau	Jumlah kesepakatan kerjasama dengan perantau		5 MoU/MoA	100,000,000.00			8 MoU/MoA	103,000,000.00
	Jumlah kesepakatan kerjasama dengan perantau		Kantor Bupati Lima Puluh Kota	5 MoU / MoA	100,000,000.00	APBDKAB	IKU OPD		103,000,000.00
Total					742,345,500.00				763,881,985.00

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

NAMA PERANGKAT DAERAH : SETDA (BAGIAN PENGADAAN BARANG / JASA)

Lembar 1 dari 3

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3.00.01.20.	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase OPD dengan realisasi anggaran di atas 80 %		92 %	396,166,000.00				1,119,250,200.00
3.00.01.20.20	Penyusunan Format Standar Administrasi Pengadaan Barang / Jasa	1. Jumlah SOP dan Format Standar mengenai Pengadaan Barang dan Jasa, sesuai dengan Perpres 16 Tahun 2018 2. Jumlah ASN Jabfung PPBJ dan Personel UKPBJ yang dibina 3. Jumlah ASN Jabfung PPBJ yang dinilai angka kredit 4. Jumlah ASN yang ditingkatkan pengetahuan dalam PBJ 5. Jumlah variabel pengukuran tingkat kematangan UKPBJ 6. Jumlah Paket pembuatan system informasi PBJ		1. 4 2. 10 3. 3 4. 2 5. 4 6. 1	108,204,000.00			2 Format/SOP; 1 perbup; 7 ASN, 4 Nagari	239,750,000.00
	Tersedianya Format-Format yang dibutuhkan dalam Pengadaan Barang dan Jasa		Kantor Bupati Lima Puluh Kota Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah	2 format	108,204,000.00	APBDKAB	RUTIN OPD		239,750,000.00
3.00.01.20.33	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang/Jasa	Terlaksananya proses pemilihan penyedia barang/jasa pada UKPBJ dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui LPSE, tersedianya laporan mengenai proses dan hasil PBJ dan laporan mengenai pelaksanaan tugas UKPBJ, terlaksananya penilaian angka kredit terhadap ASN Jabfung PBJ, terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pemilihan penyedia barang dan jasa di UKPBJ		80 paket, 80 dokumen,	180,558,000.00			97 Paket	505,500,200.00
	Persentase terlaksananya pemilihan penyedia di UKPBJ sesuai dengan peraturan		Kantor Bupati Lima Puluh Kota Bagian	75 Paket	180,558,000.00	APBDKAB	RUTIN OPD		505,500,200.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	perundang-undangan		Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah						
3.00.01.20.34	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pengadaan Barang/Jasa	Terlaksananya kegiatan Monev Pengadaan Barang/Jasa, Tersedianya Dokumen laporan ke Pimpinan Monev Pengadaan Barang/Jasa		25 Paket	45,199,000.00			4 Dokumen	73,750,000.00
	Laporan triwulan monitoring pengadaan barang dan jasa		Kantor Bupati Lima Puluh Kota Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah	4 Kali	45,199,000.00	APBDKAB	RUTIN OPD		73,750,000.00
3.00.01.20.35	Penilaian dan Penyelesaian Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa	Terlaksananya penyelesaian permasalahan pengadaan barang dan jasa. terlaksananya koordinasi, konsultasi/kerjasama dengan LKPP dan Lembaga hukum dalam penyelesaian permasalahan pengadaan barang/jasa. terlaksananya peninjauan ke lapangan paket-paket pekerjaan pengadaan barang/jasa yang bermasalah.		2 permasalahan	62,205,000.00			10 permasalahan	300,250,000.00
	Terfasilitasinya permasalahan dalam pengadaan barang dan jasa		Kantor Bupati Lima Puluh Kota Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah	2 permasalahan	62,205,000.00	APBDKAB	RUTIN OPD		300,250,000.00
3.00.04.30.	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Persentase Aparatur UKPGJ yang ditingkatkan kapasitasnya		100%	65,109,000.00				110,200,000.00
3.00.04.30.05	Pelatihan, Bimtek dan Workshop ULP	Terlaksana nya pembinaan stakeholder melalui pelaksanaan bimtek bagi pengguna		1 Bimtek bagi OPD	65,109,000.00			2 Bimtek/ Diklat	110,200,000.00
	Bimtek/diklat peningkatan kompetensi yang diikuti personil ULP		Kantor Bupati Lima Puluh Kota Bagian Pengadaan Barang/Jasa	2 Bimtek	65,109,000.00	APBDKAB	RUTIN OPD		110,200,000.00

NAMA PERANGKAT DAERAH : SETDA (BAGIAN PENGADAAN BARANG / JASA)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			Sekretariat Daerah						
Total						461,275,000.00			1,229,450,200.00

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

NAMA PERANGKAT DAERAH : SETDA (BAGIAN PEREKONOMIAN)

Lembar 1 dari 3

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.02.05.17.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	persentase peningkatan koordinasi kegiatan sektor perekonomian		90%	42,306,000.00				43,152,120.00
1.02.05.17.16	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	jumlah laporan koordinasi, konsultasi, monitoring dan evaluasi permasalahan konservasi SDA		2	42,306,000.00			95%	43,152,120.00
	persentase kegiatan evaluasi dan pelaporan SDA		Kabupaten Lima Puluh Kota	90 %	42,306,000.00	APBDKAB	IKU OPD		43,152,120.00
1.02.11.16.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	persentase peningkatan koordinasi kegiatan sektor perekonomian		80%	105,309,000.00				107,415,180.00
1.02.11.16.05	Fasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil produksi	jumlah pelaksanaan event pameran		3 event	85,520,000.00			4 event	87,230,400.00
	Jumlah event pameran yang dilaksanakan dalam tahun-n		Kabupaten Lima Puluh Kota	3 Even	85,520,000.00	APBDKAB	IKU OPD		87,230,400.00
1.02.11.16.07	Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD	jumlah koperasi pegawai yang dikoordinasikan		30 PKP-RI	19,789,000.00			32 PKP-RI	20,184,780.00
	persentase kehadiran dan pemahaman peserta dalam memahami materi		Kabupaten Lima Puluh Kota	90 %	19,789,000.00	APBDKAB	IKU OPD		20,184,780.00
1.02.11.17.	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	persentase peningkatan koordinasi kegiatan sektor perekonomian		85%	49,080,000.00				50,061,600.00
1.02.11.17.03	Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi	terlaksananya koordinasi kegiatan pengawasan dan penyaluran dana pemerintah		5 kali pertemuan	49,080,000.00			90%	50,061,600.00
	persentase kegiatan monitoring UKM dan Koperasi		Kabupaten Lima Puluh Kota	90 %	49,080,000.00	APBDKAB	IKU OPD		50,061,600.00
1.02.12.15.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase Peningkatan Koordinasi kerjasama dan promosi Investasi		80%	49,710,500.00				50,704,710.00
1.02.12.15.04	Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/ PMA	jumlah perusahaan daerah dan BPR yang dibina dan dikoordinasikan		2 BUMD, 6 BPR	49,710,500.00			85%	50,704,710.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	persentase pelaksanaan kegiatan pengawasan PMDN yang ada		Kabupaten Lima Puluh Kota	90 %	49,710,500.00	APBDKAB	IKU OPD		50,704,710.00
1.02.14.15.	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Persentase kualitas pelaporan data statistik daerah		90%	25,692,000.00				26,205,840.00
1.02.14.15.02	Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah	Jumlah buku potensi ekonomi daerah tahun-n		50 buku	25,692,000.00			55 buku	26,205,840.00
	jumlah pembuatan buku potensi ekonomi daerah yang tercetak		Kabupaten Lima Puluh Kota	70 Buku	25,692,000.00	APBDKAB	IKU OPD		26,205,840.00
2.00.02.17.	Program Pengembangan Kemitraan	Persentase peningkatan jumlah kemitraan yang dikoordinasikan		80%	23,149,000.00				23,611,980.00
2.00.02.17.05	Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata	Jumlah koordinasi, konsultasi dan rapat-rapat kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif		12 kali	23,149,000.00			15 kali	23,611,980.00
	persentase kegiatan koordinasi pengembangan ekonomi kreatif dan geopark		Kabupaten Lima Puluh Kota	90 %	23,149,000.00	APBDKAB	IKU OPD		23,611,980.00
2.00.05.15.	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	Persentase pelaksanaan Pengawasan bidang pertambangan		80%	26,303,000.00				26,829,060.00
2.00.05.15.04	Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi dibidang pertambangan	jumlah koordinasi, konsultasi dan rapat-rapat permasalahan migas		12 kali	26,303,000.00			15 kali	26,829,060.00
	persentase pemantauan dan pengawasan migas bersubsidi yang beredar		Kabupaten Lima Puluh Kota	85 %	26,303,000.00	APBDKAB	IKU OPD		26,829,060.00
2.00.06.15.	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	Persentase peningkatan koordinasi dalam perlindungan konsumen dan perdagangan		80%	443,972,000.00				452,851,440.00
2.00.06.15.03	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	persentase koordinasi kegiatan DBH-CHT dan pengawasan distribusi pupuk dan pestisida bersubsidi		kantor bea cukai	443,972,000.00			95%	452,851,440.00
	persentase kegiatan pemantauan dana DBH-CHT dan pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi		Kabupaten Lima Puluh Kota	90 %	443,972,000.00	APBDKAB	IKU OPD		452,851,440.00
2.00.06.18.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri	Persentase pelaksanaan sosialisasi sistem jaringan informasi		80%	86,241,000.00				87,965,820.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		perdagangan							
2.00.06.18.06	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	persentase kegiatan pemantauan komoditi beredar		90%	86,241,000.00			15 kali.	87,965,820.00
	persentase kegiatan pemantauan komoditi beredar		Kabupaten Lima Puluh Kota	90 %	86,241,000.00	APBDKAB	IKU OPD		87,965,820.00
Total						851,762,500.00			868,797,750.00

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

NAMA PERANGKAT DAERAH : SETDA (BAGIAN KESRA)

Lembar 1 dari 2

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.01.06.21.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan yg terkoordinasi		6 kali	164,371,000.00				167,658,420.00
1.01.06.21.02	Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah rapat koodinasi yang dilaksanakan dengan stakeholders, rapat koordinasi dengan provinsi dan rapat koordinasi dengan pusat		9 kali	50,094,000.00			10 kali	51,095,880.00
	Koordinasi dengan seluruh stakeholders Tk. Kabupaten, Provinsi dan Nasional		Kab. Lima Puluh Kota	9 Kali	50,094,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		51,095,880.00
1.01.06.21.03	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial	Jumlah Wirid dan Senam Pagi yg terselenggara		22 kali wirid dan	35,878,000.00			22 kali wirid dan 22 kali senam	36,595,560.00
	Pelaksanaan Wirid dan Senam Pagi Setiap JUmam		Kab Lima Puluh Kota	44 Kali	35,878,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		36,595,560.00
1.01.06.21.10	Pelaksanaan pembinaan dan lomba - lomba UKS	Jumlah UKS yg dibina dan dinilai pada Sekolah untuk LSS Tingkat Kabupaten dan Propinsi		56 Sekolah	78,399,000.00			56 Sekolah	79,966,980.00
	Pelaksanaan Lomba - lomba dan Pembinaan Sekolah Sehat		Kab. Lima Puluh Kota	56 Sekolah	78,399,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		79,966,980.00
1.02.16.15.	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah Jemaah Haji dan TPHD yang difasilitasi ; Jumlah Guru Mengaji / Fasilitator Baliak Basurau yang difasilitasi ; Jumlah masjid/mushalla yang dibantu		360 Jamaah , 1 TPHD, 3050 orang Guru Mengaji, 107 masjid/mushalla	2,793,760,000.00				2,849,635,200.00
1.02.16.15.05	Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya dan keagamaan	Jumlah Jamaah haji dan TPHD yg di Fasilitas Pemberangkatan dan Pemulangannya		360 Jamaah dan 1 TPHD	360,620,000.00			370 Jamaah	367,832,400.00
	Fasilitas Pemberangkatan dan Pemulangan Jamah Haji dan TPHD Kab.Lima Puluh Kota		Kab.Lima Puluh Kota	360 Orang	360,620,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		367,832,400.00
1.02.16.15.10	Peningkatan nilai-nilai budaya dan keagamaan	Jumlah Guru Surau, TPQ, MDTA dan Imam serta Garin Masjid yg di fasilitas serta jumlah masjid/ mushalla yang diberi		350 Orang dan 107	2,433,140,000.00			3100 orang	2,481,802,800.00

NAMA PERANGKAT DAERAH : SETDA (BAGIAN KESRA)

Lembar 2 dari 2

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		bantuan							
	Fasilitasi terhadap Gruru- guru TPQ, MDTA, Surau serta Imam dan Garin		Kab.Lima Puluh Kota	3050 Orang	2,433,140,000.00	APBDKAB	IKU OPD		2,481,802,800.00
4.00.01.28.	Program Peningkatan Pemahaman Keagamaan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Keagamaan yg terfasilitasi		8 Kegiatan	1,244,836,000.00				887,074,740.00
4.00.01.28.02	Penyelenggaraan even-even keagamaan	Jumlah Kafilah yg terfasilitasi untuk mengikuti iven MTQ Tingkat Propinsi		150 Orang	1,110,449,000.00			1 Kegiatan	750,000,000.00
	Fasilitasi terhadap Kafilah MTQ Kab.Lima Puluh Kota untuk mengikuti MTQ Tingkat Propinsi		Kab.Lima Puluh Kota	150 Orang	1,110,449,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		750,000,000.00
4.00.01.28.04	Peningkatan Manajemen Organisasi dan Kopetensi Pembimbing Lembaga Didikan Subuh	Jumlah Lomba LDS Tingkat Kabupaten dan Propinsi yg di bina dan di Nilai		13 LDS	52,387,000.00			13 LDS	53,434,740.00
	Penilaian dan Pembinaan Lembaga Didikan Subuh berprestasi		Kab.Lima Puluh Kota	13 Lembaga	52,387,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		53,434,740.00
4.00.01.28.06	Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)	Jumlah Peringatan Hari Besar Ismam (PHBI) yg terfasilitasi		6 kali	82,000,000.00			6 kali	83,640,000.00
	Peringatan dan Perayaan Hari - hari besar Islam		Kab.Lima Puluh Kota	6 Kali	82,000,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		83,640,000.00
4.00.01.33.	Program Pembinaan Keagamaan Masyarakat	Persentase Kegiatan Keagamaan yg terfasilitasi		100 %	195,335,000.00				199,241,700.00
4.00.01.33.01	Safari Ramadhan	Jumlah Masjid yg di kunjungi oleh Tim Safari Ramadhan		79 Masjid	195,335,000.00			79 Masjid	199,241,700.00
	Fasilitasi Tim Ramadhan Kab. Lima Puluh Kota		Kab.Lima Puluh Kota	79 Unit	195,335,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		199,241,700.00
Total					4,398,302,000.00				4,103,610,060.00

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

NAMA PERANGKAT DAERAH : SETDA (BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN)

Lembar 1 dari 4

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya pelayanan kegiatan KDH / WKDH		98%	5,797,229,950.00				5,913,174,549.00
0.00.00.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya perlengkapan surat menyurat dan benda pos lainnya		12 bulan	24,000,000.00			100%	24,480,000.00
	Persentase terpenuhinya peralatan surat menyurat dan benda pos lainnya		Kabupaten Lima Puluh Kota	95 %	24,000,000.00	APBDKAB	IKU OPD		24,480,000.00
0.00.00.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Persentase terbayarnya biaya komunikasi, sumber daya air, listrik dan telepon		99%	794,400,000.00			100%	810,288,000.00
	Persentase terbayarnya biaya komunikasi, sumber daya air, listrik dan telepon		Kabupaten Lima Puluh Kota	90 %	794,400,000.00	APBDKAB	IKU OPD		810,288,000.00
0.00.00.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya dana kegiatan jasa kebersihan kantor		97%	344,400,000.00			100%	351,288,000.00
	Persentase terpenuhinya alat kebersihan kantor		Kabupaten Lima Puluh Kota	100 %	344,400,000.00	APBDKAB	IKU OPD		351,288,000.00
0.00.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor sesuai kebutuhan		12 bulan	58,261,950.00			100%	59,427,189.00
	Persentase terpenuhinya alat tulis kantor sesuai dengan kebutuhan		Kabupaten Lima Puluh Kota	99 %	58,261,950.00	APBDKAB	IKU OPD		59,427,189.00
0.00.00.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan sesuai kebutuhan		12 bulan	71,800,000.00			100%	73,236,000.00
	Persentase terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan sesuai dengan kebutuhan		Kabupaten Lima Puluh Kota	95 %	71,800,000.00	APBDKAB	IKU OPD		73,236,000.00
0.00.00.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor dan rumah dinas		12 bulan	108,000,000.00			100%	110,160,000.00
	Persentase terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dan rumah dinas		Kabupaten Lima Puluh Kota	99 %	108,000,000.00	APBDKAB	IKU OPD		110,160,000.00

NAMA PERANGKAT DAERAH : SETDA (BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
0.00.00.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Persentase terpenuhinya makan minum KDH / WKDH, tamu, dan rapat - rapat		99%	1,404,968,000.00			100%	1,433,067,360.00
	Persentase terpenuhinya makan minum KDH/WKDH, tamu dan rapat-rapat		Kabupaten Lima Puluh Kota	90 %	1,404,968,000.00	APBDKAB	IKU OPD		1,433,067,360.00
0.00.00.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah sesuai kebutuhan		98%	2,505,700,000.00			100%	2,555,814,000.00
	Persentase terikutinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah sesuai kebutuhan		Kabupaten Lima Puluh Kota	100 %	2,505,700,000.00	APBDKAB	IKU OPD		2,555,814,000.00
0.00.00.01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran	Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi / teknis perkantoran Setda		12 bulan	485,700,000.00			100%	495,414,000.00
	Persentase terpenuhinyan jasa tenaga pendukung ADM/teknis perkantoran Setda		Kabupaten Lima Puluh Kota	99 %	485,700,000.00	APBDKAB	IKU OPD		495,414,000.00
0.00.00.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur		95%	6,310,579,700.00				6,436,791,294.00
0.00.00.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas / operasional		5 unit	1,241,120,500.00			100%	1,265,942,910.00
	Jumlah kendaraan dinas yang terpenuhi		Kabupaten Lima Puluh Kota	3 Unit	1,241,120,500.00	APBDKAB	IKU OPD		1,265,942,910.00
0.00.00.02.08	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Persentase terpenuhinya pengadaan peralatan rumah jabatan / dinas		97%	706,378,000.00			100%	720,505,560.00
	Persentase terpenuhinya peralatan rumah jabatan / dinas		Kabupaten Lima Puluh Kota	90 %	706,378,000.00	APBDKAB	IKU OPD		720,505,560.00
0.00.00.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya sarana peralatan gedung kantor		97%	600,035,000.00			100%	612,035,700.00
	Persentase terpenuhinya peralatan gedung kantor		Kabupaten Lima Puluh Kota	85 %	600,035,000.00	APBDKAB	IKU OPD		612,035,700.00
0.00.00.02.10	Pengadaan mebeleur	Terlaksananya dan tersedianya penyediaan mebeleur untuk kantor, rumah jabatan / dinas dan Mess Pemda		97%	299,340,000.00			100%	305,326,800.00
	Persentase terpenuhinya mebeleur kantor		Kabupaten Lima Puluh Kota	100 %	299,340,000.00	APBDKAB	IKU OPD		305,326,800.00
0.00.00.02.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Persentase terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas		95%	540,000,000.00			100%	550,800,000.00

NAMA PERANGKAT DAERAH : SETDA (BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Persentase terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas		Kabupaten Lima Puluh Kota	90 %	540,000,000.00	APBDKAB	IKU OPD		550,800,000.00
0.00.00.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor		95%	420,250,000.00			100%	428,655,000.00
	Persentase terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		Kabupaten Lima Puluh Kota	100 %	420,250,000.00	APBDKAB	IKU OPD		428,655,000.00
0.00.00.02.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan		12 bulan	844,000,000.00			100%	860,880,000.00
	Persentase terlaksananya pemeliharaan mobil jabatan		Kabupaten Lima Puluh Kota	97 %	844,000,000.00	APBDKAB	IKU OPD		860,880,000.00
0.00.00.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional		12 bulan	812,411,200.00			100%	828,659,424.00
	Persentase terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional		Kabupaten Lima Puluh Kota	95 %	812,411,200.00	APBDKAB	IKU OPD		828,659,424.00
0.00.00.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor		12 bulan	283,300,000.00			100%	288,966,000.00
	Persentase terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		Kabupaten Lima Puluh Kota	98 %	283,300,000.00	APBDKAB	IKU OPD		288,966,000.00
0.00.00.02.40	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Persentase terlaksananya rehabilitasi sedang / berat rumah jabatan		95%	563,745,000.00			100%	575,019,900.00
	Persentase terlaksananya rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan		Kabupaten Lima Puluh Kota	90 %	563,745,000.00	APBDKAB	IKU OPD		575,019,900.00
0.00.00.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase terpenuhinya pelayanan kegiatan KDH / WKDH		95%	311,000,000.00				317,220,000.00
0.00.00.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Persentase terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		95%	311,000,000.00			100%	317,220,000.00
	Persentase terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		Kabupaten Lima Puluh Kota	90 %	311,000,000.00	APBDKAB	IKU OPD		317,220,000.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase terikutinya pelatihan peningkatan SDM		100%	63,100,000.00				64,362,000.00
0.00.00.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya pendidikan formal bagi PNS Daerah		20 kali	63,100,000.00			100%	64,362,000.00
	Jumlah pendidikan dan pelatihan yang terikuti oleh aparatur		Kabupaten Lima Puluh Kota	15 Kali	63,100,000.00	APBDKAB	IKU OPD		64,362,000.00

NAMA PERANGKAT DAERAH : SETDA (BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4.00.01.16.	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	Persentase terpenuhinya kegiatan KDH / WKDH		98%	891,684,700.00				909,518,394.00
4.00.01.16.02	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri	Persentase terpenuhinya layanan kunjungan kerja pejabat negara / departemen / lembaga pemerintah non departemen		96%	490,637,500.00			100%	500,450,250.00
	Persentase terpenuhinya layanan kunjungan kerja pejabat negara / departemen / lembaga pemerintah non departemen		Kabupaten Lima Puluh Kota	90 %	490,637,500.00	APBDKAB	IKU OPD		500,450,250.00
4.00.01.16.05	Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah	Terselenggaranya kegiatan inspeksi KDH / WKDH		280 kali	240,000,000.00			100%	244,800,000.00
	Terselenggaranya kegiatan inspeksi KDH / WKDH		Kabupaten Lima Puluh Kota	280 Kali	240,000,000.00	APBDKAB	IKU OPD		244,800,000.00
4.00.01.16.08	Peningkatan Kapasitas Kepala Daerah/KDH dan Wakil KDH (LEMHANAS)	Terlaksananya Diklat Kepemimpinan KDH / WKDH beserta istri		4 Orang	161,047,200.00			100%	164,268,144.00
	Terlaksananya Diklat Kepemimpinan KDH / WKDH beserta istri		Kabupaten Lima Puluh Kota	6 Orang	161,047,200.00	APBDKAB	IKU OPD		164,268,144.00
Total					13,373,594,350.00				13,641,066,237.00

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

NAMA PERANGKAT DAERAH : SETDA (BAGIAN KEUANGAN)

Lembar 1 dari 1

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya pelayanan kegiatan KDH/ WKDH		100%	752,715,200.00				767,769,504.00
0.00.00.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelola administrasi keuangan yang terbayarkan honorinya		12 bulan	752,715,200.00			100%	767,769,504.00
	Jumlah Pengelola administrasi keuangan yang terbayarkan honorinya		Kabupaten Lima Puluh Kota	12 Bulan	752,715,200.00	APBDKAB	IKU OPD		767,769,504.00
0.00.00.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Sekretaris Daerah		75	46,847,000.00				47,783,600.00
0.00.00.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis yang selesai Tepat Waktu		1 Dokumen	23,217,000.00			75	23,681,000.00
	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis yang selesai Tepat Waktu		Kabupaten Lima Puluh Kota	1 Dokumen	23,217,000.00	APBDKAB	IKU OPD		23,681,000.00
0.00.00.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang selesai Tepat Waktu		1 Dokumen	23,630,000.00			75	24,102,600.00
	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang selesai Tepat Waktu		Kabupaten Lima Puluh Kota	1 Dokumen	23,630,000.00	APBDKAB	IKU OPD		24,102,600.00
Total					799,562,200.00				815,553,104.00

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

NAMA PERANGKAT DAERAH : SETDA (BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOLER)

Lembar 1 dari 2

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase terikutinya pelatihan peningkatan SDM		100%	68,805,600.00				70,181,712.00
0.00.00.05.06	Bimtek Teknis Keprotokoleran	Terlaksananya bimtek keprotokol untuk OPD dan terikutinya bimtek keprotokol di dalam dan di luar daerah		4 kali	68,805,600.00			5 kali	70,181,712.00
	Terlaksananya bimtek untuk OPD se Kab.Lima Puluh Kota, Terlaksananya lomba MC tk OPD se Kab.Lima Puluh Kota, Terikutinya Bimtek Keprotokol di dalam dan luar daerah		Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	100 %	68,805,600.00	APBDKAB	IKU OPD		70,181,712.00
1.02.10.15.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase kegiatan Pemerintah Daerah yang terpublikasikan		100%	103,714,200.00				105,788,484.00
1.02.10.15.02	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	-Terlaksananya sosiasiasi Bakohumas Kabupaten Lima Puluh Kota, Terikutinya pertemuan Bakohumas dan PIN tingkat Nasional		4 kali kegiatan,	103,714,200.00			4 kali kegiatan	105,788,484.00
	Persentase terpublikasinya kegiatan Pemerintah Daerah melalui kegiatan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) daerah dan nasional serta melalui website Bagian Humas dan Pemberitaan Setda		Sekretariat Daerah kabupaten Lima Puluh Kota	100 %	103,714,200.00	APBDKAB	IKU OPD		105,788,484.00
1.02.10.18.	Program kerjasama informasi dan media massa	Persentase kegiatan Pemerintah Daerah yang terpublikasikan		100%	1,606,275,378.00				1,638,400,886.00
1.02.10.18.01	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Tersedianya media cetak harian lokal/nasional dan mingguan serta majalah nasional. -Kegiatan Jumpa Pers. - Penerbitan liputan khusus/ adventorial di media cetak/ online. -Peliputan kegiatan kepala daerah di dalam maupun luar daerah		7 Media harian	665,827,600.00			7 media harian dan 25 media mingguan, 12 kali jumpa pers	679,144,152.00

NAMA PERANGKAT DAERAH : SETDA (BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOLER)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Persentase kegiatan Pemerintah Daerah yang terpublikasikan melalui media cetak dan elektronik		Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	100 %	665,827,600.00	APBDKAB	IKU OPD		679,144,152.00
1.02.10.18.02	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	-Terbitnya media internal Kabupaten Lima Puluh Kota		12 kali terbit,	678,006,528.00			6 kali cetak/1.000 eks	691,566,659.00
	Persentase kegiatan Pemerintah Daerah yang terpublikasikan melalui media internal Pemkab "Tabloid Sinamar" serta pemberitaan daerah di media cetak dan elektronik		Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	100 %	678,006,528.00	APBDKAB	IKU OPD		691,566,659.00
1.02.10.18.03	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	- Terlaksananya kegiatan penyebarluasan informasi melalui spanduk/ baliho penyampaian informasi informasi. - Terdokumentasinya kegiatan kepala daerah		8 kali, 750 m spanduk,	262,441,250.00			- 8 kali, 750 meter spanduk, 25 buah baliho	267,690,075.00
	Tersebarnya informasi pembangunan melalui mobil unit keliling serta spanduk /baliho pembangunan		Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	100 %	262,441,250.00	APBDKAB	IKU OPD		267,690,075.00
4.00.01.16.	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	Persentase terpenuhinya kegiatan KDH/WKDH		100%	203,536,000.00				207,606,720.00
4.00.01.16.09	Layanan Keprotokoler Kunjungan Kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Terselenggaranya kegiatan-kegiatan kepala daerah/wakil kepala daerah sesuai dengan aturan dan tata keprotokolan yang berlaku		365 kali	203,536,000.00			365 kali	207,606,720.00
	Terselenggaranya kegiatan-kegiatan Kada/Wakil Kada sesuai dengan aturan dan tata keprotokolan yang berlaku		Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	100 %	203,536,000.00	APBDKAB	IKU OPD		207,606,720.00
Total					1,982,331,178.00				2,021,977,802.00

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.40.00 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.40.00 SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Praktisan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan								
4 01 01 203 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya alat tulis kantor sesuai dengan kebutuhan	Persentase pelaksanaan Administrasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Sumatera Selatan, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	100 %	70.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	80.500.000	
4 01 01 203 11	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya barang cetak dan pengandaan sesuai dengan kebutuhan	Persentase pelaksanaan Administrasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	100 %	80.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	92.000.000	
4 01 01 203 12	Instalasi Listrik/Pencangan Bangunan Kantor	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Terbnyanya komponen Instalasi listrik dan penerangan kantor dan rumah dinas	Persentase pelaksanaan Administrasi Umum	Sumatera Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	115.000.000	
4 01 01 203 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya makan minum KDH /WKDH, tamu dan rapat-rapat, terfasilitasinya kunjungan kerja pejabat negara / departemen / lembaga pemerintah non departemen / luar negeri, dan terfasilitasinya kegiatan kunjungan kerja / inspeksi KDH / WKDH	Persentase pelaksanaan Administrasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	90 %	100 %	1.850.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.127.500.000	
4 01 01 203 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terikutinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah sesuai kebutuhan	Persentase pelaksanaan Administrasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	95 %	100 %	2.500.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.875.000.000	
4 01 01 203 20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan dinas yang terpenuhi	Persentase pelaksanaan Administrasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Unit	100 %	1.000.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.150.000.000	
4 01 01 203 23	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya peralatan rumah jabatan / dinas	Persentase pelaksanaan Administrasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	90 %	100 %	824.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	947.600.000	
4 01 01 203 24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya peralatan gedung kantor	Persentase pelaksanaan Administrasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	90 %	100 %	550.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	632.500.000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.40.00 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.40.00 SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Praktiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)						
						Target Program	Keluaran Sub Kegiatan					Hasil Kegiatan	Tolok Ukur	Target
4	01	01	2.03	25	Pengadaan Mebelur	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Senua Kecamatan, Senua Kelurahan	100 %	95 %	100 %	650,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100 %	747,500,000
4	01	01	2.03	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Senua Kecamatan, Senua Kelurahan	100 %	90 %	100 %	540,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100 %	621,000,000
4	01	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Senua Kecamatan, Senua Kelurahan	100 %	90 %	100 %	420,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100 %	483,000,000
4	01	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Senua Kecamatan, Senua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	850,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100 %	977,500,000
4	01	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Senua Kecamatan, Senua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	810,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100 %	931,500,000
4	01	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perengkapan Gedung Kantor	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Senua Kecamatan, Senua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	280,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100 %	322,000,000
4	01	01	2.03	36	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Senua Kecamatan, Senua Kelurahan	100 %	90 %	100 %	550,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100 %	632,500,000
4	01	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					711,482,000				816,204,300
4	01	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Senua Kecamatan, Senua Kelurahan	100 %	90 %	100 %	300,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100 %	345,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.40.00 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.40.00 SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Praktisan Maju Rencana Tahun 2022						
						Target Capaian Kinerja		Target				Target Capaian Kinerja		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan					Hasil Kegiatan	Target					
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Persentase terlaksananya koordinasi bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Buku Administrasi Kecamatan yang dicetak sesuai dengan aturan Jumlah Dokumen Data Pemetaan Rupabumi 7 Kecamatan (Unsur Budaya) Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PATEN Jumlah Fasilitas: Kegiatan Penataan tapal Batas Jumlah Kecamatan yang mengikuti Bimtek Pelaksanaan PATEN Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi Pemde dan Rapat koordinasi camat se- Kabupaten Peringkat Penilaian Kompetensi Camat Tk. Kab. Lima Puluh Kota Persentase Fasilitas Pelaksanaan Kegiatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.	Persentase terlaksananya koordinasi bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua kelurahan	100 %	260 Buku 1 Dokumen 13 Dokumen 12 Kegiatan 13 Kecamatan 12 Kegiatan 3 Peringkat Terbaik 100 %	100 %	812.762.350	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya koordinasi bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 %	934.676.702
4	01	02	2.01	03	Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase terlaksananya koordinasi bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen LKPI, LPPD, ILPPD dan EKPPD Jumlah OPD yang mengikuti Bimtek Penyusunan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Persentase OPD yang melaksanakan SPM	Persentase terlaksananya koordinasi bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua kelurahan	100 %	180 Buku 40 OPD 90 %	100 %	414.925.800	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya koordinasi bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 %	477.164.670
4	01	02	2.02		Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				5.284.621.033								6.054.314.188	
4	01	02	2.02	01	Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Persentase terlaksananya koordinasi bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah guru Surau, TPQ, MDTA dan Iman serta Gharin Masjid Jumlah Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) dan Lembaga Didikan Subuh yang terfasilitasi Terfasilitasi kafilah untuk mengikuti MIQ Tk. Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Tersedianya hibah untuk masjid/mushala dan lembaga keagamaan (Baznas, MUI, LPTQ, DMI dan FKDT)	Terkoordinirnya perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan evaluasi kegiatan ruang lingkup Ketra	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua kelurahan	100 %	3060 Orang 20 Kegiatan 150 Orang 33 Masjid, Lembaga	90 %	4.544.295.033	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya koordinasi bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 %	5.225.939.288

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.40.00 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.40.00 SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2021		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Praktikan Maju Rencana Tahun 2022					
						Target Capaian Kinerja					Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan									
4	01	02	2.02	02	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan dan dihadiri pada tingkat provinsi dan pusat Jumlah UKS yang dibina dan dinilai pada seluruh untuk LSS tingkat Kab. Dan Provinsi Jumlah Wrd dan Senam Pagi yang diselenggarakan	Terkoordinirnya perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan evaluasi kebijakan ruang lingkup Kesra	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Kegiatan 56 Sekolah 22 Senam/ Wrd	90 %	164.371.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase terlaksananya koordinasi bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 %	189.026.550	
4	01	02	2.02	03	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Jamaah Haji yang difasilitasi: pemberangkatan dan penulangannya Jumlah masjid yang dikunjungi oleh Tim Safari Kab. Lima Puluh Kota Jumlah TRHD yang difasilitasi: pemberangkatan dan penulangannya	Terkoordinirnya perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan evaluasi kebijakan ruang lingkup Kesra	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	360 Jamaah 79 Masjid 1 Tim PHD	90 %	555.955.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase terlaksananya koordinasi bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 %	639.348.250	
4	01	02	2.03		Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah			692.765.200	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						796.679.980	
4	01	02	2.03	01	Facilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah keputusan Bupati yang ditetapkan Jumlah Peraturan Bupati yang ditetapkan	Jumlah Perda yang ditetapkan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	135 Keputusan Bupati 35 Peroup	15 Perda	345.325.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase terlaksananya koordinasi bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 %	397.123.750	
4	01	02	2.03	02	Facilitasi Bantuan Hukum	Persentase terlaksananya koordinasi bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Kasus atau perkara pemerintah daerah yang diberikan bantuan hukum	Jumlah Perda yang ditetapkan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Kasus	15 Perda	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase terlaksananya koordinasi bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 %	295.059.180	
4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolan Informasi Hukum	Persentase terlaksananya koordinasi bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah aplikasi Produk Hukum yang diupload untuk dapat diakses aparaturn dan masyarakat	Jumlah Perda yang ditetapkan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Aplikasi	15 Perda	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase terlaksananya koordinasi bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 %	104.497.050	
4	01	02	2.04		Facilitasi Kerjasama Daerah			644.610.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						741.301.500	
4	01	02	2.04	01	Facilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Persentase terlaksananya koordinasi bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Kerjasama antar Daerah yang difasilitasi Jumlah Kerjasama dengan Pihak Ketiga yang difasilitasi Jumlah Kerjasama Pembangunan antar Daerah	Persentase terpenuhinya kesepakatan dengan lembaga pemerintah, Badan dan pihak ketiga dalam rangka peningkatan ekonomi	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 MoA 6 MoA 4 MoU	100 %	371.222.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase terlaksananya koordinasi bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 %	426.905.300
4	01	02	2.04	02	Facilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Persentase terlaksananya koordinasi bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Kerjasama dengan perantau Jumlah nagari Bahan yang difasilitasi dalam peningkatan Kerjasama dengan perantau Jumlah Nagari yang dikoordinir untuk mendata perantau	Persentase terpenuhinya kesepakatan dengan lembaga pemerintah, Badan dan pihak ketiga dalam rangka peningkatan ekonomi	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 MoU/ 8 Nagari 25 Nagari	100 %	273.388.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase terlaksananya koordinasi bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 %	314.396.200

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.40.00 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.40.00 SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prestasi Kerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Catatan Penting		Target Capaian Kinerja	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan							Tolok Ukur	Target
4 01 03																
4 01 03	2.01	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan														
4 01 03	2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengendalian BUMD dan BLUD	Jumlah koordinasi dan pengawasan terhadap BUMD, BUMN dan Perusahaan swasta	Jumlah Laporan Penunjang Kegiatan	Kab. Lima Puluh Kota, Senua Kecamatan, Senua Kelurahan	95 %	8 Lembaga	1 Laporan	49.710.500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		95 %	57.167,075			
4 01 03	2.01 02	Pengendalian dan Distribusi Perencanaan	Jumlah event pameran yang diikuti Pemkab dan OPD terkait untuk Peningkatan kualitas promosi Produk UKM Jumlah kegiatan pemantauan harga komoditi yang beredar Fasilitasi dan koordinasi KP-RI Kabupaten dengan KP-RI Propinsi Jumlah koordinasi pemantauan, pemanfaatan fasilitas dan perkotaan modal dana bergulir dari pemerintah kepada UKM dan koperasi atau LKM dan koordinasi terkait akses keuangan daerah	Jumlah Laporan Penunjang Kegiatan	Kab. Lima Puluh Kota, Senua Kecamatan, Senua Kelurahan	95 %	3 Event 15 Pemanfaatan	1 Laporan	171.761.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		95 %	197.525,150			
4 01 03	2.01 03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Persentase terlaksananya koordinasi bidang Perencanaan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Penunjang Kegiatan	Kab. Lima Puluh Kota, Senua Kecamatan, Senua Kelurahan	95 %	6 Kegiatan 2 Kegiatan Koordinasis	1 Laporan	68.869.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		95 %	79.199,350			
4 01 03	2.02	Administrasi Pembangunan							97.735.500				112.395,825			
4 01 03	2.02 03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Persentase terlaksananya koordinasi bidang Perencanaan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen/Himpunan Rekapitulasi capaian kemajuan program/kegiatan SKPD per-bulan terlaksananya penyusunan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan APBD	Senua Kabupaten/Kota, Senua Kecamatan, Senua Kelurahan	95 %	96 buku 1 Perbup	93 %	97.735.500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		95 %	112.395,825			
4 01 03	2.03	Pengadaan Barang dan Jasa							396.166.000				455.590,900			
4 01 03	2.03 01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase terlaksananya koordinasi bidang Perencanaan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah laporan triwulan monitoring pengadaan barang/jasa Persentase terlaksananya pemilihan penyedia di UKPb yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Telaksananya pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Lima Puluh Kota yang sesuai dengan aturan perundang-undangan	Kab. Lima Puluh Kota, Senua Kecamatan, Senua Kelurahan	95 %	4 Laporan 95 %	225.757.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		95 %	259.620,550			
4 01 03	2.03 03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase terlaksananya koordinasi bidang Perencanaan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah format-format yang dapat disediakan sesuai dengan kebutuhan dalam pengadaan barang/jasa yang permasalahan pengadaan barang/jasa yang dapat terfasilitasi	Telaksananya pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Lima Puluh Kota yang sesuai dengan aturan perundang-undangan	Kab. Lima Puluh Kota, Senua Kecamatan, Senua Kelurahan	95 %	4 Format 4 Kasus	170.409.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		95 %	195.970,350			
4 01 03	2.04	Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam							561.422.000				645.635.300			

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.40.00 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.40.00 SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Praktisan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan					Hasil Kegiatan	Tolok Ukur	
4 01 03 2.04 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Persentase pelaksanaannya Koordinasi bidang Perencanaan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah laporan bulanan dalam penggunaan dana DBH/CHT Jumlah Laporan hasil Pendataan data potensi ekonomi di daerah Jumlah laporan pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi	Laporan Penunjang Kegiatan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	12 Laporan 70 Buku 12 Laporan	6 Laporan	469,664,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Koordinasi bidang Perencanaan dan Kesejahteraan Rakyat	95 %	540,113,600
4 01 03 2.04 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Persentase terlaksananya Koordinasi bidang Perencanaan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah laporan dalam rangka koordinasi, konsultasi dan rapat-rapat kegiatan pariwisata, ekonomi kreatif dan Geo Park	Laporan Penunjang Kegiatan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	1 Laporan	6 Laporan	23,149,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Koordinasi bidang Perencanaan dan Kesejahteraan Rakyat	95 %	26,621,350
4 01 03 2.04 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Persentase terlaksananya Koordinasi bidang Perencanaan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah laporan dalam pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan rapat-rapat, monitoring permasalahan SDA, data dan potensi sumber air bersih Jumlah laporan yang dilaksanakan dalam koordinasi, monitoring pengendalian dan evaluasi terhadap pengelola dan pemanfaat minyak bumi dan energi	Laporan Penunjang Kegiatan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	5 Laporan 1 Laporan	6 Laporan	68,609,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya Koordinasi bidang Perencanaan dan Kesejahteraan Rakyat	95 %	78,900,350
4 01 04	PROGRAM PENYAITAN ADMINISTRASI UMUM													
4 01 04	Pelaksanaan Administrasi Umum													
4 01 04 2.01									3,774,720,444					4,340,928,509
4 01 04 2.01									764,594,350					879,283,502
4 01 04 2.01 01	fasilitasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	Persentase terpenuhinya pelayanan kegiatan ASN/ KDH/WKDH	Jumlah terkinerja kegiatan peningkatan kapasitas KDH /WKDH (Lemhanas) Persentase terfasilitasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	Persentase terpenuhinya pelayanan kegiatan ASN, KDH/WKDH	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	6 Orang 12 Bulan	95 %	764,594,350	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya pelayanan kegiatan ASN/ KDH/WKDH	95 %	879,283,502
4 01 04 2.02	Penataan Organisasi													
4 01 04 2.02 01	Pengelolaan Kebutuhan dan Analisis Jabatan	Persentase terpenuhinya pelayanan kegiatan ASN/ KDH/WKDH	OPD yang memiliki dokumen Analisis Jabatan tugas OPD yang sesuai tugas pokok dan fungsi	Persentase Perangkat Daerah (OPD) yang telah tertata sesuai dengan peraturan perundang undangan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	80 NilaOPD: 100 %	100 %	285,960,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya pelayanan kegiatan ASN/ KDH/WKDH	95 %	328,854,000
4 01 04 2.02	523,309,800													

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.40.00 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.40.00 SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Capaian Program	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2021				Praktisan Maju Rencana Tahun 2022			
			Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan	Tolok Ukur		Target
4 01 04 202 02	Facilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase terpenuhinya pelayanan kegiatan ASN/ KDH/ WKDH	Jumlah dokumen peta bisnis dan SPBE Jumlah laporan forum konsultasi publik Persentase OPD yang melaksanakan inovasi pelayanan publik Persentase OPD yang telah dilakukan evaluasi pelayanan publik Persentase OPD yang telah menyusun indeks kepuasan masyarakat	Persentase Perangkat Daerah (OPD) yang telah tertata sesuai dengan peraturan perundang undangan	Kab. Lima Puluh Kota, Senua Kecamatan, Senua Kelurahan	95 %	1 Dokumen 1 Laporan 80 % 80 % 80 %	100 %	111.427.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya pelayanan kegiatan ASN/ KDH/ WKDH	95 %	128.141.050
4 01 04 202 03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Persentase terpenuhinya pelayanan kegiatan ASN/ KDH/ WKDH	Nilai Komponen Reformasi Birokrasi	Persentase Perangkat Daerah (OPD) yang telah tertata sesuai dengan peraturan perundang undangan	Kab. Lima Puluh Kota, Senua Kecamatan, Senua Kelurahan	95 %	79 Nilai	100 %	57.665.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya pelayanan kegiatan ASN/ KDH/ WKDH	95 %	66.314.750
4 01 04 203	Protokol dan Komunikasi Pimpinan							1.982.331.178						2.279.680.854
4 01 04 203 01	Facilitasi Keprotokolan	Persentase terpenuhinya pelayanan kegiatan ASN/ KDH/ WKDH	Terselenggaranya kegiatan KDH/WKDH sesuai aturan dan tata keprotokolan yang berlaku, dan terlaksananya bimtek keprotokolan, lomba MC dan terkutunya bimtek Keprotokolan dalam dan luar daerah	Terpublikasinya dan terlaksananya kegiatan KDH/WKDH	Kab. Lima Puluh Kota, Senua Kecamatan, Senua Kelurahan	95 %	4 Kegiatan	95 %	272.341.600	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya pelayanan kegiatan ASN/ KDH/ WKDH	95 %	313.192.840
4 01 04 203 02	Facilitasi Komunikasi Pimpinan	Persentase terpenuhinya pelayanan kegiatan ASN/ KDH/ WKDH	Jumlah cetak media internal serta pemberitaan daerah untuk publikasi kegiatan pemerintah daerah Jumlah Media cetak yang mempublikasikan kegiatan pemerintah daerah	Terpublikasinya dan terlaksananya kegiatan KDH/WKDH	Senua Kabupaten/Kota, Senua Kecamatan, Senua Kelurahan	95 %	1000 Eksemplar 7 Media Cetak	95 %	1.343.834.128	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya pelayanan kegiatan ASN/ KDH/ WKDH	95 %	1.545.409.247
4 01 04 203 03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Persentase terpenuhinya pelayanan kegiatan ASN/ KDH/ WKDH	Jumlah terpublikasinya kegiatan pemerintah daerah melalui kegiatan Badan Koordinasi Kehumasan /Bakohumas/daerah dan nasional Terselenggaranya informasi pembangunan melalui mobil unit keliling serta spanduk /balho pembangunan Terselenggaranya informasi pembangunan melalui mobil unit keliling serta spanduk /balho pembangunan	Terpublikasinya dan terlaksananya kegiatan KDH/WKDH	Kab. Lima Puluh Kota, Senua Kecamatan, Senua Kelurahan	95 %	4 Kegiatan 25 Balho 750 Spanduk	95 %	366.155.450	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya pelayanan kegiatan ASN/ KDH/ WKDH	95 %	421.078.767
4 01 04 204	Perencanaan dan Keuangan							572.742.916						658.654.353

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.40.00 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.40.00 SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Capaian Program	Indikator Kinerja	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Praktikan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Tolak Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
4 01 04 2.04 02	Pengelolaan Keuangan	Persentase terpenuhinya pelayanan kegiatan ASN/ KDH/ WKDH	Terbayarnya gaji dan tunjangan KDH dan Wakil KDH	Tersedianya Pembayaran Gaji, tunjangan dan Operasional KDH/ WKDH	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	12 bulan	12 Bulan	572.742.916	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase terpenuhinya pelayanan kegiatan ASN/ KDH/ WKDH	95 %	658.654.353	

BAB V PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 ini telah disusun sedemikian rupa dengan mempertimbangkan kondisi internal berupa kekuatan dan kelemahan dan juga kondisi eksternal yakni peluang dan tantangan. Dengan pendekatan tersebut diharapkan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah yang lebih jelas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kegiatan Kemasyarakatan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dengan adanya Rancangan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Tahun 2021, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran visi dan misi instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi, dan sinergis serta berkelanjutan dengan sesama PD lain serta lembaga teknis lainnya dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Namun demikian kami menyadari bahwa penyusunan Rancangan Rencana Kerja tentu tidak terlepas dari kesempurnaan. Untuk itu kepada semua pihak yang terkait kami mengharapkan adanya sumbangan pikiran untuk terciptanya Rancangan Renja (Rencana Kerja) Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota menjadi Rencana Kerja yang lebih baik dalam mendukung program pembangunan nasional, provinsi dan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Sarilamak, Juli 2020


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**
WIDYA PUTRA, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640404 198603 1 017



BUPATI LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 285 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DALAM FORMASI JABATAN *EX-OFFICIO*

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 125 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah meliputi penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah, perlu dibentuk Struktur Organisasi Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2021 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 140);
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 71) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 83 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 80);
18. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 145 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 148);

19. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Struktur Organisasi Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2021 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Formasi Jabatan *Ex-Officio* dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Tugas secara umum :

- a. Mengambil langkah-langkah yang tepat dan diperlukan dalam rangka penyusunan Renja tahun 2021;
- b. Menyusun dan menyajikan Renja, mulai dari Rancangan Awal sampai pada penetapan Renja, sesuai dengan sistematika yang ditetapkan dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

2. Tugas berdasarkan kedudukan dalam Tim :

- a. Ketua bertugas mengatur dan memimpin seluruh anggota tim dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2021 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan arahan Pengarah melalui Penanggung Jawab;
- b. Sekretaris bertugas mengecek dan menyiapkan kelengkapan bahan dan seluruh administrasi untuk kelancaran penyusunan dan penulisan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2021 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- c. Anggota bertugas menghimpun, mengolah, mengonsep, menyusun, dan menulis serta mengetik naskah Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2021 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati Lima Puluh Kota.

KEEMPAT : Untuk kelancaran penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2021 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Ketua Tim dapat menetapkan pembagian tugas yang lebih rinci kepada seluruh anggota Tim.

KELIMA : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota melalui DPA

masing-masing Perangkat Daerah.

KEENAM

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 08 November 2019



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 285 TAHUN 2019

TANGGAL : 08 November 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI TIM
PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2021 DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DALAM FORMASI JABATAN *EX-OFFICIO*

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	SEKRETARIAT DAERAH	
	Sekretaris Daerah	Ketua
	Asisten Pemerintahan	Wakil Ketua I
	Asisten Perekonomian Dan Pembangunan	Wakil Ketua II
	Asisten Administrasi Umum	Wakil Ketua III
	Kabag Keuangan	Sekretaris
	Kabag Tata Pemerintahan Umum	Anggota
	Kabag Hukum	Anggota
	Kabag Organisasi	Anggota
	Kabag Kerjasama dan Administrasi Pembangunan	Anggota
	Kabag Pengadaan Barang/Jasa	Anggota
	Kabag Perekonomian	Anggota
	Kabag Kesejahteraan Rakyat	Anggota
	Kabag Umum Dan Perlengkapan	Anggota
	Kabag Humas Dan Protokoler	Anggota
	Kasubag PP Dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Koordinasi Antar Lembaga	Anggota
	Kasubag Tata Pemerintahan dan Perangkat daerah	Anggota
	Kasubag Otonomi Daerah	Anggota
	Kasubag Peraturan Perundang-undangan	Anggota
	Kasubag Evaluasi dan Dokumentasi Hukum	Anggota
	Kasubag Bantuan Hukum dan HAM	Anggota
	Kasubag Kelembagaan	Anggota
	Kasubag Ketatalaksanaan	Anggota
	Kasubag Analisa Jabatan	Anggota
	Kasubag Kerjasama Antar Daerah	Anggota
	Kasubag Kerjasama Pihak Ketiga dan Rantau	Anggota
	Kasubag Administrasi Pembangunan	Anggota
	Kasubag Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Anggota
	Kasubag Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa	Anggota
	Kasubag Pendampingan dan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa	Anggota
	Kasubag Sarana Perekonomian	Anggota
	Kasubag Sarana Produksi	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasubag Pengembangan Perekonomian dan BUMD	Anggota
	Kasubag Koordinasi Pengembangan SDM	Anggota
	Kasubag Bina Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasubag Kebudayaan dan Keagamaan	Anggota
	Kasubag Rumah Tangga	Anggota
	Kasubag Administrasi Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Perlengkapan	Anggota
	Kasubag Perbendaharaan dan Akutansi	Anggota
	Kasubag Anggaran	Anggota
	Kasubag Humas dan Pemberitaan	Anggota
	Kasubag Dokumentasi dan Multimedia	Anggota
	Kasubag Protokoler	Anggota
	Pelaksana pada Sekretariat Daerah	Anggota
2.	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	Sekretaris DPRD	Ketua
	Kabag Umum dan Keuangan	Sekretaris
	Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	Anggota
	Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan	Anggota
	Kasubag Fasilitasi Penganggaran	Anggota
	Kasubag Program dan Keuangan	Anggota
	Kasubag Kajian Perundang-Undangan	Anggota
	Kasubag Humas, Protokol, dan Publikasi	Anggota
	Kasubag Fasilitasi Pengawasan	Anggota
	Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Rumah Tangga	Anggota
	Kasubag Persidangan dan Risalah	Anggota
	Kasubag Kerjasama dan Aspirasi	Anggota
	Pelaksana pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
3.	INSPEKTORAT	
	Inspektur	Ketua
	Sekretaris Inspektorat	Sekretaris
	Inspektur Pembantu Wilayah I	Anggota
	Inspektur Pembantu Wilayah II	Anggota
	Inspektur Pembantu Wilayah III	Anggota
	Inspektur Pembantu Wilayah IV	Anggota
	Auditor Madya	Anggota
	Auditor Muda	Anggota
	Auditor Pertama	Anggota
	Kasubag Perencanaan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Administrasi dan Umum	Anggota
	Pelaksana pada Inspektorat	Anggota
4.	DINAS KESEHATAN	
	Kepala Dinas Kesehatan	Ketua
	Sekretaris Dinas Kesehatan	Sekretaris
	Kabid Pelayanan Kesehatan	Anggota
	Kabid Sumber Daya Kesehatan	Anggota
	Kabid Kesehatan Masyarakat	Anggota
	Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Evaluasi, Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Keuangan dan Pengelolaan Aset	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Alat Kesehatan dan Fasyankes	Anggota
	Kasi Pelayanan Kefarmasian dan Perizinan	Anggota
	Kasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Anggota
	Kasi Surveilans, Imunisasi dan Penanggulangan Krisis Kesehatan	Anggota
	Kasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Anggota
	Kasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa dan Nafza	Anggota
	Kasi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Anggota
	Kasi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	Anggota
	Kasi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Pelayanan Kesehatan Primer	Anggota
	Kasi Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pelayanan Kesehatan Haji, dan Jaminan Kesehatan	Anggota
	Kasi Peningkatan Mutu dan Akreditasi, dan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Kesehatan	Anggota
5.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Ketua
	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sekretaris
	Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar	Anggota
	Kabid Pembinaan PAUD dan PNF	Anggota
	Kabid Pembinaan Ketenagaan	Anggota
	Kabid Kebudayaan	Anggota
	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Keuangan dan BMD	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasi Kurikulum dan Penilaian	Anggota
	Kasi Peserta Didik dan Pendidikan Karakter	Anggota
	Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasana	Anggota
	Kasi Kurikulum, Penilaian dan Peserta Didik	Anggota
	Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana	Anggota
	Kasi Pendidikan Non Formal	Anggota
	Kasi PTK PAUD dan PNF	Anggota
	Kasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan SD	Anggota
	Kasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan SMP	Anggota
	Kasi Cagar Budaya dan Permuseuman	Anggota
	Kasi Sejarah dan Nilai Tradisi	Anggota
	Kasi Kesenian	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
6.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ketua
	Sekretaris Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sekretaris
	Kepala Bidang Bina Marga	Anggota
	Kepala Bidang Cipta Karya	Anggota
	Kepala Bidang Sumber Daya Air	Anggota
	Kepala Bidang Jasa Konstruksi	Anggota
	Kepala Bidang Tata Ruang	Anggota
	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
	Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasi Perencanaan dan Evaluasi Sumber Daya Air	Anggota
	Kasi Pelaksanaan Sumber Daya Air	Anggota
	Kasi Operasi dan pemeliharaan Sumber Daya Air	Anggota
	Kasi Perencanaan dan Evaluasi Bina Marga	Anggota
	Kasi Pembangunan Jalan dan Jembatan	Anggota
	Kasi Preservasi Jalan dan Jembatan	Anggota
	Kasi Perencanaan Jasa Konstruksi	Anggota
	Kasi Pembinaan dan Pemberdayaan	Anggota
	Kasi Pemantauan Dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Perencanaan dan Tata Ruang	Anggota
	Kasi Pemanfaatan dan pengendalian	Anggota
	Kasi Pertanahan	Anggota
	Kasi Perencanaan dan Evaluasi Cipta Karya	Anggota
	Kasi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman	Anggota
	Kasi Tata Bangunan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
7.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	Kepala Satpol PP	Ketua
	Sekretaris Satpol PP	Sekretaris
	Kabid Trantib	Anggota
	Kabid Perlindungan Masyarakat	Anggota
	Kabid PPUD	Anggota
	Kabid SDA	Anggota
	Kasubag Program & Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum & Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasi Intelijen	Anggota
	Kasi Trantib & Pengamanan	Anggota
	Kasi Operasional & Logistik	Anggota
	Kasi Bina Potensi	Anggota
	Kasi Data Informasi	Anggota
	Kasi Satlinmas dan Pengaduan Masyarakat	Anggota
	Kasi Kerjasama Antar Lembaga	Anggota
	Kasi Penegakan	Anggota
	Kasi Pembinaan Pengawasan & Penyuluhan	Anggota
	Kasi Pelatihan Dasar	Anggota
	Kasi Teknis Fungsional	Anggota
	Kasi Tindak Internal	Anggota
	Pelaksana pada Satpol PP	Anggota
8.	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota	Ketua
	Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota	Sekretaris
	Kepala Bidang Dukungan Sarana dan Prasarana Operasi	Anggota
	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan	Anggota
	Kepala Bidang Pengendalian Operasional	Anggota
	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kepala Seksi Bina Pengembangan Sarana dan Prasarana	Anggota
	Kepala Seksi Bina Keselamatan dan Kebakaran	Anggota
	Kepala Seksi Bina Kualitas dan Personil	Anggota
	Kepala Seksi Peralatan dan Perbengkelan	Anggota
	Kepala Seksi Pengawasan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	Anggota
	Kepala Seksi Penyediaan Pergudangan dan Penyaluran	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kepala Seksi Pencarian dan Keselamatan	Anggota
	Kepala Seksi Pengendalian Kesiagaan dan Komunikasi	Anggota
	Kepala Seksi Pengendalian dan Penyuplaian Bahan Pemadam	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pemadam Kebakaran	Anggota
9.	DINAS SOSIAL	
	Kepala Dinas Sosial	Ketua
	Sekretaris Dinas Sosial	Sekretaris
	Kabid Rehabilitasi Sosial	Anggota
	Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota
	Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia	Anggota
	Kasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	Anggota
	Kasi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial, Korban Nafza dan Korban Perdagangan Orang	Anggota
	Kasi Perlindungan Sosial Korban Bencana	Anggota
	Kasi Perlindungan Sosial bagi Korban Tindak Kekerasan dan Orang Terlantar	Anggota
	Kasi Jaminan Sosial Keluarga	Anggota
	Kasi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas	Anggota
	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Penyaluran Bantuan Stimulan	Anggota
	Kasi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Sosial	Anggota
10.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ketua
	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretaris
	Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Anggota
	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil	Anggota
	Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota
	Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Anggota
	Kasubag Perencanaan	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Identitas Penduduk	Anggota
	Kasi Pindah Datang Penduduk	Anggota
	Kasi Pendataan Penduduk	Anggota
	Kasi Kelahiran	Anggota
	Kasi Perkawinan dan Perceraian	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota
	Kasi Pengolahan dan Penyajian Data	Anggota
	Kasi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi	Anggota
	Kasi Kerjasama	Anggota
	Kasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Anggota
	Kasi Inovasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
11.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	Kepala DPPKBPPPA	Ketua
	Sekretaris DPPKBPPPA	Sekretaris
	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga	Anggota
	Kepala Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan Penggerakan	Anggota
	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan	Anggota
	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kepala Seksi Pengendalian Penduduk	Anggota
	Kepala Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Anggota
	Kepala Seksi Penyuluhan, Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP	Anggota
	Kepala Seksi Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Anggota
	Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan	Anggota
	Kepala Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alokasi	Anggota
	Kepala Seksi Pelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi	Anggota
	Kepala Seksi Pelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Politik dan Hukum	Anggota
	Kepala Seksi Pelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga, Data dan Informasi	Anggota
	Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dan Data Kekerasan Perempuan	Anggota
	Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak, Data dan Informasi Anak	Anggota
	Kepala Seksi Perlindungan Khusus Anak dan Data Kekerasan Anak	Anggota
	Pelaksana pada DPPKBPPPA	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
12.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	Kepala DPMPTSP	Ketua
	Sekretaris DPMPTSP	Sekretaris
	Kabid Pelayanan Terpadu	Anggota
	Kabid Promosi	Anggota
	Kabid Perencanaan dan Pengembangan	Anggota
	Kabid Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasi Pelayanan Perizinan Umum	Anggota
	Kasi Pelayanan Perizinan Umum Penanaman Modal	Anggota
	Kasi Fasilitasi Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Lainnya	Anggota
	Kasi Promosi	Anggota
	Kasi Sarana dan Prasarana Promosi	Anggota
	Kasi Data dan Informasi	Anggota
	Kasi Perencanaan Potensi dan Peluang Investasi	Anggota
	Kasi Penyuluhan Penanaman Modal	Anggota
	Kasi Regulasi Penanaman Modal	Anggota
	Kasi Pemantauan Penanaman Modal	Anggota
	Kasi Pembinaan Penanaman Modal	Anggota
	Kasi Pengawasan Penanaman Modal	Anggota
	Pelaksana pada DPMPTSP	Anggota
13.	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH	
	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi UKM	Ketua
	Sekretaris Perdagangan, Koperasi UKM	Sekretaris
	Kepala Bidang Fasilitasi dan Sarana Distribusi Perdagangan	Anggota
	Kepala Bidang Kemetrolagian dan Pengawasan Perdagangan	Anggota
	Kepala Bidang Kelembagaan & Pengawasan Koperasi	Anggota
	Kepala Bidang Pemberdayaan & Pengembangan Koperasi & Usaha Mikro	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasi Kelembagaan dan perizinan	Anggota
	Kasi Peningkatan kualitas SDM koperasi & kewirausahaan	Anggota
	Kasi Metrologi	Anggota
	Kasi Pengembangan Jaringan Perdagangan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasi Pembinaan Pelaku Usaha Perdagangan	Anggota
	Kasi Sarana Distribusi dan Stabilitas Barang Pokok dan Penting	Anggota
	Kasi Pengawasan Perizinan dan Pendaftaran	Anggota
	Kasi Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Anggota
	Kasi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan	Anggota
	Kasi Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penilaian Kesehatan Koperasi	Anggota
	Kasi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi	Anggota
	Kasi Pemberdayaan dan Fasilitasi Usaha Mikro	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perdagangan, Koperasi UKM	Anggota
14.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Ketua
	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sekretaris
	Kabid Pembinaan dan Pengawasan Industri	Anggota
	Kabid Sarana dan Prasarana Industri	Anggota
	Kabid Ketenagakerjaan	Anggota
	Kabid Transmigrasi	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasi Pembinaan Industri Agro	Anggota
	Kasi Pembinaan Industri Non Agro	Anggota
	Kasi Pengawasan, Sertifikasi dan Standarisasi Industri	Anggota
	Kasi Perizinan dan Data	Anggota
	Kasi Pengembangan teknologi Industri	Anggota
	Kasi Promosi dan Pemasaran	Anggota
	Kasi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja	Anggota
	Kasi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Anggota
	Kasi Perlindungan Tenaga Kerja	Anggota
	Kasi Penempatan Transmigrasi	Anggota
	Kasi Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	Anggota
	Kasi Informasi dan Pembinaan SDM Transmigrasi	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Anggota
15.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	Kepala Diskominfo	Ketua
	Sekretaris Diskominfo	Sekretaris
	Kabid Infrastruktur TIK	Anggota
	Kabid E-Government	Anggota
	Kabid Statistik, Persandian dan Informasi Publik	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasi Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Anggota
	Kasi Layanan Hubungan Media	Anggota
	Kasi Pemberdayaan Media Massa	Anggota
	Kasi Layanan Infrastruktur TIK	Anggota
	Kasi Layanan Manajemen Data Informasi	Anggota
	Kasi Layanan Keamanan Informasi	Anggota
	Kasi Penyelenggaraan Ekosistem TIK	Anggota
	Kasi Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik	Anggota
	Kasi Statistik	Anggota
	Kasi Persandian	Anggota
	Kasi Pelayanan Informasi Publik	Anggota
	Pelaksana pada Diskominfo	Anggota
16.	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Ketua
	Sekretaris Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Sekretaris
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kabid Pariwisata	Anggota
	Kasi Promosi dan Informasi	Anggota
	Kasi Pengelolaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata	Anggota
	Kasi Kemitraan dan Kerjasama Antar Lembaga	Anggota
	Kabid Pemuda	Anggota
	Kasi Peningkatan Kreatifitas Kewirausahaan Pemuda	Anggota
	Kasi Pengembangan Kompetensi Pemuda	Anggota
	Kasi Pengembangan Organisasi Kepemudaan	Anggota
	Kabid Olahraga	Anggota
	Kasi Pengembangan Olah Raga Pendidikan	Anggota
	Kasi Pengembangan Olah Raga Prestasi	Anggota
	Kasi Pengembangan Olah Raga Rekreasi dan Tradisi	Anggota
	Kabid Sarana Prasarana dan Pengembangan SDM	Anggota
	Kasi Sarana Prasarana Pariwisata	Anggota
	Kasi Sarana Prasarana Pemuda Olah Raga	Anggota
	Kasi Pendataan dan Pengembangan SDM	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
17.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI	
	Kepala DPMD/N	Ketua
	Sekretaris DPMD/N	Sekretaris
	Kabid Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kabid Pemerintahan Nagari	Anggota
	Kabid Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Ketahanan dan Partisipasi Masyarakat	Anggota
	Kasi Pemberdayaan Adat, Sosial Budaya dan Kesejahteraan Keluarga	Anggota
	Kasi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, Kawasan Nagari, SDA dan TTG	Anggota
	Kasi Pemberdayaan Aparatur dan Lembaga Pemerintahan Nagari	Anggota
	Kasi Administrasi Produk Hukum Nagari dan Kerjasama antar Nagari	Anggota
	Kasi Organisasi Pemerintahan Nagari	Anggota
	Kasi Perencanaan Keuangan Nagari	Anggota
	Kasi Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan Nagari	Anggota
	Kasi Aset dan Kekayaan Nagari	Anggota
	Pelaksana pada DPMD/N	Anggota
18.	DINAS PERHUBUNGAN	
	Kepala Dinas Perhubungan	Ketua
	Sekretaris Dinas Perhubungan	Sekretaris
	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	Anggota
	Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Anggota
	Kepala Bidang Prasarana	Anggota
	Kasubag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Lalu Lintas	Anggota
	Kasi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana	Anggota
	Kasi Pengujian Sarana	Anggota
	Kasi Angkutan	Anggota
	Kasi Pengoperasian Prasarana	Anggota
	Kasi Perawatan Prasarana	Anggota
	Kasi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan	Anggota
	Kasi Lingkungan Perhubungan	Anggota
	Kasi Keselamatan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perhubungan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
19.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN	
	Kepala DLHPP	Ketua
	Sekretaris DLHPP	Sekretaris
	Kabid Perencanaan, Pengkajian dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Anggota
	Kabid Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pertamanan	Anggota
	Kabid Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Penataan Hukum Lingkungan Hidup	Anggota
	Kabid Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasi Perencanaan, Pengkajian dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Anggota
	Kasi Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup	Anggota
	Kasi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Anggota
	Kasi Operasional Penanganan Sampah	Anggota
	Kasi Pengelolaan Limbah dan Sampah	Anggota
	Kasi Pertamanan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Anggota
	Kasi Pengendalian Pencemaran Lingkungan	Anggota
	Kasi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup	Anggota
	Kasi Penataan Hukum Lingkungan Hidup	Anggota
	Kasi Perumahan	Anggota
	Kasi Kawasan Permukiman	Anggota
	Kasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Anggota
	Analisis Lingkungan Hidup	Anggota
	Analisis Sistem Mutu dan Lingkungan	Anggota
	Pelaksana pada DLHPP	Anggota
20.	DINAS PERTANIAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
	Kepala Dinas Tanhorbun	Ketua
	Sekretaris Tanhorbun	Sekretaris
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan dan Aset	Anggota
	Kabid Tanaman Pangan	Anggota
	Kasi Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan	Anggota
	Kasi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan	Anggota
	Kasi Produksi Tanaman Pangan	Anggota
	Kabid Tanaman Hortikultura	Anggota
	Kasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Hortikultura	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Holtikultura	Anggota
	Kasi Produksi Tanaman Holtikultura	Anggota
	Kabid Tanaman Perkebunan	Anggota
	Kasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Perkebunan	Anggota
	Kasi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan	Anggota
	Kasi Produksi Tanaman Perkebunan	Anggota
	Kabid Sarana, Prasarana, Pembiayaan dan Penyuluhan	Anggota
	Kasi Penyuluhan	Anggota
	Kasi Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin Pertanian	Anggota
	Kasi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan	Anggota
	Pelaksana pada Distanhorbun	Anggota
21.	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Ketua
	Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Sekretaris
	Kabid Perbibitan dan Produksi	Anggota
	Kabid Keswan, Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran	Anggota
	Kabid. Sarana dan Prasarana	Anggota
	Kabid Penyuluhan	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasi Kasi Non Ruminansia	Anggota
	Kasi Kasi Ruminansia	Anggota
	Kasi Perbibitan	Anggota
	Kasi Kesmavet	Anggota
	Kasi Kesehatan Hewan	Anggota
	Kasi Pengolahan dan Pemasaran	Anggota
	Kasi Pakan	Anggota
	Kasi Pembiayaan dan Investasi	Anggota
	Kasi Lahan dan Irigasi	Anggota
	Kasi Kelembagaan	Anggota
	Kasi Metode dan Infomasi	Anggota
	Kasi Ketenagaan	Anggota
	Pelaksana pada Disnakkeswan	Anggota
22.	DINAS PERIKANAN	
	Kepala Dinas Perikanan	Ketua
	Sekretaris Dinas Perikanan	Sekretaris
	Kabid Pengembangan Sumberdaya Perikanan	Anggota
	Kabid Pemberdayaan Usaha Perikanan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kabid Pengelolaan Pembudidaya Ikan	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Pengelolaan Kawasan Budidaya, Tata Pemanfaatan Air, Lahan dan Pelestarian Plasma Nutiah	Anggota
	Kasi Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Anggota
	Kasi Pengendalian Mutu Pembudiyaaan Ikan	Anggota
	Kasi Sarana dan Prasarana Perikanan	Anggota
	Kasi Jaminan Perlindungan Usaha Perikanan	Anggota
	Kasi Penguatan Daya Saing Usaha Perikanan	Anggota
	Kasi Peningkatan SDM Pelaku Usaha Perikanan	Anggota
	Kasi Kemitraan Usaha dan Fasilitasi Perizinan Perikanan	Anggota
	Kasi Kelembagaan, Pendampingan dan Koordinasi Penyuluhan Perikanan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perikanan	Anggota
23.	DINAS PANGAN	
	Kepala Dinas Pangan	Ketua
	Sekretaris Dinas Pangan	Sekretaris
	Kabid Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Anggota
	Kabid Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Ketersediaan Pangan	Anggota
	Kasi Distribusi dan Harga Pangan	Anggota
	Kasi Kerawanan Pangan	Anggota
	Kasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Anggota
	Kasi Pengembangan Pangan Lokal	Anggota
	Kasi Keamanan Pangan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pangan	Anggota
24.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Ketua
	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sekretaris
	Kabid Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kabid Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kabid Pembinaan dan Pengawasan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasubag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan Dinas	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Perpustakaan dan Kearsipan	
	Kasi Deposit dan Pelestarian Bahan Pustaka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Promosi dan Layanan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Pengembangan, Pengolahan Bahan Pustaka dan TIK Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Arsip Dinamis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Arsip Statis dan Layanan Informasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Pembinaan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Pembinaan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Pengawasan Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Fungsional Pustakawan	Anggota
	Fungsional Kearsipan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pustaka dan Kearsipan	Anggota
25.	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	Kepala Bapelitbang	Ketua
	Sekretaris Bapelitbang	Sekretaris
	Kabid Ekonomi Penelitian dan Pengembangan	Anggota
	Kabid SDM, Sosbud dan Pemerintahan Bapelitbang	Anggota
	Kabid Perencanaan, Data, Pengendalian dan Evaluasi Bapelitbang	Anggota
	Kabid Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup Bapelitbang	Anggota
	Kasubag Program Bapelitbang	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian Bapelitbang	Anggota
	Kasubag Keuangan Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Pertanian dan Perikanan Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Perindustrian, Perdagangan, UMK, Penanaman Modal dan Pariwisata Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Perencanaan dan Pendanaan Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Pemerintahan Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Sosial Budaya Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Sumber Daya Manusia Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Infrastruktur Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Pengembangan Wilayah Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Lingkungan Hidup Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bapelitbang	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasubid Data dan Informasi Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang	Anggota
	Pelaksana pada Bapelitbang	Anggota
26.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	
	Kepala BKPSDM	Ketua
	Sekretaris BKPSDM	Sekretaris
	Kabid Pendidikan, Pelatihan dan Penilaian Kinerja ASN	Anggota
	Kasubid Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Teknis	Anggota
	Kasubid Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Manajerial ASN	Anggota
	Kasubid Pendidikan dan Penilaian Kinerja ASN	Anggota
	Kabid Pengembangan dan Disiplin ASN	Anggota
	Kasubid Kepangkatan	Anggota
	Kasubid Mutasi	Anggota
	Kasubid Disiplin ASN	Anggota
	Kabid Informasi Pengadaan dan Status PNS	Anggota
	Kasubid Status ASN	Anggota
	Kasubid Informasi ASN	Anggota
	Kasubid Formasi dan Pengadaan ASN	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Pelaksana pada BKPSDM	Anggota
27.	BADAN KEUANGAN	
	Kepala Badan Keuangan	Ketua
	Sekretaris Badan Keuangan	Sekretaris
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kabid Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota
	Kasubid 1 Bid. Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota
	Kabid Perbendaharaan Daerah	Anggota
	Kasubid 1 Bid. Perbendaharaan Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Perbendaharaan Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Perbendaharaan Daerah	Anggota
	Kabid Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Anggota
	Kasubid 1 Bid. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Daerah	
	Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
	Kasubid 1 Bid. Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
	Kabid Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 1 Bid. Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Anggota
	Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 1 Bid. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
	Pelaksana pada Badan Keuangan	Anggota
28.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Ketua
	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Sekretaris
	Kabid Ideologi Dan Wasbang	Anggota
	Kabid Politik Dalam Negeri	Anggota
	Kabid Kewaspadaan Dan Pembinaan Masyarakat	Anggota
	Kabid Perlindungan Masyarakat	Anggota
	Kasubag Penyusunan Program	Anggota
	Kasubag Umum Dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubid Bina Ideologi	Anggota
	Kasubid Bina Wasbang	Anggota
	Kasubid Bintang, Eksosbud Dan Agama	Anggota
	Kasubid Penanganan Konflik dan Pembinaan Masyarakat	Anggota
	Kasubid Bina Potensi Satuan LINMAS	Anggota
	Kasubid Pengarahan dan Pengendalian Satuan LINMAS	Anggota
	Kasubid Hal Dan Fasilitas Pemilu	Anggota
	Kasubid Fasilitas Parpol Dan Ormas	Anggota
	Pelaksana pada Badan Kesbangpol	Anggota
29.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	Kepala Pelaksana BPBD	Ketua
	Sekretaris BPBD	Sekretaris
	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kabid Kedaruratan dan Logistik	Anggota
	Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasi Pencegahan	Anggota
	Kasi Kesiapsiagaan	Anggota
	Kasi Kedaruratan	Anggota
	Kasi Logistik	Anggota
	Kasi Rehabilitasi	Anggota
	Kasi Rekonstruksi	Anggota
	Pelaksana pada BPBD	Anggota
43.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ACHMAD DARWIS	
	Direktur RSUD dr. Achmad Darwis	Ketua
	Sekretaris RSUD dr. Achmad Darwis	Sekretaris
	Kepala Bidang Sarana, Prasarana dan Logistik	Anggota
	Kepala Bidang Pelayanan Penunjang dan Promosi	Anggota
	Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan	Anggota
	Kasi Sarana Prasarana	Anggota
	Kasi Logistik	Anggota
	Kasi Pelayanan Penunjang	Anggota
	Kasi Pelayanan Promosi	Anggota
	Kasi Pelayanan Medis	Anggota
	Kasi Pelayanan Perawatan	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
	Pelaksana pada RSUD Achmad Darwis	Anggota
30.	KECAMATAN GUGUAK	
	Camat Guguak	Ketua
	Sekretaris Camat Guguak	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Guguak	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
31.	KECAMATAN PAYAKUMBUH	
	Camat Payakumbuh	Ketua
	Sekretaris Camat Payakumbuh	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Payakumbuh	Anggota
32.	KECAMATAN MUNGKA	
	Camat Mungka	Ketua
	Sekretaris Camat Mungka	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Mungka	Anggota
33.	KECAMATAN SULIKI	
	Camat Suliki	Ketua
	Sekretaris Camat Suliki	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Suliki	Anggota
34.	KECAMATAN BUKIK BARISAN	
	Camat Bukik Barisan	Ketua
	Sekretaris Camat Bukik Barisan	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Bukik Barisan	Anggota
35.	KECAMATAN GUNUANG OMEH	
	Camat Gunuang Omeh	Ketua
	Sekretaris Camat Gunuang Omeh	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Gunuang Omeh	Anggota
36.	KECAMATAN LUAK	
	Camat Luak	Ketua
	Sekretaris Camat Luak	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Luak	Anggota
37.	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN	
	Camat Lareh Sago Halaban	Ketua
	Sekretaris Camat Lareh Sago Halaban	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Lareh Sago Halaban	Anggota
38.	KECAMATAN HARAU	
	Camat Harau	Ketua

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
	Sekretaris Camat Harau	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Harau	Anggota
39.	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI	
	Camat Situjuh Limo Nagari	Ketua
	Sekretaris Camat Situjuh Limo Nagari	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Situjuh Limo Nagari	Anggota
40.	KECAMATAN AKABILURU	
	Camat Akabiluru	Ketua
	Sekretaris Camat Akabiluru	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Akabiluru	Anggota
41.	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU	
	Camat Pangkalan Koto Baru	Ketua
	Sekretaris Camat Pangkalan Koto Baru	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Anggota
42.	KECAMATAN KAPUR IX	
	Camat Kapur IX	Ketua
	Sekretaris Camat Kapur IX	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Kapur IX	Anggota

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 08 November 2019

BUPATI LIMA PULUH KOTA



IRFENDI ARBI